

DINAMIKA GERAKAN POST-ISLAMISME DALAM POLITIK MESIR DAN TURKI : SEBUAH PERBANDINGAN

(The Dynamic of Post-Islamism Movement in Political of Egypt and Turkey : A

Comparative Study)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hubungan Internasional dan mencapai gelar sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh

AROFATIN MAULINA ULFA 120910101001

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2017

PERSEMBAHAN

Teruntuk yang telah memberi kehidupan, ibunda dan ayahanda tercinta. Dan untuk adikku, Lala, yang telah banyak merelakan kesenanganya.



мото

Eternal life belongs to those who live in the present.¹ (Ludwig Wittgenstein)

¹Diambil dari akun instagram @quotesphilosophy

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arofatin Maulina Ulfa

NIM : 120910101001

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Dinamika Gerakan Post-Islamisme dalam Politik Mesir dan Turki : Sebuah Perbandingan" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 November2016 Yang menyatakan,

> Arofatin Maulina Ulfa 120910101001

SKRIPSI

DINAMIKA GERAKAN POST-ISLAMISME DALAM POLITIK MESIR DAN TURKI : SEBUAH PERBANDINGAN

Oleh
Arofatin Maulina Ulfa
NIM 120910101001

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph. D.

Dosen Pembimbing Anggota: Fuat Albayumi, S.IP, MA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Dinamika Gerakan Post-Islamisme dalam Politik Mesir dan Turki : Sebuah Perbandingan" telah diuji dan di sahkan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Juni 2017

Waktu : 09.00 WIB

: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember **Tempat**

Tim Penguji:

Ketua

Dr. Muhammad Iqbal S.Sos, M.Si

NIP. 197212041999031004

Sekretaris I Sekretaris II

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph. D

NIP. 196108281992011001

Fuat Albayumi, S.IP, MA

NIP. 197404242005011002

Anggota I Anggota II

Drs. Muhammad Nur Hasan, M.Hum

NIP. 195904231987021001

Drs. Supriyadi, M.Si

NIP. 195803171985031003

Mengesahkan Dekan

Dr. Ardiyanto, M.Si NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Dinamika Gerakan Post-Islamisme dalam Politik Mesir dan Turki: Sebuah Perbandingan; Arofatin Maulina Ulfa, 120910101001; 2016: 143 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Skripsi ini membahas kegagalan politik *Post-Islamisme* di Mesir dan keberhasilan *Post-Islamisme* di Turki. Perbedaan yang signifikan dalam melihat keberhasilan politik *Post-Islamisme* adalah cara dari Erdogan di Turki dan Morsi di Mesir dalam merespon peran militer dalam politik. Di Turki, Erdogan melakukan pelemahan secara struktural dan kultural terhadap militer. Secara struktural, Erdogan berhasil mengintervensi militer melalui beberapa perubahan undang-undang. Sedangkan secara kultural, Erdogan berhasil mendekonstruksi anggapan bahwa militer adalah penjaga sekulerisme Turki, sehingga militer semakin kehilangan legitimasi dalam masyarakat. Sementara di Mesir, Morsi terlalu agresif dengan beberapa kebijakan yang terkesan otoriter. Dengan usia kepemimpinan yang masih relatif singkat, Morsi langsung memberlakukan kebijakan yang mengancam eksistensi rezim militer. Padahal, secara *de facto* kekuasaan rezim militer Mesir masih sangat besar baik dalam parlemen maupun dalam masyarakat, sehingga tidak ada jalan lain selain kudeta militer.

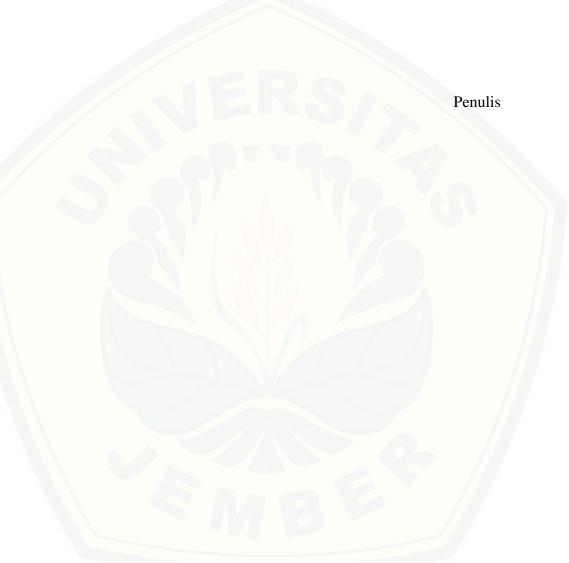
PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan atas segala rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesikan skripsi yang berjudul "Dinamika Gerakan Post-Islamisme Dalam Politik Mesir Dan Turki : Sebuah Perbandingan". Skripsi ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sepenuhnya penulis dapat bekerja sendiri. Penulis tentu saja mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga atas bimbingan, bantuan serta dukungan yang telah diberikan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

- Bapak Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph. D selaku Dosen Pembimbing I, dan bapak Fuat Albayumi, S.IP, MA selaku Dosen Pembimbing II , yang telah meluangkan waktu di antara serangkaian kesibukan untuk membimbing, serta memberikan saran masukkan bagi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
- Bapak dan Ibu dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa,
- Kedua orang tua saya, bapak Kasni dan ibu Herdana Okvarini yang selalu memberikan dukungan baik doa maupun nasehat serta semangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- 4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik serta saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, 30 Mei 2017



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN.	vii
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR SINGKATAN	
Bab I. Pendahuluan	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Ruang Lingkup Pembahasan	12
1.2.1. Batasan Materi	
1.2.2. Batasan Waktu	
1.3.Rumusan Masalah	
1.4.Tujuan Penelitian	
1.5.Kerangka Pemikiran	14
1.5.1. Islamic Revivalism	
1.5.2. Post-Islamisme	17
1.5.3. Islamic Political Movement	23
1.6.Argumen Utama	26
1.7.Metodologi Penelitian	26
1.7.1. Paradigma Penelitian	26
1.7.2. Pendekatan Penelitian	27

-	1.7.3. Sifat Penelitian	29
-	1.7.4. Objek Penelitian	32
	1.7.5. Teknik Pengumpulan Data	33
	1.7.6. Teknik Analisis Data	33
1.8. Sis	stematika Penelitian	34
Bab II. Ko	onteks Sosial, Militer, dan Demokratisasi di Mesir dan Turki	36
2.	1. Kondisi Geografis dan Demografis Mesir dan Turki	36
2.	2. Dinamika Demokratisasi di Mesir dan Turki	38
2.	3. Ekonomi-Politik Mesir dan Turki	48
Bab III. K	Kebangkitan Politik Islam di Mesir dan Turki	58
3.	1. Dinamika Politik Islam di Mesir dan Turki	64
3.	2. Peran Militer dalam Politik di Mesir dan Turki	73
3.	3. Demokratisasi di Timur Tengah Pasca Arab Spring:	
	Konteks Internasional	87
Bab IV. P	olitik Islamisme Menuju Post-Islamisme :	
Transisi d	li Mesir dan Turki	92
4.	1. Revisionis didalam AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) dan Ikhw	anul
	Muslimin	92
4.	2. Langkah Politik AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) dan	
	Ikhwanul Muslimin	.100
4.	3. Kebijakan Ekonomi AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) dan	
	Ikhwanul Muslimin	.116
4.	4. Post-Islamisme sebagai Pilihan Rasional Sistem Ekonomi-Politik	ζ
	di Mesir dan Turki	.125
4.	5. Kegagalan Post-Islamisme di Mesir dan Keberhasilan	
	Post-Islamisme di Turki	.130
Ba	b V. Kesimpulan	.134
Da	ftar Pustaka	.137
Ral	h VI. Lamniran	142

DAFTAR TABEL

	На	alaman
1.1	Konsep Islamisme dan Post-Islamisme	19
1.3	Tipologi Islamic Political Movements	24
2.1	Pelanggaran HAM di Mesir tahun 1993-2009	43
2.2	Indikator Makroekonomi Mesir	50
3.1	Hasil pemilihan Umum di Turki tahun 1987-2002	65
3.2	Presentase Preferensi Terhadap Demokrasi	
	di negara-negara Muslim	88
3.3	Perbandingan Mesir dan Turki	90
4.1	Perbandingan Kondisi Post-Islamisme AKP dan FJP	125

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
1.1	Model Post-Islamisme 1	20
1.2	Model Post-Islamisme 2	21
2.1	Model Post-Islamisme 3	22
3.1	Struktur National Security Council (NSC) Turki setelah	
	Amandemen Tahun 2003	83
4.3	Posisi ideologis AKP dalam sistem demokrasi Turki	127
4.4	Posisi ideologis Ikhwanul Muslimin dalam sistem demokrasi Mo	esir
	128	

DAFTAR GRAFIK

Цa	l۵	m	ω,
на	ıa	m	aп

2.1	GDP Turki Tahun 1965-2015	56
4.1	Kondisi Ekonomi Turki	11
4.2	Kondisi Ekonomi Mesir	12

DAFTAR SINGKATAN

AKP = Adalet ve Kalkınma Partisi

ANAP = Anavatan Partisi

ASU = Arab Socialist Union

CHP = Cumhuriyet Halk Partisi

DSP = Demokratik Sol Parti

DYP = Dogru Yol Partisi

EDSP = Egypt Democratic Sosialist Party

FEP = Free Egyptians Party

FJP = Freedom And Justice Party

HDP = Halkin Demokrasi Partisi

IMF = International Monetary Fund;

MGK = Milli Guvenlik Kurulu

MHP = Milliyetçi Hareket Partisi

MNP = Milli Nizam Partisi

MSP = Milli Selamet Partisi

MUSIAD = Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

NATO = The North Atlantic Treaty Organization

NDP = National Democratic Party

NSC = National Security Council

PKK = Partiya Karkerên Kurdistan

PNUP = Progressive Nationalist Unionist Party

RCC = Revolution Command Council

SPA = Socialist Popular Alliance

TUSIAD = Turkish Industrialists and Businessmen's Association



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di abad 20, muncul fenomena perubahan politik yang terjadi di beberapa negara Islam. Telah terjadi perubahan politik yang dikenal sebagai *Arab Spring*² yang memicu munculnya pembahasan tentang isu Islam Politik dan melahirkan gerakan Islamisme. Islam telah menjadi manifesto politik yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan Islam. Istilah Islamisme pertama kali digunakan di Prancis pada 1970-an dan di Amerika Serikat pada 1980-an. Gerakan ini muncul dan memperkuat basis legitimasi dengan cara membangkitkan ide tradisional bahwa Islam tidak hanya sebagai sistem keyakinan tetapi juga sebagai pengatur dalam sistem organisasi sosial, politik, hukum, ekonomi. Menjadikan Islam sebagai basis ideologi dalam memperjuangkan Negara Islam (*Al-nizham al-Islami*).

Menguatnya Islamisme adalah dampak kepemimpinan otoriter di beberapa negara Muslim. *Arab spring* adalah salah satu gambaran yang menjelaskan bahwa kepemimpinan otoriter di beberapa negara Muslim harus ditumbangkan. Hal ini terjadi karena menguatnya tren demokratisasi di negara-negara Muslim dan memunculkan tren transisi demokrasi yang menuntut penggulingan rezim otoriter di negara-negara muslim.

Ide Islamisme menjadi tawaran alternatif bagaimana gerakan sosial politik harus dikelola. Gerakan Islam di berbagai negara menemui momentum misalnya bangkitnya gerakan Islam di Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan Turki. Di Mesir, Ikhwanul Muslimin menjadi *prototype* gerakan Islam berpengaruh. Di

_

²John Elpostito, Tamara Sonn, dan John O. Voll. 2016. Islam and Democracy After the Arab Spring. Oxford: Oxford University Press. Hal. 237. Elpostito menjelaskan: Arab Spring is a ripple effect from Tunisia leading to widespread democratization not just in the Arab world but in Muslim countries more broadly. Revolusi Tunisia atau yang lebih popular dengan sebutan Jasmine Revolution yang menuntut penurunan presiden Habib Bourguiba and Zine El Abidine Ben Ali yang telah berkuasa di Tunisia sejak tahun 1987 yang berkuasa secara otoriter. Instabilitas sosial ekonomi yang terjadi di Negara ini menjadi penyebab terjadinya revolusi.

Tunisia, Rachid Ghannouchi mendirikan Partai *An-Nahdha* (*Renaisans*) sebagai partai berhaluan Islamis. Begitu juga dengan Omar Ghoul di Aljazair dan aktivisaktivis Islamis di berbagai negara. Di Maroko gerakan Islamis berhasil menempatkan partai mereka sebagai pemenang Pemilu. Di Turki gerakan Islamis kembali meneguhkan eksistensi melalui *Adalet Ve Kalkinma Partisi* (AKP) setelah beberapa waktu sempat dilarang.³

Pasca *Arab Spring*, Islamisme harus berhadapan dengan munculnya gelombang demokratisasi. Rezim Demokrasi secara substansi-ideologi meyakini doktrin kedaulatan rakyat, mengedepankan eksistensi hak-hak individu, kebebasan, dan kesetaraan. Secara prosedural, demokrasi harus dijalankan menggunakan prinsip suara mayoritas dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan politik. Hal ini bertentangan dengan doktrin Islamisme yang menggunakan nilai-nilai Islam dalam penerapanya.

Studi mengenai Islam dan demokrasi mengalami perdebatan di kalangan para ilmuwan sosial. Islamisme dianggap telah memainkan dan memanipulasi demokrasi⁴, sehingga memunculkan perdebatan ketidaksesuaian Islam dan demokrasi. Menurut Greg Fealy, terdapat tiga alasan mendasar mengapa Islam tidak sesuai dengan demokrasi. *Pertama*, secara ideologis susah untuk menjembatani Islamisme yang menggunakan hukum agama sebagai pijakan (*syariah*) dengan demokrasi yang mengusung kedaulatan rakyat. Islamis meyakini bahwa kebenaran hukum hanya terdapat dalam teks agama (kitab suci), sehingga dalam praktek terlalu dijejali persyaratan. *Kedua*, penekanan Islamisme kepada syariah berpotensi dipermasalahkan ketika dihadapkan pada pertanyaan praktis

³ Ahmad Rizky Mardhatillah Umar. 2015. *Melacak Asal-Usul Islamisme: Sebuah Pembacaan Kritis*. Diakses dari http://indoprogress.com/2015/01/melacak-asal-usul-Islamisme-sebuah-pembacaan-kritis [20 Maret 2015]

⁴ Bassam Tibi. 2009. Islamisme and Democracy: On the Compatibility of Institutional Islamisme and the Political Culture of Democracy. *Journal of Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 10, No. 2, 135–164, June 2009. Hal. 144*

tentang implementasi dan institusi. *Ketiga*, kesulitan menyelaraskan Islam dan demokrasi dipengaruhi oleh potensi hegemoni dalam gerakan Islam arus utama.⁵

Dalam merespon benturan dengan demokrasi, beberapa gerakan Islamis di negara-negara muslim telah mengalami pergeseran sikap politik yang ditandai dengan kecenderungan yang kompromistik dengan realitas politik. Adanya proses adaptasi mendorong beberapa gerakan Islamis menjadi kekuatan alternatif bagi permasalahan demokratisasi di negara-negara muslim. Penstudi Islam di barat menyebutnya dengan Post-Islamisme sebagai sintesis antara Islamisme dan demokrasi. Menurut Asef Bayat, Post-Islamisme adalah bergesernya cara pandang terhadap Islam politik menuju lebih kompromistik dengan nilai-nilai demokrasi. Kecenderungan gerakan politik Post-Islamisme adalah lebih pragmatis dan realistis, serta bersedia untuk kompromi dengan realitas politik yang tak sepenuhnya ideal dan sesuai dengan skema ideologis murni Islamis yakni pendirian negara Islam dan penegakan syariah (hukum agama). Sedangkan Oliver Roy berpendapat bahwa Post-Islamisme merefleksikan kegagalan konseptual dan praktik Islamisme yang berusaha meng-Islamkan negara dan menyatukan agama dengan politik. Secara general, Post-Islamisme dapat diartikan sebagai wajah baru manifesto politik Islam untuk mengubah Islam selaras dengan demokrasi.⁶

Relevansi identitas *Post-Islamisme* sebagai wajah lain dari perjuangan Islam politik menghadapi proses transformasi. Penting untuk menganalisa ulang asumsi-asumsi teoretik yang ada. Banyak kasus yang menjelaskan *Post-Islamisme* di beberapa negara muslim. Penelitian ini berupaya melakukan analisis mendalam terhadap munculnya wacana *Post-Islamisme* di negara-negara muslim dan dampak-dampak politik yang ditimbulkan.

Pembentukan identitas *Post-Islamisme* diidentifikasi melalui proses institusionalisme Islam yakni dengan keikutsertaan Islamis dalam lembaga

⁵Anthony Bubalo, Greg Frealy dan Whit Mason. 2012. *PKS & Kembarannya: Bergiat Menjadi Demokrat Di Indonesia, Mesir, & Turki*. Jakarta: Komunitas Bambu. Hal. 8-10

⁶ Asef Bayat. Op. Cit. Hal. 19

demokratis dan ikut serta dalam proses merebut kekuasaan⁷. Mulai dari gerakan reformasi di Iran pada akhir 1990an di bawah seorang *mullah* dan juga seorang intelektual, Muhammad Khatami, hingga munculnya partai-partai politik tengah di abad 20. Seperti yang terjadi di Mesir dengan munculnya *Freedom and Justice Party* (FJP), *Adalet Ve Kalkinma Partisi* (AKP) di Turki, Partai *Ennahda* di Tunisia, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia, ⁸

Penelitian ini berfokus pada upaya untuk membandingkan dinamika *Post-Islamisme* dalam konstelasi politik di Mesir dan Turki. Pemilihan kedua negara ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yakni: Mesir dan Turki adalah negara yang menganut demokrasi sekuler dengan prosentase penduduk muslim yang dominan. Secara kultur Islam telah menjadi identitas yang tak terpisahkan dalam sistem sosial masyarakat. Islam juga berpengaruh dalam perkembangan dinamika politik Mesir dan Turki. Mesir memiliki penduduk muslim hingga 80 juta jiwa. Hal ini menyebabkan Mesir menjadi penyumbang 4,9 % dari populasi Muslim dunia. Dan total memiliki 94,7 % warga Muslim. Sedangkan Turki memiliki prosentase penduduk muslim 98,6 % dari jumlah penduduknya. 76 juta Turki adalah Muslim, sehingga menyumbang 4,6 % dari total penduduk Muslim dunia. 9

Gerakan-gerakan Islam politik di Mesir dan Turki juga menjadi *prototype* berpengaruh bagi negara-negara Muslim. Di Mesir, Ikhwanul Muslimin adalah gerakan Islamis yang tidak hanya memiliki misi syiar agama tetapi juga ikutserta dalam dinamika politik pemerintahan. Pada tahun 1953, Ikhwanul Muslimin mengalami isolasi politik yang diterapkan oleh rezim pemerintahan Gamal Abdul Nasser. Hal ini disebabkan Ikhwanul Muslimin dituduh mencoba membangun kekuatan dalam tubuh militer. Nasser mengeluarkan peringatan kepada Ikhwanul Muslimin untuk menghentikan upaya merekrut anggota dari kalangan tentara dan

-

⁷ Bassam Tibi. *Op. Cit.* Hal. 137

⁸ Ulil Abshar Abdala. 2011. *Revolusi Post-Islamisme di Dunia Islam*. Jakarta : Forum Lentera Filsafat FIB Universitas Indonesia

⁹ Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life. 2009. *Mapping the Global Muslim Population*. Diakses dari di http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/#map2 [30 Maret 2016]

polisi. Nasser juga menuntut agar Ikhwanul Muslimin membubarkan cabang yang terdapat di tubuh militer dan pasukan keamanan. Karena Ikhwanul Muslimin tidak patuh terhadap tuntutan rezim, sehingga diputuskan membubarkan Ikhwanul Muslimin pada bulan Januari 1954. Nasser bertindak keras dengan menghancurkan struktur dan organisasi Ikhwanul Muslimin. Lebih dari 4.000 anggota Ikhwanul Muslimin ditahan. Kekuatan Ikhwanul Muslimin di Mesir terkikis dengan sejumlah besar anggotanya ditahan dan dieksekusi mati. Setelah tahun 1954 Ikhwanul Muslimin menghentikan kegiatan terbuka di Mesir dan kehilangan kekuatannya sebagai pusat gerakan Islam di Timur Tengah¹⁰.

Pada 1970-an ribuan anggota Ikhwanul Muslimin dibebaskan dari penjara. Para tahanan Ikwanul Muslimin yang berada di pengasingan diizinkan kembali ke Mesir dan diizinkan untuk memulai kembali kegiatannya, sehingga Ikhwanul Muslimin bangkit dengan dua tujuan penting. *Pertama*, untuk mengamankan status hukum dari pemerintah Mesir yang telah di kebiri sejak tahun 1954. *Kedua*, untuk membangun kembali organisasi yang telah dihancurkan oleh Nasser¹¹, sehingga Ikhwanul Muslimin menyadari bahwa harus ada perubahan dan pergeseran dalam gerakan yang terfokus pada kesalehan spiritual untuk aktivisme politik. Transisi ini menunjukkan perubahan dalam bentuk dan karakter gerakan, yang memungkinkan Ikhwanul Muslimin menjadi aktor politik penting di Mesir. Sehingga Ikhwanul Muslimin akhirnya memiliki kesempatan untuk tampil di pentas demokrasi dengan membentuk *Hizb al-Hurriyah wa al-'Adalah* atau *Freedom and Justice Party* (FJP) pada tahun 2011.¹²

Tampilnya Ikhwanul Muslimin dalam pentas demokrasi dianggap sebagai bergesernya sikap politik Ikhwanul Muslimin menjadi *Post-Islamis*. Pada awalnya, Ikhwanul Muslimin harus kembali berhadapan dengan rezim otoriter Husni Mubarak dengan diberlakukanya aturan konstitusi pemilu yang

12 *Ibid*. Hal. 91

¹⁰ Mohammed Zahid. 2010. *The Muslim Brotherhood and Egypt's Succession Crisis : The Politics of Liberalisation and Reform in the Middle East*. London : Tauris Academic Studies. Hal. 79-80

¹¹ Ibid. Hal. 89

memberatkan. FJP harus memenuhi kuota 8 % dalam perwakilan Majelis Rakyat. Untuk bersaing dalam pemilu, Ikhwanul Muslimin kemudian membangun koalisi dengan partai sekuler. Meskipun harus menghadapi kontrol otokratis dari pemerintah yang cenderung koersif, koalisi yang akan dibangun memungkinkan Ikhwanul Muslimin untuk mengembangkan platform politik yang ditandai dengan bergesernya ideologi politik. Sehingga hal ini merupakan langkah awal yang dilakukan Ikhwanul Muslimin dalam membangun kekuatan politik untuk menantang kekuasaan otoriter yang menjadi cirri khas pemerintahan Mesir

Di Turki pada 1960-an, gerakan Islamis lahir dari *Milli Gorus Hareketi* (gerakan pandangan nasional) yang digagas oleh tokoh bernama Necmettin Erbakan. Semangat Islamisme berangkat dari fenomena kemunduran dunia muslim dengan kurangnya komitmen untuk menjalankan ajaran Islam sebagai sikap, institusi, dan nilai-nilai dalam kehidupan. *Milli Gorus Hareketi* memunculkan partai Refah sebagai salah satu induk partai Islamis yang menggunakan norma-norma Islam. Eksistensi partai Refah mendapat tantangan dari kaum sekuleris serta militer. Pada 1998 partai Refah dibubarkan karena upayanya dalam kegiatan-kegiatan antisekuler dan memberikan sanksi politik terhadap Erbakan selama 5 tahun. Namun sisa Islamisme partai Refah masih ada dalam dinamika politik Turki. Pada 2001, AKP (*Adalet Ve Kalkinma Partisi*) muncul sebagai terusan dari perjuangan partai Refah yang dipimpin oleh Abdullah Gul dan Reccep Tayip Erdogan.

Belajar dari kegagalan di masa lalu, AKP juga terus mengembangkan platform politiknya kearah yang lebih inklusif. Meskipun memiliki akar Islamis yang kuat, dalam urusan pemilu AKP lebih melakukan penyesuaian dengan kondisi politik Turki. Hingga akhirnya AKP lebih dikenal sebagai partai berhaluan Post-Islamis. Kemunculan AKP sebagai partai Post-Islamis adalah hasil dari titik temu empat faktor. Pertama, bubarnya partai Refah menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda kaum Islamis untuk lebih memperhatikan arah gerakan dan citra politik dengan mengusung ideologi Islamis. Kedua, tekanan

¹³ Ibid. Hal. 97-98

7

dari para sekuleris dan militer. *Ketiga*, perubahan demografis Turki memunculkan konstituen baru dan meminta AKP mengawinkan konservatisme budaya dan pragmatisme ekonomi-politik. *Keempat*, harapan untuk masuk ke Uni Eropa dianggap mampu untuk diwujudkan AKP.¹⁴

Tampilnya Muhammad Morsi sebagai pemenang pemilu di Mesir semakin menguatkan posisi Ikhwanul Muslimin pada periode 2011 hingga 2013. Pemilu Februari 2011 yang digelar pertama kali di Mesir dimenangkan oleh Partai FJP melalui kemenangan 70% kursi di parlemen. Dan pemilu secara demokratis pertama kali dimenangkan oleh Muhammad Morsi sebagai calon dari FJP yang mengalahkan Ahmed Shafiq dengan perolehan 51% suara. 15 Sedangkan di Turki, Partai AKP berhasil melanggengkan kekuasaan sejak mengikuti pemilu di Turki pada 2002. Pasca Rezim sekuler Turki mengalami penurunan popularitas, AKP tampil sebagai jawaban atas perubahan politik yang lebih luas. Momentum pemilu 2002 merupakan kesempatan besar bagi partai AKP untuk merestrukturisasi lanskap politik dan memperluas pengaruhnya di ruang publik. Kemenangan pemilu memberikan partai AKP mayoritas kursi dan hak untuk membentuk pemerintahan sendiri. Di antara 18 partai yang bersaing untuk kursi di Parlemen, hanya dua partai yang memenangkan kursi. Partai AKP memenangkan 34,26 % suara atau 363 kursi dari jumlah 550 kursi di parlemen. Sedangkan Partai CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) mendapatkan 19,40 % suara dan 178 kursi. Hasil pemilu tersebut merupakan bentuk kepercayaan publik terhadap perubahan yang terjadi di Turki. Kemenangan AKP juga dianggap sebagai restorasi sebuah gerakan Islam yang dipaksa dikebiri sejak tahun 1997. Dengan demikian pemilihan umum secara signifikan mengubah pendirian politik dan membawa AKP berkuasa dengan mandat yang jelas untuk mendefinisikan kembali kekuasaan politik. 16

_

¹⁴ Anthony Bubalo, Greg Frealy dan Whit Mason. Op. Cit. Hal. 77-78

¹⁵BBC. 2013. *Profile: Egypt's Muslim Brotherhood*. Diakses dari http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12313405 [30 Maret 2016]

¹⁶.M. Hakan yavuz. 2003. *Islamic Political Identity in Turkey*. New York: Oxford University Press. Hal. 256

Konsistensi sikap *Post-Islamis* kedua partai (FJP dan AKP) diuji di tengah semakin kuatnya kekuasaan yang telah diraih. Pasca kemenangan pemilu, Ikhwanul Muslimin naik ke tampuk kepemimpinan namun memperlihatkan masa depan demokrasi radikal.¹⁷ Pasca Morsi naik sebagai presiden, ada upaya untuk mempertahankan status quo kekuasaan. Morsi menerapkan kebijakan untuk konstitusi baru, yang disusun oleh Morsi bersama Ikhwanul Muslimin dan kelompok Islam konservatif yakni kelompok Salafi yang semakin menguatkan peran Islam. Konstitusi 2012 menetapkan Islam sebagai agama resmi di Mesir dan Hukum Islam, atau syariah, sebagai sumber utama legislasi. Konstitusi 2012 untuk pertama kalinya mendefiniskan syariah. Dokumen tersebut menetapkan prinsip-prinsip syariah termasuk bukti, peraturan, yurisprudensi dan sumbersumber yang diterima oleh Islam Sunni, sekte Islam mayoritas di Mesir. Dokumen baru juga memberikan wewenang kepada Al-Azhar, institusi pendidikan beraliran Islam Sunni, dengan menyatakan bahwa semua hal berkaitan syariah harus dikonsultasikan pada para akademi di sekolah tersebut¹⁸. Hal ini dipandang sebagai kebijakan yang tidak demokratis. Isu menguat bahwa Morsi telah mengalami kecenderungan menjadi terlalu Islamis. Dalam pemberitaan The Guardian dilaporkan bahwa perombakan konstitusi memungkinkan ulama untuk mengintervensi proses pembuatan undang-undang. 19 Selain itu, Morsi juga melakukan Ikhwanisasi (nepotisme) parlemen. Dalam sebulan, Morsi menunjuk anggota Ikhwanul Muslimin untuk menjabat di berbagai lembaga negara. Setidaknya ada 5 kader Ikhwanul Muslimin dijadikan pejabat di berbagai

¹⁷Khalil Magdi. 2006. *Egypt's Muslim Brotherhood and Political Power: Would Democracy Survive?*. Diakses dari http://www.rubincenter.org/2006/03/khalil-2006-03-03/[3 Maret 2016]

¹⁸ Michael Lipin, *Konstitusi Baru Mesir: Perbedaannya dengan Versi Lama*. Diakses dari http://www.voaindonesia.com/a/konstitusi-baru-mesir-perbedaannya-dengan-versi-lama/1572237.html [30 Maret 2016]

Peter Beaumont. 2012. Mohamed Morsi Signs Egypt's New Constitution Into Law. Diakses dari http://www.theguardian.com/world/2012/dec/26/mohamed-morsi-egypt-constitution-law [30 Maret 2016]

departemen, 8 di kantor kepresidenan, 7 jadi gubernur, 12 jadi asisten gubernur, 13 di kantor gubernur, dan 12 sebagai walikota.²⁰

Kebijakan kontroversial yang dibuat Morsi juga terkait wacana amandemen Undang-Undang Mesir. Parlemen mengusulkan rancangan Undang-Undang Isolasi Politik. Undang-Undang Isolasi Politik ini harus dilaksanakan oleh lembaga peradilan tertinggi di Mesir. Undang-Undang Isolasi Politik ini berisi tentang larangan bagi status quo, khususnya para petinggi dan pimpinan Partai Nasional Demokrat (NDP) dan orang-orang yang berafiliasai dengan Partai Demokrat tidak dibolehkan kembali memimpin Mesir, termasuk menduduki posisi Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Menteri, Gubernur, selama 10 tahun, terhitung sejak 11 Februari 2011. Adapun inisiator dari ide isolasi politik ini adalah mayoritas anggota Majelis al nuwab (DPR) yang pada waktu itu didominasi oleh fraksi partai Islamis termasuk anggota FJP. Pada tanggal 22 November 2012, Morsi juga mengeluarkan dekrit konstitusi yang mengatur dan membatasi peran Majelis Tinggi Parlemen. Morsi dinilai berusaha mengontrol peradilan dengan memecat jaksa Abdel Meguid Mahmoud. Morsi juga memecat Jenderal Mohammed Tantawy yang pernah menjabat sebagai menteri pertahanan semasa Hosni Mubarak memimpin Mesir.²¹

Sementara di Turki, Erdogan mewujudkan sikap politik *post-Islamisme* melalui berbagai kebijakan populis. Karakter AKP yang akomodatif terhadap demokrasi dan penonjolan identitas kanan tengah yang aspiratif terhadap kepentingan Muslim menyebabkan AKP mampu mempertahankan dukungan dari basis pemilih konservatif, tetapi juga memperoleh kepercayaan dari spektrum yang lebih luas. Namun, dibandingkan dengan partai-partai yang menjadi kompetitornya, AKP dipandang lebih menjanjikan. Perbedaan lain yang menonjol adalah pilihan politik luar negeri AKP, yang berbeda. dengan pendahulunya.

_

²⁰ Eko Huda Setiawan. 2013. *10 Dosa Penyebab Morsi Digulingkan Militer Mesir*. Diakses dari http://news.liputan6.com/read/631367/10-dosa-penyebab-morsi-digulingkan-militer-mesir?page=4 [3 Maret 2016]

²¹Kompas. 2012. Konstituante Mesir Terbentuk. Diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2012/06/14/04105877/konstituante.mesir.terbentuk [3 Maret 2016]

Dengan modalitas ini, para aktivis AKP terutama sayap pemuda dan perempuannya proaktif mendekati konstituen secara tatap muka, AKP juga memiliki mengoptimalkan Pusat Komunikasi AK (AK Parti Iletipim Merkezi, AKIM) yang terdapat di markas pusat, maupun di setiap provinsi, dimana semua warga diterima secara terbuka untuk mendiskusikan berbagai permasalahan, keluhan, dan kebutuhan mereka dengan anggota partai. ²²

Dalam konteks Turki, pada 2013 Erdogan berupaya mengubah system pemerintahan dari sistem parlemen menuju sistem presidensial. Hal tersebut berimplikasi pada semakin kuatnya posisi kepala pemerintahan. Erdogan juga menyingkirkan senior-senior partai yang bersama-sama telah membesarkan AKP yakni Abdullah Gul. Erdogan mengganti kader-kader lama partai dengan kader-kader baru yang muda dan loyal kepadanya. Termasuk ketika pada 2014 lalu, Erdogan menunjuk Ahmat Davutoglu sebagai Perdana Menteri dan ketua AKP²³. Tuduhan-tuduhan lain yang dianggap sebagai kesewenang-wenangan Erdogan antara lain cap otoriter ketika ia memberangus para demonstran dalam tragedi Gezi Park pada 2013 lalu.²⁴ Tidak hanya berhenti pada kebijakan menyikapi demonstran dan dinamika internal partai, Erdogan juga membuat kebijakan yang sewenang-wenang terkait media social. Sepekan sebelum pemilu lokal serentak di Turki, pemerintah Turki memblokir dua media sosial yaitu Twitter dan Youtube.²⁵ Penutupan ini disebabkan karena tersebar rekaman suara skandal korupsi yang melibatkan Erdogan dan anaknya.²⁶

12

²² M Alfan Alfian. 2015. *Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di Turki*. Diakses dari http://www.akbartandjunginstitute.org/read/me/74175/fenomena-recep-tayyip-erdogan-dan-kepolitikan-akp-di-turki [13 Oktober 2016] Hal. 98

²³ Nick Tattersall. 2013. *Erdogan's Ambition Weighs on Hopes for New Turkish Constitution*. Diakses dari http://www.reuters.com/article/us-turkey-constitution-idUSBRE91H0C220130218 [3 Maret 2016]

²⁴ Anonim. Tanpa Tahun. *Orhan Pamuk Says Erdoğan's Government Authoritarian*. Diakses dari http://www.todayszaman.com/latest-news_orhan-pamuk-says-erdogans-government-authoritarian_317450.html [3 Maret 2016]

²⁵ Raziye Akkoc. 2015. *Turkey Blocks Access to Social Media and YouTube Over Hostage Photos*. Diakses dari http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/11518004/Turkey-blocks-access-to-Facebook-Twitter-and-YouTube.html [3 Maret 2016]

Bonnie Malkin. 2014. *Turkey PM Says Incriminating Tapes are Fake Amid Growing Phone-Tapping Scandal.* Diakses dari http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/10659567/Turkey-PM-says-incriminating-tapes-are-fake-amid-growing-phone-tapping-scandal.html [12 Februari 2016]

Dalam konteks kebijakan luar negeri, terjadi perubahan politik luar negeri Mesir dibawah pemerintahan Morsi. Salah satunya kebijakan luar negeri terhadap Israel. Kemenangan Ikhwanul Muslimin semakin menguatkan sentimen anti Israel dan cenderung pro-Palestina. Presiden Morsi menerapkan kebijakan tidak mendukung pendudukan Israel di Palestina. Hal ini menegaskan bahwa Mesir bukan lagi alat legitimasi bagi Israel dan Amerika Serikat. Ikhwanul Muslimin melalui Presiden Morsi mulai memfokuskan perhatian pada pembentukan negara Palestina dan restrukturisasi Hamas. Mesir akan membantu segala persiapan dan rekonsiliasi faksi-faksi di Palestina. Walaupun Dewan Militer Mesir tidak setuju dengan tindakan ini seperti juga Amerika Serikat, presiden Morsi tetap menerapkan kebijakan melawan pendudukan Israel di Palestina. Presiden Morsi juga menginisiasi sikap antipati terhadap Israel dan Amerika Serikat dengan mempropagandakan kekerasan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat terhadap rakyat Palestina.

Dalam konteks Turki, kebijakan luar negeri dibawah Erdogan juga menunjukkan sikap sentiment anti Israel dan menyatakan dukungan terhadap Palestina. Khususnya bagi penduduk Gaza dan sangat menunjukkan dukungan terhadap Hamas. Sentimen terhadap Israel menguat setelah pada tanggal 31 Mei 2010, terjadi insiden *Gaza Flotilla Raid* yakni serangan operasi militer Israel terhadap enam kapal sipil dari "Gaza Freedom Flotilla" di perairan internasional Laut Mediterania. Serangan tersebut menewaskan sembilan aktivis. Sembilan orang tersebut merupakan sekumpulan aktivis yang tergabung dalam Gerakan *Free Gaza* dan Yayasan Turki untuk Hak Asasi Manusia dan Kebebasan dan Bantuan Kemanusiaan (IHH) yang membawa misi bantuan kemanusiaan dan bahan bangunan untuk Jalur Gaza.²⁸. Insiden tersebut semakin memaksa Turki untuk melakukan tidakan kebijakan politk luar negeri dengan menarik duta besarnya untuk Israel, membatalkan latihan militer bersama, dan mengadakan

²⁷ Fahadayna Adhi Cahya. 2012. *Pengaruh Ikhwanul Muslimin Terhadap Politik Luar Negeri Mesir dalam Konflik Israel-Palestina*. Surabaya: Universitas Airlangga

²⁸ Dan Williams dan Jonathan Saul. 2010. *Israel Eyes Impound of Ships Breaking Gaza Blockade*. Diakses dari http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE6871IG20100908?sp=true [30 Maret 2016]

pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. Erdogan mennyatakan bahwa yang dilakukan Israel adalah "pembantaian berdarah" dan "terorisme negara", dan mengecam keras Israel dalam pidato di hadapan Majelis Agung Nasional²⁹

Penjelasan kronologi beserta data yang ada di atas dijadikan penulis sebagai landasan dalam melakukan penelitian ini. Kronologi diatas menjadi alasan untuk melakukan peneilitian dengan judul : "DINAMIKA GERAKAN POST-ISLAMISME DALAM POLITIK MESIR DAN TURKI : SEBUAH PERBANDINGAN"

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian ilmiah, penting untuk membatasi ruang lingkup. Ruang lingkup akan menentukan cakupan yang akan berpengaruh terhadap penentuan macam-macam variabel, serta konsep dan teori yang akan menentukan *level of analysis*. Studi perbandingan politik menawarkan ruang lingkup pembahasan yang cukup luas. Terlebih perbandingan yang melibatkan dua Negara. Dalam penelitian ini, penulis memilih fokus pada perbandingan politik dan bagaimana *Post-Islamisme* beroperasi dalam tatanan politik di Mesir dan Turki.

1.2.1 Batasan Materi

Dalam penelitian ini, batasan materi dimulai dari sejarah, pemerintahan, politik-sosial dan perekonomian di Turki dan Mesir. Selanjutnya akan dipaparkan identifikasi terhadap partai yang berhaluan Islamis dan menjadi *Post-Islamis*. Penulis juga akan membahas bagaimana kajian tentang sistem kepartaian dan sistem pemilu serta kajian terhadap lingkungan politik seperti pengaruh sekulerisme yang terjadi di dua negara dan pengaruh kelompok- kelompok kepentingan seperti peran Militer di kedua negara. Beberapa analisis kebijakan-kebijakan politik domestik dan luar negeri menjadi materi penting dalam penelitian ini.

²⁹ Ajeng Ritzki. 2011. *Turki Menurunkan Status Hubungan Diplomatik Dengan Israel*. Diakses dari http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/03/lqxd0r-turki-turunkan-tingkat-hubungan-diplomatik-dengan-israel. [19 Maret 201]

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu penelitian ini dimulai sejak terjadinya gejolak politik *Arab Spring*. Yakni pada rentang tahun 2010 hinggga 2015. Di Mesir, penulis memulai batasan waktu sejak terlibatnya Ikhwanul Muslimin dalam penurunan Husni Mubarak hingga proses demokrasi *electoral* terpilihnya presiden Muhammad Morsi pada 2011 hingga peristiwa tergulingnya Morsi pada 2013 akibat kudeta militer. Di Turki, penulis membatasi waktu penelitian mulai dari terpilihnya kembali Recep Tayyip Erdogan pada 2012 sebagai Perdana Menteri melalui AKP hingga 2014.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah di uraikan di atas, rumusan masalah yang dapat diangkat adalah : Mengapa *Post-Islamisme* gagal di Mesir dan berhasil di Turki?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ilmiah idealnya memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menggali kajian baru serta berusaha untuk membaca secara akademik isu-isu internasional, sehingga penelitian ini mampu mewarnai khazanah pengetahuan ilmu politik dan ilmu hubungan internasional. Selayaknya penelitian berbasis pada epistimologi positivis lainya, penelitian ini adalah upaya untuk menjawab rumusan masalah dengan mencari fakta-fakta melalui data dalam menentukan posisi argumen. Tujuan penelitian ini secara spesifik adalah:

- Menganalisis transisi gerakan Islamisme menuju Post-Islamisme yang terjadi di Mesir dan Turki
- Menguji relevansi Post-Islamisme dalam fenomena hubungan internasional kontemporer
- 3. Memperbandingkan konstelasi dinamika *Post-Islamisme* dalam sistem politik di Mesir dan Turki

1.5 Kerangka Pemikiran

Studi Islam dalam hubungan internasional menjadi isu yang debatable bagi para penstudinya. Hal ini disebabkan oleh kemapanan teori yang juga masih diperdebatkan serta rumitnya relasi agama dan politik yang rentan memunculkan sudut pandang bias dalam penelitian. Dalam perkembangan keilmuan hubungan internasional, korelasi antara isu gerakan Islam dan basis teori yang mampu menjelaskan fenomena tersebut masih sangat banyak dipengaruhi oleh paradigmaparadigma dalam ilmu politik maupun sosiologi. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengkontekstualkan kerangka konsep mengenai Islam dalam hubungan internasional melalui perpaduan analisis gerakan sosial dan ilmu politik. *Islamic Revivalism, Islamic Political Movements* dan *Post-Islamisme* sebagai konsep akan digunakan peneliti untuk menjelaskan perubahan sikap politik gerakan Islamisme di Mesir dan Turki.

1.5.1 Islamic Revivalism

Kebangkitan Islam adalah konsep yang mengacu pada gerakan yang menekankan peningkatan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan sosial-politik. Gerakan kebangkitan Islam adalah respon terhadap kemunculan budaya Barat dan konsep sekularisme. Wacana kembali kepada Islam adalah sebagai solusi untuk penyakit masyarakat Islam dan masyarakat modern secara keseluruhan. Dalam perkembangan abad kedua puluh, ide kebangkitan Islam diasosiasikan sebagai bentuk 'fundamentalisme Islam', atau Islam radikal.³⁰.

Gerakan kebangkitan Islam mengacu pada semangat gerakan yang disebut sebagai *Tajdid* dan *Islah*. *Tajdid* adalah "pembaruan" (*renewal*) dan *islah* adalah "reformasi" (*reform*). Kedua istilah tersebut merefleksikan revitalisasi keyakinan dan praktek-praktek Islam dalam masyarakat-masyarakat Muslim yang dianggap telah mengalami penyimpangan-penyimpangan. Tokoh-tokoh Islam yang

³⁰Anonym. 2013. *Islamic Modernism and Islamic Revival*. Diakses dari http://www.oxfordIslamicstudies.com/article/opr/t253/e9 [20 Maret 2016]

berpengaruh dalam gerakan kebangkitan Islam misalnya adalah Ibnu Taimiyyah, Abdullah bin Abdul Wahhab, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Abu A'la Al-Maududi, Sayyid Qutb. *Tajdid* dan *islah* menyediakan basis keyakinan bahwa gerakan-gerakan pembaruan adalah bagian yang otentik dari fungsi kewahyuan dalam sejarah Islam. Di sisi lain, kedua istilah itu adalah saluran bagi dinamika internal pembaruan pemikiran Islam dan secara terus-menerus menjadikan Islam relevan dengan perubahan zaman. John Voll berpendapat:

"At its core, the broad tradition of renewal-reform represents the individual and communal effort to define Islam clearly and explicitly in terms of God's revelation (as recorded in the Qur'an) and the customs or Sunna of the Prophet Muhammad (as recorded in the hadith which describes his reportedsayings and actions). In changing circumstances and with different implications, islah and tajdid have always involved a call for return to the basic fundamentals of Islam as presented in the Qur'an and Sunna of the Prophet". 31

Konsep *tajdid* dan *islah* inilah yang telah menjadi basis teologis semua gerakan pembaruan atau reformasi Islam sejak abad ke 19 seperti gerakan *Tanzimat* di Turki, *Wahabiyyah* di Arab Saudi, *Jama'ah al-Islamiyyah* di Pakistan atau *Ikhawnul Muslimin* di Mesir.

Muhammad Jindar Tamimi mengatakan bahwa *tajdid* terbagi dua karena sasarannya, yaitu: Pertama, Berarti pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada keaslian dan kemurniannya, ialah bila tajdid sasarannya mengenai soalsoal prinsip perjuangan yang sifatnya tetap atau tidak berubah-ubah. Kedua, Berarti pembaharuan dalam arti modernisasi jika sasarannya mengenai masalah, seperti metode, sistem, teknik, dan strategi perjuangan yang sifatnya berubah-ubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi . *Tajdid* menurut Yusuf Abdullah Puar adalah kembali pada ajaran Islam yang asli murni, seperti yang diwahyukan Allah. SWT (al Qur'an) dan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW serta yang dikerjakan oleh para sahabat dan ulama salaf yang sesuai dengan ajaran al Qur'an dan al Hadits, dengan mempergunakan akal pikiran dan dengan penyelidikan yang cermat tidak bertaqlid ikut-ikutan. Sedangkan menurut Qurays Shihab, *tajdid*

³¹ John O. Voll. *Renewal and Reform in Islamic History: Tajdid and Islah*' dalam John L. Esposito (Ed.). 1983. *Voices of Resurgent Islam*. New York: Oxford University Press. Hal. 32.

yaitu usaha reaktualisasi ajaran karena perjalanan sejarah boleh jadi menjadikan sebagian orang melupakan atau menyalahpahami ajaran agama.

Syeikh Taqiyyudin An-Nabhani menggunakan istilah *nahdhoh* atau kebangkitan. Kata *nahdhoh* berasal dari bahasa Arab *nahadho-yanhadhu-nahdhon* diartikan bangkit dari sebuah tempat. Makna kata tersebut secara etimologis berbeda dengan makna secara terminologis. Makna *nahdhoh* menurut Syeikh Taqiyyudin An-Nabhani adalah manakala manusia mampu menjawab tiga pertanyaan pokok kehidupan, yaitu ada apa sebelum kehidupan ini, untuk apa kehidupan ini, dan hendak kemana manusia setelah kehidupan ini. Jawaban dari ketiganyanya adalah ada Tuhan di kehidupan sebelumnya yang Maha Mengadakan segala, ada aturan dan petunjuk yang ditetapkan Tuhan untuk manusia agar dapat memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan, serta akan ada hari perhitungan setelah kehidupan ini berakhir. Ketiga jawaban dari persoalanpersoalan ini akan menjadi landasan hidup manusia. Pemikiran cemerlang adalah kunci untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut.

Meskipun tidak sama persis maknanya, namun antara *islah*, *tajdid*, maupun *nahdhoh* memiliki semagat dasar yang sama yakni seruan kembali kepada penerapan ketat al qur'an dan as sunnah, penegasan akan hak untuk mengadakan analisa yang mandiri (ijtihad) tentang al Qur'an dan sunnah, ketimbang harus bersandar dan meniru pendapat dari generasi para tokoh terdahulu yang berpebgetahuan tinggi tentang Islam (yang disebut taqlid), dan penegasan kembali keaslian dan keunikan pengamalan al Qur'an, yang berbeda dengan cara-cara sintesa dan keterbukaan pada tradisi Islam lainnya.

Kebangkitan Islam juga diartikan sebagai kembalinya Islam dalam politik yang identik dengan perebutan kekuasaan dan penetapan standart ideal mengenai pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Gerakan kebangkitan Islam populer dengan istilah gerakan Islamisme. Terdapat beberapa pendapat tentang konsep Islamisme. James Piscatori mendefinisikan Islamis (aktor gerakan Islamisme) sebagai Muslim yang berkomitmen terhadap aksi publik untuk mewujudkan agenda Islam.

Donald Emmerson merevisinya dengan mengatakan bahwa Islamisme adalah komitmen terhadap, dan isi dari agenda itu.³² Sedangkan Graham Fuller mendefinisikan Islamisme sebagai tawaran bagaimana politik dan masyarakat harus dikelola dalam dunia Muslim kontemporer dan ingin mewujudkannya dalam berbagai cara.³³ Sementara itu, Oliver Roy mengartikan Islamisme sebagai aktivitas kelompok-kelompok yang meyakini Islam sebagai agama dan sekaligus sebagai ideologi politik yang populer dengan istilah *neo-fundamentalisme.*³⁴ Menurut Asef Bayat, Islamisme muncul sebagai bahasa penegasan diri untuk memobilisasi masyarakat yang telah termarginalkan oleh proses-proses ekonomi, politik, atau budaya dominan dalam masyarakat. Beberapa kelompok Islam merasa kapitalisme maupun sosialisme yang tidak menguntungkan dan kemudian menciptakan bahasa moralitas melalui agama dan menginginkan pergantian sistem politik dengan mengacu pada hukum-hukum agama.³⁵

1.5.2 Post-Islamisme

Munculnya post-Islamisme adalah tanggapan dari adanya dua posisi ideologis yang ekstrim yakni demokrasi dan Islamisme. Esposito dan Voll mengklaim bahwa Islamisasi dan demokratisasi memengaruhi perkembangan politik dunia Arab dan Muslim. Oleh karena itu, gerakan politik Islam moderat lebih menuntut demokratisasi dan mengerahkan pengaruh mereka dalam agenda demokratisasi dan penggabungan Islam politik sebagai upaya yang dapat membantu gerakan Islam politik dalam mewujudkan misinya untuk mengIslamkan masyarakat dan negara. Sadiki berpendapat lebih lanjut bahwa Islamisasi tidak dimaksudkan untuk menggagalkan demokratisasi. Pada saat yang sama, demokratisasi juga tidak dimaksudkan untuk mencegah Islamisasi justru setiap proses dimaksudkan untuk memperkuat yang lain. Artinya sebagai

_

³² Muhammad Ali. 2011. *Islamisme (al-Islamiyyah) dan Post-Islamisme (Ba'da al-Islamiyyah) : Menelaah Pilihan Politik Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta : Jurusan Filsafat Universitas Indonesia.

³³ Graham E. Fuller. 2003. *The Future Of Political Islam*. New York: Palgrave Macmillan. Hal. 119

³⁴ Oliver Roy. 1996. *The Failure of Political Islam*. Boston: Harvard University Press.

³⁵ Asef Bayat. 2012. *Post-Islamisme*. Yogyakarta: LkiS. Hal. 12

instrument untuk membuat Islam politik menjadi lebih kuat. Sehingga hal tersebut akan bermuara pada reformasi politik dan demokrasi sehingga ketika demokratisasi berhasil, gerakan politik Islam akan menjadi pemenang utama di bidang politik.³⁶

Dalam pandangan *Post-Islamisme*, nilai-nilai Islam akan lebih menyesuaikan dengan isu-isu mengenai hak asasi manusia, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi dan kebebasan (termasuk globalisasi dan kelestarian lingkungan) serta kompatibilitas Islam dengan politik demokrasi, pluralitas dan keragaman. Dalam kerangka *Post-Islamisme*, penulis akan menganalisis bagaimana Islam politik dikelola dengan prosedur dasar demokrasi yaitu isu partisipasi dalam pemilu dimana agama lebih bersentuhan dengan politik dibandingkan dengan hukum Islam. Islam politik muncul dalam berbagai bentuk melalui organisasi sosial dan partai politik yang tercermin dalam realitas politik, sosial, dan budaya. Gerakan politik Islam beroperasi dalam kerangka negara modern.

Namun, Kramer berpendapat bahwa meskipun Islam telah mulai mendukung dogma demokrasi, mereka masih setia pada keyakinan bahwa Islam masih memiliki agenda mewujudkan nilai-nilai Islam pada negara. Dengan kata lain, demokrasi harus ada dalam kerangka persamaan ini. Ra'id el-Solh mengkategorikan sikap politik Islam terhadap demokrasi ke dalam tiga kelompok utama. Kelompok pertama adalah benar-benar menentang rezim demokratis. Kelompok kedua berpendapat bahwa Islam mengandung unsur demokratis dan perlu untuk diakomodasi dan lebih mengacu pada konsep al-syura (konsultasi). Kelompok ketiga adalah bersedia untuk mengadopsi demokrasi Barat dan percaya bahwa teori demokrasi bisa berhasil dalam masyarakat Muslim

³⁶ Akhand Akhtar Hossain. 2016. *Islamism, secularism and post-Islamism: the Muslim world and the case of Bangladesh*. Asian Journal of Political Science Volume 24, 2016 - Issue 2. Diakses dari

http://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/02185377.2016.1185954?scroll=top&needAccess=true

Melihat peralihan cara pandang Islamisme menuju *Post-Islamisme*, bahwa Islam sebagai agama memang harus mengembangkan hubungan yang kuat dengan rezim pemerintahan. Namun, Islam memiliki pendekatan yang sama sekali berbeda dengan demokrasi sebagai bentuk pemerintah modern. Dengan demikian, pembahasan tentang hubungan antara Islam dan demokrasi pada dasarnya mengacaukan dua domain yang terpisah. Pada bab ini akan menunjukkan pendekatan yang berbeda yaitu mempelajari perilaku politik dari gerakan-gerakan Islam sebagai gerakan politik modern dan partisipasi dalam pemilu.

Post-Islamisme adalah sikap dan pandangan yang mengarah pada sikap politik dalam merespon pengaruh demokrasi barat. Menurut Asef Bayat, Islamisme sebagai ideologi politik telah mengalami penyesuaian dengan tuntutan demokrasi yang begitu meluas. Islam telah mengalami inklusifitas dengan melakukan kompromi terhadap demokrasi. Inklusifitas tersebut ditunjukan melalui dukungan terhadap ide-ide tentang pemerintahan demokrasi, kesetaraan gender, dan keberagaman inklusif. Sehingga Islam tidak lagi membatasi diri dalam dinamika modernisasi yang bersumber dari barat. Menurut Asef Bayat dan Greg Fealy, Evolusi Islamisme menjadi Post-Islamisme cenderung tidak berambisi lagi terhadap pendirian negara Islam, tetapi bekerja dengan nilai-nilai Islam dan tetap mengadopsi sistem demokrasi menjadi lebih kompromi terhadap perubahan politik domestik maupun Internasional akibat dari adanya globalisasi dan tuntutan perubahan zaman.

Dalam persoalan kekuasaan, Islamis menyadari bahwa gerakan sosial bukan satu-satunya cara untuk mewujudkan revolusi pasif. Harus ada restrukturisasi ideologi gerakan sebagai instrument dalam memperkuat posisi serta sebagai sikap politik untuk menghadapi kontestasi politik yang cenderung dinamis. Menurut Hossain, *Post-Islamisme* adalah pilihan politik dari dua posisi ideologis yang ekstrim yakni sekularisme dan Islamisme. Setiap ideologi dapat di klasifikasi dalam spectrum aktif atau pasif. Begitu juga dengan sekulerisme dan Islamisme. Terdapat sekulerisme radikal atau sekularisme tegas dan sekularisme akomodatif atau pasif. Demikian pula Islamisme dapat dibedakan antara tegas dan

pasif. Sebagai contoh negara teokratis seperti Arab Saudi yang tidak menganut sistem pemilu adalah bentuk Islamisme tegas. Sedangkan Malaysia dan Indonesia lebih mengarah pada Islamisme pasif dengan sistem pemilu sebagai mekanisme integral dari pengambilan keputusan pemerintah dalam parameter yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip Islam (baiat). *Post-Islamisme* merupakan penggabungan aspek sekularisme pasif dan Islamisme pasif dalam politik yang demokratis dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan keadilan, yang diimbangi dengan penegakan hak asasi manusia, hak-hak perempuan dan keadilan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Indonesia adalah contoh identitas komposit di mana sekularisme maupun Islamisme tidak terlalu mendominasi, tetapi beberapa elemen dari keduanya mendominasi dalam kehidupan sosial.³⁷

³⁷ Akhand Akhtar Hossain. Loc. Cit

Terdapat standart ideal yang harus diwujudkan gerakan politik *Post-Islamisme* yang dijelaskan dalam tabel berikut:

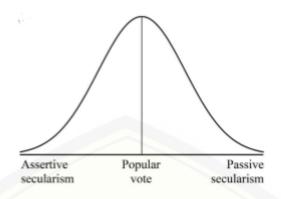
Tabel 1.1. Konsep Islamisme dan Post-Islamisme

Islamisme	 Mengusung nilai-nilai substantive-ideologi Islam Penerapan syariah (Hukum 			
	agama)			
	Terbentuknya negara Islam			
	 Menolak demokrasi 			
Post-Islamisme	Tetap bekerja dengan nilai-nilai			
	Islam			
	 Namun mengadopsi sistem 			
	sekuler			
	Tidak berambisi lagi terhadap			
	pendirian negara Islam			
	Pragmatis terhadap realitas			
	politik			
	Kompromi dengan demokrasi			

Sumber: Asef Bayat. 2012. Post-Islamisme. Yogyakarta: LkiS.

Hossain menggunakan Prinsip Hotelling-Downs³⁸ untuk menjelaskan peralihan ideologis Islamisme menuju *Post-Islamisme*. Gambar berikut akan menjelaskan esensi dari evolusi sistem politik komposit yang terdapat dalam negara Islam.

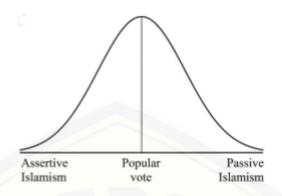
³⁸ Dalam ilmu ekonomi, hukum Hotelling menunjukkan bahwa pasar itu rasional bagi produsen untuk membuat produk serupa. Hal ini disebut sebagai prinsip diferensiasi minimum. Prinsip ini dikembangkan oleh Hotelling (1929). Dalam politik, ide itu digunakan oleh Downs (1957) untuk mengembangkan kondisi yang dapat menyebabkan stabilitas politik.



Gambar, 1.1. Model Post-Islamisme 1

Sumber: Akhand Akhtar Hossain. 2016. *Islamism, secularism and post-Islamism: the Muslim world and the case of Bangladesh.* Asian Journal of Political Science Volume 24, 2016 - Issue 2. Diakses dari http://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/02185377.2016.1185954 ?scroll=top&needAccess=true

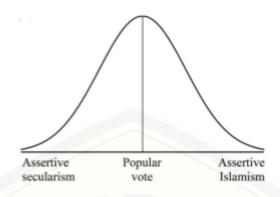
Gambar 1.1 merupakan kasus di mana prinsip negara adalah sekularisme. Islamis tidak diperbolehkan sebagai sebuah ideologi atau filsafat politik. Masyarakat tidak bisa mendirikan dan memilih partai politik berbasis agama. Negara bisa menjadi otoriter dengan partai tunggal atau menjadi seolah-olah demokratis di mana semua pihak menerima sekularisme sebagai prinsip negara. Sekularisme bisa diklasifikasikan sebagai ideology secara tegas atau pasif. sekularis tegas akan menerapkan kebijakan cenderung anti-agama. Turki di bawah Kemal Ataturk menganut prinsip sekulerisme tegas. Bentuk sekularisme pasif memungkinkan kegiatan keagamaan di bawah peraturan negara. Sebelum invasi Irak ke Suriah merupakan contoh dari kebijakan negara sekuler dengan toleransi kegiatan keagamaan di bawah regulasi negara. Preferensi masyarakat yang digambarkan dalam kurva distribusi berbentuk lonceng, dengan preferensi mayoritas terkonsentrasi di pusat mewakili bentuk moderat dari sekularisme.



Gambar. 1.2. Model Post-Islamisme 2

Sumber: Akhand Akhtar Hossain. 2016. *Islamism, secularism and post-Islamism: the Muslim world and the case of Bangladesh.* Asian Journal of Political Science Volume 24, 2016 - Issue 2. Diakses dari http://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/02185377.2016.1185954 http://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/02185377.2016.1185954

Gambar 1.2 merupakan gambaran Islamisme di negara Islam. Arab Saudi merupakan contoh *Assertive* Islamisme. Di negara yang tegas menggunakan standart nilai-nilai Islam, tidak ada ideologi lain yang diizinkan dalam pemerintahan selain pandangan Islam. Sementara di bawah rezim Islam pasif, pemerintah dapat menampung aspek sekularisme dalam menjalankan preferensi negara. Masyarakat yang diwakili oleh kurva distribusi berbentuk lonceng, dengan preferensi mayoritas juga terkonsentrasi di sekitar pusat mewakili preferensi Islam moderat.



Gambar 1.3. Model Post-Islamisme 3

Sumber: Akhand Akhtar Hossain. 2016. *Islamism, secularism and post-Islamism: the Muslim world and the case of Bangladesh.* Asian Journal of Political Science Volume 24, 2016 - Issue 2. Diakses dari http://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/02185377.2016.1185954 http://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/02185377.2016.1185954

Gambar 1.3 merupakan kasus *Post-Islamisme* dalam demokrasi. Tidak ada ideologi tunggal negara dan preferensi mayoritas mengakomodasi apresiasi yang masuk akal untuk aspek sekularisme maupun Islamisme. Dalam sistem demokrasi dengan pemilihan berkala, partai-partai politik mencari posisi pada dua spectrum ideologi yakni kiri-tengah dan kanan-tengah. Salah satu pihak misalnya partai sekuler akan mengambil posisi tengah-kiri dan memilih sekularisme toleran. Sedangkan pihak kedua, misalnya partai agama akan memilih pemerintah Islam yang toleran. Dalam sistem demokrasi, untuk mendapatkan kekuasaan, partai politik atau kelompok akan bersaing untuk mendapatkan suara pemilih melalui usulan kebijakan yang berusaha untuk mensintesis prinsip sekuler dan Islamis.

Menurut argumen Hotelling-Downs, bahwa proses yang kompetitif ini akan mengarah pada sikap toleran. Dalam sistem seperti itu, tidak ada kemurnian ideology sebagai landasan gerakan. Sekularis akan mencoba untuk menarik pemilih Islamis. Sedangkan Islamis juga mencoba untuk menarik para pemilih sekuler. Menurut prinsip Hotelling-Downs, kedua belah pihak berusaha untuk mengintegrasikan antara sekularisme dan Islamisme yang disebut sebagai *Post*-

Islamisme dalam arti praktis. Turki hari ini bergeser menuju sekulerisme pasif dan cenderung mengakomodasi prinsip-prinsip Islamis. Demikian juga Mesir, meskipun dari awal menerapkan sekularisme pasif dan juga Islamisme pasif, namun dalam perkembanganya gerakan Islam politik sangat kuat.

1.5.3 Islamic Political Movements

Dalam perkembangan Islamic Political movement, secara teoritik dilakukan diferensiasi model gerakan yang disandarkan pada tujuan dan strategi untuk menghasilkan perubahan. Diferensiasi tersebut dibedakan dalam dua klasifikasi secara vertical dan horizontal. Yakni melalui State-Oriented Islamic Movements dan Society-Oriented Islamic Movements. State-Oriented Islamic Movements lebih berorientasi elit yang lebih ideologis dan statis, sementara Society-Oriented Islamic Movements lebih berorientasi pada gerakan yang lebih berorientasi pada masyarakat, bertahap, dan menekankan reformasi pragmatisme gerakan. Gerakan politik Islam mengartikulasikan isu-isu sosial dan ekonomi yang kompleks dan keprihatinan atas perubahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi. Masjid dan jaringan kelembagaan agama adalah agen dalam mengartikulasikan simbol-simbol Islam untuk membingkai isu-isu sosial dan politik untuk me rekonstruksi negara dan masyarakat, gerakan-gerakan Islam melakukan perubahan secara revolusioner dengan jalan mengubah kebijakan negara, melakukan kerjasama dalam gerakan sosial dan aliansi dengan kelas bisnis, serta perluasan ruang diskursif.

	Repertoire of action (strategies and means)				
Goal	Legitimate	Illegitimate			
Vertical					
State-oriented; elite vanguard; social change from above	Reformist: Participation in the hope of controlling the state or shaping policies through forming their own Islamic party or in alliance with other parties	Revolutionary: Rejects the system and uses violence and intimidation			
	Target: education, legal system, social welfare Outcome: accommodation	Target: the state Outcome: confrontation			
Horizontal					
Society-oriented; associational; identity- oriented; social change from below	Societal (everyday life-based movements) Groups using the media and communications networks to develop discursive spaces for the construction of Islamic identity; seeking to use the market to create heaven on earth; viewing Islam as a cultural capital; use of associational networks to empower community	Spiritual/Inward: Withdraws from political life to promote self-purification and self-consciousness			
	Target: media, economy, (private) Education Outcome: integration	Target: religious consciousnes Outcome: withdrawal			

Tabel 1.3. Tipologi Islamic Political Movements

Sumber: M. Hakan yavuz. 2003. Islamic Political Identity in Turkey. New York: Oxford University Press.

a. State-Oriented Islamic Movements

State-Oriented Islamic Movements adalah gerakan Islam vertikal yang berorientasi pada peran negara yang cenderung bersikap otoriter dan elitis dalam hal pengambilan keputusan. Konsep ini menekankan bahwa masyarakat lebih baik dikontrol dan dikoreksi oleh negara melalui penegakan homogenisasi ideologi agama. Konsep ini difokuskan pada tekanan dari pemerintah ke masyarakat yang berorientasi pada gerakan socio-religius. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat menjalankan paham nasionalisme dan keagamaan yang diberlakukan oleh negara. Nasionalisme dan keagamaan dikonstruksi menjadi identitas populer oleh negara.

State-Oriented Islamic Movements dibagi kedalam dua sub kategori berdasarkan basis strategi dalam mendapatkan kekuasaan. Pertama, gerakaan Islam revolusi. Gerakan ini menolak legitimasi sistem politik yang berlaku dan menggunakan kekuasaan sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan. Beberapa kelompok Islam memberlakukan kekerasan sebagai untuk membentuk ruang kesempatan. Gerakan Islam yang lain menggunakan cara yang lebih soft dalam menggulingkan sistem social politik yang sedang berkuasa. Tujuanya adalah untuk mendirikan negara Islam dan menegakkan hukum Islam. Kedua, gerakan Islam reformis. Berbeda dengan gerakan Islam revolusioner, gerakan Islam reformis berpartisipasi dalam proses politik dan dianggap sebagai sebuah kesempatan politik. Hal tersebut adalah usaha untuk mendapatkan kekuasaan untuk melakukan kontrol kebijakan negara. Seperti gerakan yang membentuk partai politik Islam atau beraliansi dengan partai lain.

b. Society-Oriented Islamic Movements

Society-Oriented Islamic Movements adalah gerakan yang terkonsentrasi untuk mengubah masyarakat dari dalam dengan memanfaatkan ruang public. Pasar dan media masa adalah instrument penting untuk mengubah kebiasaan individu dalam relasi sosial. Dalam hal strategi dan instrumen, terdapat dua gerakan subhorizontal yang berbeda. Pertama adalah gerakan kontemplatif berorientasi ke dalam, yang berusaha untuk menarik diri ke dalam ranah pribadi. Gerakan-gerakan ini fokus pada individu sebagai objek perubahan dengan mengolah batin sebagai ruang untuk membangun kesadaran kebangkitan Islam. Aktor yang berpengaruh adalah aktivis dan intelektual Muslim. Aktor ini menjadi public figure untuk meningkatkan kesadaran sosial dengan mengajak untuk melakukan ritual keagamaan sebagai bentuk kesadaran seperti shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, dan memberikan sedekah kepada fakir miskin. Melalui aktivisme tersebut, tujuanya adalah terjadinya transformasi pribadi dan terbentuknya konstruk wacana moral yang nantinya akan berguna untuk mengkritik hubungan kekuasaan.

Kategori kedua, gerakan berbasis kehidupan sehari-hari, dengan mempengaruhi masyarakat dan individu, dan menggunakan jaringan komunikasi modern dan tradisional untuk mengembangkan konstruksi untuk pembangunan identitas baru. Kelompok-kelompok ini menganggap pasar adalah ruang di mana tujuan spiritual dan kemakmuran materi harus dicapai; dan mengkonstruk kemakmuran manifestasi kasih karunia Tuhan. Gerakan social ini menargetkan media, ekonomi, dan industri informasi sebagai ranah perjuangan.

1.6 Argumen Utama

Peralihan menuju Post-Islamisme adalah sebuah pilihan rasional gerakan politik Islam modern. Tantangan demokrasi dan globalisasi mendorong gerakan politik Islam untuk lebih pragmatis dalam menentukan pilihan-pilihan politik. Hal tersebut harus harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan politik seiring dengan perkembangan demokrasi dan globalisasi. Post-Islamisme di Turki berhasil dibawah kepemimpinan partai AKP dan Recep Tayyip Erdogan dan mengalami kegagalan di Mesir di bawah partai FJP dan Muhammad Morsi. Hal ini disebabkan karena Post-Islamis di Turki mampu membuktikan penyesuaianpenyesuaian kondisi politik. AKP mampu mempertahankan legitimasi kekuasaan dengan berbagai kebijakan populis dan mengupayakan stabilitas ekonomi dan politik serta melakukan control terhadap militer. Sedangkan di Mesir, Post-Islamisme justru mengalami pembalikan melalui kudeta terhadap Morsi bersama Ikhwanul Muslimin. Kekuasaan *Post-Islamisme* direduksi oleh berbagai kebijakan yang cenderung kembali Islamis dan otoriter. Morsi juga tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi Mesir dan kontrol terhadap militer sehingga kekuasaanya rapuh.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Paradigma Penelitian

Paradigma adalah kumpulan dari asumsi, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berfikir dalam penelitian. Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana penelitian distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang didalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu).³⁹ Paradigma adalah pandangan awal yang membedakan, memperjelas, dan mempertajam orientasi berpikir dalam penelitian. Selain itu paradigma juga mengarahkan peneliti dalam mengkaji apa yang penting, absah, dan masuk akal.

Menurut Guba dan Lincoln, paradigma dibedakan dalam empat sub. Pertama, positivis dan post-positivis. Kedua, konstruktivis-interpreatif. Ketiga, kritis (marxist, emansipatoris). Keempat, feminis-poststruktural. Keempat paradigma ini berkembang menjadi pemahaman yang kompleks dan tidak dapat secara tegas dan kaku dipisah-pisahkan dalam tingkat fenomena di lapangan.⁴⁰

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konstruktivis interpretatif karena dalam prosesnya penelitian ini bermaksud untuk memandang realita sebagai sebuah konstruksi sosial. pemilihan paradigma tersebut juga berdasarkan asumsi bahwa pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang realita yang sedang diteliti merupakan produk interpretasi peneliti dengan subjek dan sistem yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini, mengkonstruksi realita yang akan diteliti menjadi sebuah pengetahuan yang baru. Konstruktivisme interpretatif sebagai filsafat memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis atas 'socially meaningful action' melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam setting alamiah agar dapat memahami dan menafsirkan bagaimana aktor sosial menciptakan dan memelihara sistem sosial.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berperan penting dalam sebuah penelitian. Menurut Neumann, penelitian mengarah pada ide-ide, aturan-aturan, teknik-teknik, dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Metode peneilitian juga berfungsi sebagai landasan atau alat dalam menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian, sekaligus berguna sebagai sarana memperoleh, mengolah, dan menganalisa data-data ilmiah. Kebenaran ilmiah didapatkan jika

-

³⁹Bogdan dan Biklen Dalam Lexy J. Moleong. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 49.

⁴⁰ Kristi Poerwandari. 2011. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Cetakan keempat. Depok: LPSP3 UI. Hal. 21.

telah diuji secara ilmiah serta diungkapkan melalui metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah teknik penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren. Penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena, aktivitas-aktivitas, proses-proses sosial. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada makna (meanings) dan pemahaman (understanding) daripada kuantifikasi. Menurut Liz Spencer, penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif dan sejarah orang dalam konteks dan sering ditandai dengan concern untuk menemukan perspektif aktor, metode konteks-sensitif dan semi-struktur, kaya dengan data, penjelasan di tingkat makna serta bagaimana dan mengapa pertanyaan diajukan.

Metode kualitatif secara umum merujuk pada pengumpulan data dan strategi atau teknik analisis data, yang bergantung pada data non-numerik. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kita memahami dunia sekitar kita, dan karena itu mengharuskan kita untuk fokus pada makna dan proses yang membentuk hubungan internasional. Penelitian kualitatif sering dilakukan melalui studi mendalam (*in-depth*) atas peristiwa, fenomena, daerah, negara, organisasi, atau individu tertentu. Metode kualitatif dimaksudkan untuk mengambarkan beragam alat dan sumber daya yang dapat kita manfaatkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang

_

⁴¹John C. King. "Qualitative Research Method in International Affairs for Master Students"., dalam https://www.american.edu/sis/crs/upload/2011SP-SIS-680-001_King.pdfdiakses 27 Mei 2016.

⁴²Liz Spencer. 2003. *Quality in Qualitative Evaluation: A framework for Assesing Research Evidence*. London: The Cabinet Office. Hal. 3., dalam Umar Suryadi B. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 63.

datang dalam bentuk bahsa lisan atau tertulis dan tidak diformalkan menjadi angka-angka.⁴³

1.7.3 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat komparatif atau perbandingan. Tujuan sederhana dari perbandingan adalah untuk mengidentifikasi persamaan atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih. Dalam implementasinya, sebuah analisis mengacu pada perbandingan dua gejala tertentu atau lebih. Perbandingan dalam studi ilmu politik menekankan variabel perbandingan antara negara dan negara, sistem pemerintahan monarki/oligarki dengan demokrasi, pemerintahan konstitusional dengan tirani dan sebagainya. 44

Menurut Lijphart, metode komparatif (Comparative Method) atau perbandingan lebih ditekankan kepada suatu metode penemuan hubungan empiris antara berbagai variabel, dan metode ini bukan merupakan metode pengukuran. Karena metode komparatif bukan merupakan metode pengukuran, maka metode komparatif lebih sesuai menggunakan pendekatan analisis kualitatif, bukan kuantitatif.⁴⁵ Dalam studi Perbandingan Politik terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan, yakni:

a. Pendekatan Tradisional (Traditional Approach)

Secara historis pendekatan ini menghubungkan fakta dan nilai dalam studi politik perbandingan. Selama awal abad ke-20, orientasi studi perbandingan bergeser pada studi institusi-institusi negara-negara individual. Secara intrinsik, pendekatan tradisional menjadi nonkomparatif, deskriptif, sempit dan statis. Pendekatan ini cenderung menggambarkan institusi- institusi politik tanpa mencoba untuk

⁴³ Christopher Lamont. 2015. *Research Methods in International Relations*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. Hal. 78., dalam Umar Suryadi B. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 64.

⁴⁴ M. Mas'oed, Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada University Press. Hal. 21.

⁴⁵ Ronald Chillcote. 2003. *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. Hal. 30.

memperbandingkannya, namun tidak mengidentifikasi tipe-tipenya, misalnya institusi parlementer terhadap institusi presidensil⁴⁶

b. Pendekatan Perilaku (Behavioral Approach)

Pendekatan ini merupakan sebuah reaksi terhadap spekulasi teori yang memberikan uraian penjelasan, kesimpulan dan penilaian berdasarkan normanorma atau aturan-aturan dan standar-standar kekuasaan maupun etnosentrisme, formalisme, dan deskripsi barat yang menjadi karakteristik pendekatan tradisional kontemporer. Menurut Asosiasi Ilmu Politik Amerika (American Political Science Association) pada tahun 1944 mengkritik bidang perbandingan Ilmu Politik sebagai metode yang bersifat sempit dalam melakukan analisis deskriptif menyangkut institusi-institusi luar negeri dan memaksakan suatu campuran metoda dan disain untuk mencapai suatu ilmu rekayasa sosial. Menurut laporan lain dalam satu dekade berikutnya menyerukan suatu pendekatan empiris yang sistematis termasuk perluasan skema-skema yang bersifat klasifikasi, konseptualisasi pada beragam tingkat abstraksi, penyusunan hipotesis dan pengujian hipotesis melalui data empiris. Laporan-laporan ini menjadi basis pendekatan behavioral dalam studi politik yang mendampingi kebanyakan riset bidang perbandingan politik yang berkembang pesat selama tahun 1950-an dan 1960-an.

Kecenderungan riset behavioral dalam politik telah menuju pada pembentukan model-model yang konsisten secara logika, dimana "kebenaran" diturunkan secara deduktif. Bayang-bayang kenyataan empiris menggerogoti teori murni model-model politik formal tertentu, dan kelompok behavioralis biasanya mencari beberapa campuran pengalaman dan teori, sambil berupaya memadukan studi politik dengan kecermatan disiplin ilmiah yang menjadi model dari metode-metode ilmu alam.⁴⁷

-

⁴⁶ Ibid, Hal. 78

⁴⁷ Ibid, Hal. 80.

Dalam upaya untuk membedakan antara penelaahan model-model behavioral dan tradisional, telah diidentifikasi adanya doktrin utama kredo behavioral. Doktrin-doktrin tersebut adalah:

- 1. Keteraturan atau keragaman perilaku politik, yang dapat diungkapkan dalam generalisasi atau teori.
- 2. Verifikasi atau pengujian validitas generalisasi atau teori tersebut
- 3. Teknik-teknik pencarian atau interpretasi data.
- 4. Kuantifikasi dan pengukuran dalam rekaman data.
- 5. Nilai-nilai yang membedakan antara dalil-dalil yang berhubungan dengan evaluasi etis yang berkaitan dengan penjelasan empiris
- 6. Sistematisasi riset
- 7. Ilmu murni atau pencarian pemahaman dan penjelasan perilaku sebelum menggunakan pengetahuan sebagai solusi permasalahan sosial.
- 8. Integrasi riset politik dengan riset-riset ilmu sosial lainnya

c. Pendekatan Pasca Behavioral

Pendekatan ini berorientasi ke masa depan menuju "relevansi" dan "tindakan". Kredo pasca behavioral terdiri dari sejumlah doktrin, yaitu:

- 1. Substansi mendahului teknik, sehingga permasalahan sosial yang mendesak menjadi lebih penting daripada peralatan investigasi.
- 2. Behavioralisme sendiri secara ideologi bersifat konservatif dan terbatas pada abstraksi, bukannya kenyataan saat-saat krisis.
- Ilmu tidak dapat bersifat netral ketika dilakukan evaluasi. Fakta tidak dapat dipisahkan dari nilai, dan alasan-alasan nilai harus dikaitkan dengan pengetahuan.
- 4. Kaum intelektual harus mengemban tanggung jawab masyarakat mereka, mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dalam peradaban, dan tidak semata-mata menjadi sekelompok teknisi yang terisolasi dan terlindungi dari isu-isu dan permasalahan yang mengcopy pekerjaan mereka.

- 5. Para intelektual harus menerapkan pengetahuan dan terlibat dalam pembentukan ulang masyarakat.
- 6. Para intelektual harus memasuki kancah perjuangan mutakhir dan berpartisipasi dalam politisasi institusi-institusi profesi dan akademis Ibid.

Agar proses perbandingan dalam penelitian ini bersifat sistematis, maka penulis merujuk pada konsepsi dari Samuel Beer, Adam Ulam serta Roy Macridis yang merumuskan tahapan-tahapan telaah komparatif atau tahapan-tahapan perbandingan, tahapan-tahapan deskriptif, klasifikasi, penjelasan serta konfirmasinya meliputi,

- Tahapan pertama pengumpulan dan pemaparan deskripsi fakta yang dilakukan berdasarkan skema atau tata cara penggolongan (klasifikasi) tertentu.
- Tahapan kedua yaitu, berbagai kesamaan dan perbedaan dikenali dan dijelaskan.
- 3. Tahapan ketiga yaitu, hipotesa-hipotesa sementara tentang saling keterkaitan dalam proses politiknya diformulasikan.
- 4. Tahapan keempat yaitu, hipotesa-hipotesa tersebut diverifikasi (diuji dan diperiksa melalui observasi empiris.
- 5. Tahapan kelima adalah temuan-temuan yang didapat dipertanggung jawabkan harus ditetapkan ⁴⁸

1.7.4 Objek Penelitian

Objek penelitian ini yang mejadi fokus pada penelitian ini adalah peralihan gerakan Islamisme menuju post Islamisme di Mesir dan Turki serta implikasi-implikasi politik yang di timbulkan dan membandingkan kegagalan *Post-Islamisme* di Mesir dan keberhasilan *Post-Islamisme* di Turki.

⁴⁸ Ibid. Hal. 21.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder inilah yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh dengan melakukan studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui literatur-literatur ilmiah pustaka dan landasan teori berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari

- 1. Perpustakaan umum Universitas Jember
- 2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
- 3. Jurnal-jurnal Ilmiah
- 4. Media publikasi resmi pemerintah dan laporan-laporan lembaga penelitian

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorgansasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceriakan kepada orang lain.

Menurut Moleong, proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setiap data yang diperoleh dari proses pengumpulan data dikategorikan dalam tema pokok permasalahan yang sesuai. Selanjutnya data dan informasi yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang didukung oleh tabel data. ⁵⁰

⁴⁹ Gabriel Amin Silalahi. 2003. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV. Mitra Media. Hal. 57.

⁵⁰Lexy J. Moleong. *Op. Cit.* 2001. Hal. 103-104

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan beberapa proses analisis data dengan tahapan sebagai berikut:

- Reduksi data. Merupakan proses pemilhan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar. Di mana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.
- Display (Penyajian Data). Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.
- 3. *Verifikasi* (Menarik Kesimpulan). Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab 1: Pendahuluan

Sebagai Pendahuluan akan dikemukakan latar belakang munculnya *Post-Islamisme* dari kemenangan partai yang mengusung ide *Post-Islamisme* di dua negara yaitu Mesir dibawah Muhammad Morsi dari Ikhwanul Muslimin yang membentuk *Freedom and Justice Party* (FJP) dan Recep Tayyip Erdogan yang membentuk *Adelet ve kalkinma Partisi* (AKP). Pemilihan objek kajian kedua negara didasarkan pada kemenangan dua gerakan yang diawal pendirian mengadopsi Islamisme dan kemudian menjadi *Post-Islamisme* (FJP sebagai representasi Ikhwanul Muslimin dan AKP sebagai terusan gerakan Islam di Mesir). Studi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan gerakan berbasis politik – religius terhadap demokrasi.

Bab 2 : Konteks Sosial, Ekonomi dan Demokratisasi Di Mesir Dan Turki

Dalam bab ini, peneliti akan membahas bagaimana dinamika demokratisasi di Mesir dan Turki, pengaruh militer, kondisi ekonomi, dan kebangkitan Islam di Mesir dan Turki.

Bab 3 : Kebangkitan Politik Islam Di Mesir Dan Turki

Dalam bab ini, peneliti akan mengeksplorasi secara historis kebangkitan Islamisme di Mesir dan Turki. Serta menganalisis peran militer dalam menghadapi gerakan Islam politik di kedua negara dan implikasi-implikasi yang timbul sebagai materi pendukung dalam analisis bab 4.

Bab 4: Politik Islamisme Menuju *Post-Islamisme* : Transisi Di Mesir Dan Turki

Dalam bab ini akan menjelaskan perdebatan Islamisme, *Post-Islamisme*, dan Demokrasi di Mesir dan Turki. Melalui telaah terhadap pengalaman kedua partai dalam mengadaptasi gerakan Islamisme terhadap Demokrasi. Selanjutnya akan dipaparkan kajian tentang sistem kepartaian dan sistem pemilu serta kajian terhadap lingkungan politik seperti pengaruh sekulerisme yang terjadi di dua negara. Studi ini dianggap perlu karena gerakan Islamisme yaitu gerakan yang muncul sebelum *Post-Islamisme* yang mengasumsikan berdirinya negara Islam menjadi tidak berkesesuaian (*compatible*) terhadap Demokrasi dan evolusi Islamisme menjadi *Post-Islamisme* yang tidak berambisi terhadap pendirian negara Islam, tetapi bekerja dengan nilai-nilai Islam dan tetap mengadopsi sistem demokrasi menjadi lebih kompromi terhadap politik domestik maupun internasional.

Bab 5 : Kesimpulan.

Pada Bab ini, akan dijelaskan kesimpulan dari penelitian yakni berisi tentang jawaban dari rumusan masalah.

BAB 2

KONTEKS SOSIAL, EKONOMI DAN DEMOKRATISASI DI MESIR DAN TURKI

Mesir dan Turki adalah negara yang terletak di kawasan Timur Tengah. Letak geografis yang strategis menyebabkan kondisi geopolitik Mesir dan Turki menjadi kawasan yang diperhitungkan dunia. Dalam bab ini, penulis akan mengeksplorasi variable-variable yang mendukung penelitian seperti kondisi demografis, proses demokratisasi, dan peran militer dalam politik di kedua negara.

2.1 Kondisi Geografis dan Demografis Mesir dan Turki

Mesir terletak di timur laut benua Afrika dan mencakup semenanjung Sinai, sementara sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Perbatasan Mesir mencakup Semenanjung Sinai (dianggap sebagai bagian dari Asia Barat Daya) sedangkan sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza dan Israel di utara-timur. Di wilayah perairan berbatasan dengan Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur⁵¹.

Sementara Turki merupakan negara dengan kapasitas ekonomi dan militer yang diakui dunia internasional. Sejarah peradaban Turki menyebabkan negara ini memiliki daya tarik tersendiri. Keistimewaan Turki terletak pada posisi geografis di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara, Bulgaria di sebelah barat laut, Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat, Georgia di timur laut, Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur, dan Irak dan Suriah di tenggara, serta Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental.

⁵¹ *The World Factbook of Egypt.* Diakses dari https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html [10 Oktober 2016]

Mesir adalah negara dengan populasi penduduk terpadat di benua Afrika. Jumlah penduduk Mesir sekitar 88 juta pada tahun 2015. Populasinya tumbuh pesat pada periode 1970-2010 karena kemajuan dibidang medis dan peningkatan produktivitas pertanian. Etnis dominan di Mesir adalah etnis Mesir. Jumlahnya mencapai 91% dari total populasi. Mesir hanya mengakui tiga agama yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama mayoritas Mesir adalah Islam. Jumlahnya mencapai 90%. Sedangkan agama lain yang diakui adalah Kristen Koptik dengan presentase sebesar 9%, dan 1% Kristen yang lainnya. Sekte minoritas Mesir seperti komunitas Baha'i dan Ahmadi tidak diakui oleh negara karena mereka dicap sebagai kelompok kanan yang mengancam keamanan nasional Mesir. Bahkan penganut Baha'i dan ateis memiliki identitas khusus yang berfungsi sebagai tanda pengenal. Hingga pada tahun 2008, pengadilan mengizinkan pemeluk agama yang tidak diakui untuk mendapatkan identifikasi⁵³.

Sedangkan menurut *Address-Based Population Recording System of Turkey* pada 2011, jumlah penduduk Turki sebesar 74 juta jiwa. Dan mengalami peningkatan populasi sebesar 1,35 persen setiap tahun. Konstitusi Turki menyebut warganegaranya dengan sebutan "Turk"; Sehingga etnis mayoritas di Turki adalah orang-orang asli Turki. Populasinya sekitar 70-75 persen. Tiga kelompok minoritas secara resmi juga diakui sebagai bagian dari Turki dalam Perjanjian Lausanne yakni Armenia, Yunani dan Yahudi. Terdapat etnis yang belum diakui oleh pemerintah seperti kelompok Albania, Arab, Assyria, Azeri, Bosnia, Circassians, Georgia, Lazs, Persia, Pomaks (Bulgaria), Yazidi dan Roma. Kurdi merupakan kelompok etnis yang etnis non-Turki terbesar dengan jumlah sekitar sekitar 18-25 persen dari populasi. Selain tiga minoritas yang diakui secara resmi, minoritas yang lain tidak memiliki hak sebagai warga negara. Istilah "minoritas"

The World's Muslims: Unity and Diversity. Diakses dari http://www.pewforum.org/2012/08/09/the-worlds muslims-unity-and-diversity-1-religious-affiliation/#identity [10 Oktober 2016]

⁵³ Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS). Diakses dari http://www.capmas.gov.eg/?lang=2 [10 Oktober 2016]

itu sendiri masih menjadi isu sensitif di Turki, sementara pemerintah Turki sering dikritik karena perlakuan terhadap minoritas. Diperkirakan 2,5 persen dari jumlah populasi adalah migran internasional.⁵⁴

Turki adalah negara sekuler tanpa agama resmi negara. Konstitusi Turki memberikan kebebasan beragama bagi masyarakatnya. Peran agama telah menjadi perdebatan kontroversial selama bertahun-tahun sejak pembentukan partai-partai Islam. Islam adalah agama yang dominan dari Turki dengan jumlah 99,8 persen dari populasi. Sekte paling populer di Turki adalah Islam Sunni. Otoritas agama Islam tertinggi dikelola oleh Kementrian Urusan Agama (Diyanet İşleri Başkanlığı) yang bertanggung jawab untuk mengatur pengoperasian 80.000 masjid yang terdaftar di Turki⁵⁵. Sedangkan Mesir menganut sistem pemerintahan Republik Arab Mesir dengan kemerdekaan yang diperoleh pada 1953. Pada tanggal 18 Juni 1953, Republik Mesir dideklarasikan dan dipimpin oleh Jenderal Muhammad Naguib sebagai Presiden pertama.

2.2 Dinamika Demokratisasi di Mesir dan Turki

Kondisi politik Timur Tengah tidak terlepas dari pengaruh Barat pasca runtuhnya kekaisaran Otoman yang dulunya menguasai wilayah Turki, Lebanon, Suriah, Irak, Yordania, Palestina, Israel, Kuwait, sebagian Arab Saudi, Mesir, Tunisia, Al-Jazair dan sebagian Yaman. Perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Perancis memulai pengaruh besar negara-negara Eropa di Timur Tengah. Hingga pada tahun 1917 muncul Deklarasi Balfour yang bertujuan membentuk negara Yahudi di wilayah yang di kuasai Inggris. Sehingga pasca perang dunia satu dan dua, negara-negara Eropa mulai melakukan kolonialisasi di wilayah Timur Tengah.

⁵⁴Turkish Statistical Institute . 2011. The Results of Address Based Population Registration System. Diakses dari http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10736 [10 Oktober 2016]

⁵⁵ 2007. International Religious Freedom Report: Bureau Of Democracy, Human Rights, And Labor. Diakses dari http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2007/90204.htm [10 Oktober 2016]

Di era Perang Dingin, terjadi gelombang demokratisasi yang melanda negara-negara dunia dalam tesis Samuel Huntington tentang The Third Wave Of Democratization atau demokratisasi gelombang ketiga. Huntington menyebut tiga periode perkembangan demokrasi. Gelombang pertama, terjadi pada kurun waktu 1828-1926, dimulai di Eropa dan dipicu oleh perkembangan di bidang sosial dan ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi, industrialisasi, urbanisasi, dan meningkatnya jumlah kelompok kelas menengah oleh Huntington dianggap sebagai penyebab utama tumbuhnya demokrasi di sejumlah negara Eropa saat itu. Gelombang kedua terjadi pada kurun waktu 1943-1962 dan penyebab utamanya adalah faktor politik dan militer. Menyusul kemenangan pihak Sekutu pada Perang Dunia Kedua, beberapa negara kemudian beralih ke demokrasi. Gelombang kedua ini berlanjut di sejumlah negara yang baru merdeka menyusul proses dekolonisasi. Demokratisasi gelombang ketiga dimulai tahun 1974 dengan faktor penyebab yang lebih kompleks dibandingkan dua gelombang terdahulu. Empat di antaranya adalah melemahnya legitimasi rejim otoriter, perkembangan di sektor ekonomi, dampak dari proses serupa di kawasan (snowball effect), dan tekanan eksternal. Huntington memberi sebutan gelombang ketiga (third wave) untuk proses demokratisasi yang terjadi mulai pertengahan 1970-an sampai awal 1990-an. Dimulai dari Revolusi Mawar di Portugal sampai dengan perubahan politik di negara-negara eks Blok Timur menyusul usainya Perang Dingin.⁵⁶

Namun, pada saat dunia tengah dilanda gelombang demokratisasi, Timur Tengah justru luput dari gelombang demokratisasi tersebut dimana mayoritas negara masih dipimpin oleh para diktator, baik dari kalangan militer maupun partai tunggal.⁵⁷ Negara-negara Timur Tengah memiliki tingkat kebebasan politik yang terbatas. Pemerintah banyak melarang aktivitas politik maupun aktivitas kritik terhadap pemerintah. Karena diangggap akan mengganggu stabilitas dan mengancam kekuasaan *status quo*.

⁵⁶ Samuel P. Huntington. 2001. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. Hal. 16

⁵⁷ Muhammad Fakhry Ghafur. 2012. Demokratisasi dan Fenomena Kebangkitan Politik Islam di Timur Tengah. Diakses dari http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/timur-tengah/610-demokratisasi-dan-fenomena-kebangkitan-politik-Islam-di-timur-tengah [9 Januari 2017]

Mesir dan Turki adalah dua negara dikawasan Timur Tengah yang juga memilki pengalaman dipimpin oleh rejim otoriter. Republik Arab Mesir dideklarasikan oleh pemerintahan militer yang disebut sebagai The Free Officer. Beberapa jendral yakni Gamal Abdel Nasser, Abdel Monem Abdel Rauf, Khaled Muhiyeddine, Kamaleddine Hussein dan Hassan Ibrahim mendirikan Republik Mesir pada bulan Juli 1949. Pada September 1952 Mayor Jenderal Mohammed Naguib terpilih sebagai presiden pertama Republik Mesir.⁵⁸

Pasca berakhirnya pemerintahan Jendral Muhammad Naguib, Mesir di pimpin oleh anggota The Free Officer yang lainya, yakni jendral Gamal Abdul Naser. Di era Nasser, Mesir dihadapkan pada penandatanganan perjanjian dengan Inggris untuk memulai penarikan terhadap aktivitas kolonialisasi dan akhirnya meninggalkan Mesir. Pasca berakhirnya kolonialisme Inggris, Nasser menerapkan kebijakan untuk tidak terlalu ikut campur pada konteks politik internasional pada masa tersebut. Perang dingin yang berkecamuk menyebabkan Mesir memilih untuk menjauhi Barat dan menjadi netral. Namun pada periode 1961-1966 Presiden Nasser mengadopsi kebijakan sosialis termasuk nasionalisasi industri dan program kesejahteraan.⁵⁹

Pasca Nasser meninggal, kepemimpinan Mesir digantikan oleh wakil presiden Anwar Sadat. Era Sadat menjadi era penting bagi kembalinya stabilitas ekonomi Mesir. Pembangunan Aswan High Dam pada masa Sadat mendapat dana bantuan dari Uni Soviet. Selesainya pembangunan tersebut memiliki dampak besar pada irigasi, pertanian dan industri di Mesir. Perubahan haluan politik luar negeri juga terjadi pada era Sadat. Presiden Sadat mulai menarik diri terhadap Soviet dan mengembalikan orientasi Mesir terhadap Barat. Sadat mengembalikan orientasi politik pada kebijakan liberalisasi ekonomi yang dikenal sebagai *Infitah* (keterbukaan). Anwar Sadat menerapkan kebijakan "buka pintu" untuk investasi swasta di Mesir setelah Perang Oktober (Yom Kippur) dengan Israel pada tahun

⁵⁸ Tarek Osman. 2010. Egypt on the Brink: From Nasser to Mubarak. New Haven: Yale University Press

⁵⁹ Scott W. Hibbard. 2010. Religious Politics and Secular States Egypt, India, and the United States. United States: The Johns Hopkins University Press

43

1973. Kemenangan Mesir pada perang Oktober 1973 (Yom Kippur) dianggap sebagai kemenangan strategis dan memberi Sadat peluang untuk melakukan pembalikan terhadap kebijakan sosialis. *Infitah* tidak hanya merubah kebijakan pemerintah Sadat secara ideologis tetapi juga dilator belakangi oleh motif politik. Dengan menyelaraskan Mesir dan kapitalis, Sadat berhasil mengamankan posisinya dalam kekuasaan.⁶⁰

Namun, Sadat akhirnya gagal untuk melakukan liberalisasi ekonomi untuk memperkuat pasar dan investasi asing. Pelaksanaan Infitah dianggap sebagai ambisi yang berlebihan dan tidak pro terhadap masyarakat miskin.⁶¹ Dengan adanya Infitah, Sadat berusaha membangun basis pendukung rezim dengan memberikan konsesi atas tanah, barang dan komoditas dan kontrak untuk lembaga perdagangan guna menciptakan pasar bebas dan ekonomi terbuka. 62 Sementara itu, jutaan masyarakat Mesir yang sebelumnya miskin terjebak dalam pembangunan yang justru menyebabkan semakin terpinggirkan dan tidak mampu mengikuti arus pembangunan dibawah Infitah. 63 Program ini adalah kejutan untuk kelas menengah di era Nasser dan berdampak pada dicabutnya kebijakan pendidikan gratis, program kesetaraan sosial, penghapusan feodalisme, nasionalisasi tanah dan industri, dan pajak progresif.⁶⁴ Meskipun program ini mengutamakan investasi swasta asing, kontribusi negara untuk pembentukan modal investasi mengalami stagnansi pada pertengahan 1960-an hingga akhir 1970-an. Presiden Sadat pada akhirnya harus mengalami kematian dengan cara dibunuh. Sadat dibunuh oleh anggota dari kelompok ekstrimis Muslim yang menentang perjanjian perdamaian Sadat dengan Israel pada tahun 1979. Selanjutnya digantikan oleh wakilnya yakni Hosni Mubarak.⁶⁵

_

⁶⁰ *Ibid*.Hal.125

⁶¹ *Ibid*.Hal.127

⁶² *Ibid*.Hal.118-119

⁶³ *Ibid*.Hal.120-121

⁶⁴ Ibid.Hal.124

⁶⁵ Michael C. Jordan . 1997. *The 1973 Arab-Israeli War: Arab Policies, Strategies, and Campaigns*. Diakses pada GlobalSecurity.org [10 Oktober]

Seperti para pendahulunya, kepemimpinan Mubarak juga tidak menunjukkan adanya demokratisasi. Justru menyebabkan Mesir menjadi semakin otoriter. Gaya pemerintahan Mubarak mencerminkan respon terhadap kegagalan kebijakan sosialis di era Nasser ataupun kebijakan Liberalis di era Sadat. Model pemerintahan dari dua pendahulunya dianggap gagal dan mengakibatkan stagnasi politik,sosial-ekonomi dan kegagalan kebijakan luar negeri. Seperti banyak otokrat lainnya, Mubarak menjadi semakin egois, dan delusive. Ia berpikir bahwa ia adalah satu-satunya orang yang mampu memimpin Mesir. Mubarak memperkuat sistem pemerintahan otoriter dengan melakukan control terhadap partai politik, birokrasi, dan militer.

Amandemen Konstitusi tahun 1971 merupakan langkah untuk memperkuat posisinya dalam kekuasaan. Setelah pembunuhan Sadat pada tahun 1981, Mubarak memerintah dengan mendapat legitimasi berdasarkan UU No. 162.⁶⁶ Mubarak juga memperluas kekuasaan Kementerian Dalam Negeri dan intelijen yang secara rutin terlibat dalam penyiksaan dan pelanggaran HAM sebagai upaya penegakan aturan. Organisasi Hak Asasi Manusia Mesir melaporkan bahwa antara tahun 1993 dan Desember 2008 terjadi 460 kasus penyiksaan dengan 167 kasus kematian akibat penyiksaan atau perlakuan buruk.⁶⁷

⁶⁶ A. Saikal. 2011. Authoritarianism, Revolution And Democracy: Egypt And Beyond. *Australian Journal of International Affairs Vol.* 65, No. 5, pp. 530544, November 2011.

⁶⁷ Editor. 2011. When Will The Crime of Torture Stop?.Diakses dari http://en.eohr.org/2009/03/11/when-will-the-crime-of-torture-stop/ [5 Januari 2017]

Tabel 2.1. Pelanggaran HAM di Mesir tahun 1993-2009

Torture cases	Death cases	year 1993	
29	6		
33	10	1994	
23	15	1995	
24	7	1996	
20	7	1997	
24	21	1998	
31	10	1999	
13	10	2000	
14	7	2001	
12	12	2002	
45	13	2003	
42	22	2004	
34	17	2005	
30	7	2006	
40	3	2007	
46	17	2008-2009	
460	167	Total	

Sumber: Editor. 2011. When Will The Crime of Torture Stop?. Diakses dari http://en.eohr.org/2009/03/11/when-will-the-crime-of-torture-stop/ [5 Januari 2017]

Laporan pada tabel 2.1 menunjukkan bahwa sebagian besar kasus penyiksaan dan perlakuan buruk dilakukan oleh polisi terjadi setelah penangkapan bahkan sebelum dimulainya proses hukum. Penyiksaan tidak hanya dilakukan terhadap tahanan yang dianggap melakukan kejahatan, bahkan beberapa kasus penyiksaan didasarkan tanpa alasan yang jelas. Bahkan pada tahun 2003, Mesir juga melakukan penangkapan massal terhadap anak-anak jalanan yang kemudian dipukuli dan mendapat kekerasan seksual oleh petugas polisi dan tahanan yang lebih tua. Anak-anak ini tidak melakukan kejahatan, tetapi dianggap "rawan kenakalan" menurut Undang-Undang anak Mesir.⁶⁸

Dalam konteks politik, Mubarak melakukan monopoli dalam pemilu dengan mendesign Mubarak sebagai satu-satunya calon presiden dan panggung politik didominasi oleh Partai Nasional Demokrat (NDP). Dalam pemilu 1999, Mubarak mendapatkan 94% suara mutlak dan pada pemilu 2005 mendapat 88%

_

⁶⁸ Editor. 2003. Charged with being children: Egyptian Police Abuse of Children in Need of Protection. Diakses dari https://www.hrw.org/report/2003/02/18/charged-being-children/egyptian-police-abuse-children-need-protection [5 Januari 2017]

suara mutlak. Partai sekularis nasional yakni partai Wafd yang menjadi kekuatan politik liberal paling populer di Mesir mengalami penurunan popularitas. Dalam pemilu tahun 2005, Ikhwanul Muslimin sebagai salah satu gerakan politik Islam terbesar di Mesir sebenarnya memenangkan 88 kursi di parlemen dari 518 kursi. Namun, pemerintah Mubarak melakukan intimidasi dan kecurangan dengan memanupulasi kekalahan Ikhwanul Muslimin, sehingga pemilihan umum tersebut mendapat kecaman internasional yang luas .⁶⁹

Sementara di Turki, proses demokratisasi diprakarsai oleh Mustofa Kemal sebagai upaya menyelamatkan bangsa Turki. Mustofa Kemal membangkitkan emosi nasionalisme dan kerakyatan (republikanisme) sebagai anti-tesis terhadap Usmani yang mengandalkan emosi agama dan dinastiisme. Mustofa Kemal mengusung ideology republikanisme, nasionalisme, sekularisme, dan modernisme. Jadi, demokrasi dan sekularisme yang dikembangkan Attaturk, sebuah panggilan kehormatan bagi Mustofa Kemal yang berarti Bapak Bangsa Turki. Dan memberlakukan kebijakan sekulerisme, yakni pemisahan agama dalam segala aspek sosial politik. Sehingga Turki mengalami transformasi besar yang mengubah basis agama, sosial, dan budaya masyarakat serta struktur politik dan ekonomi menuju era demokratisasi.

Demokrasi di Turki merupakan hasil dari *revolution from above* yang dikawal dengan bayonet. Pada periode 1923-1935, reformasi dilakukan dalam kehidupan budaya, hukum dan sosial. Selain itu, tidak adanya program politik yang dicanangkan sangat membantu Ataturk memaksimalkan otoritasnya. Sehingga kepemimpinan Ataturk terkenal dengan otoritarianisme sekuler. Partai Republik Rakyat adalah partai tunggal yang berkuasa selama 14 tahun pemerintahan Attaturk. Selanjutnya, Ismet Inonu terpilih sebagai presiden pada tahun 1938 dan menerapkan kebijakan netral dalam menyikapi pecahnya Perang Dunia II. Meskipun Turki menerima bantuan luar negeri dari Amerika Serikat setelah tahun

_

⁶⁹ Alaa Al-Din Arafat. 2009. *The Mubarak Leadership and Future of Democracy in Egypt*. New York: Palgrave Macmillan. Hal. 134

1941 dan mendapat tekanan dari pihak Sekutu, Turki baru menyatakan perang terhadap Jerman dan Jepang pada Februari 1945.⁷⁰

Dalam pemilu tahun 1950, partai pemerintah dikalahkan dan Celal Bayar, pemimpin partai Demokrat yang didirikan pada 1946, dengan Adnan Menderes sebagai perdana menteri. Dibawah Menderes, pada tahun 1952 Turki menjadi anggota penuh dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Amerika Serikat kemudian membangun pangkalan udara dan rudal di wilayah Izmir dan Adana. Turki juga menandatangani pakta pertahanan militer dengan Yugoslavia dan Yunani (Pakta Balkan).⁷¹

Turki mendapat bantuan Marshall Plan yang menjadikan ekonomi Turki berkembang setelah tahun 1950. Pasca memperoleh Marshal Plann, investor asing semakin tertarik dengan undang-undang investasi yang menguntungkan. Karena dianggap berhasil, pemerintah Menderes kembali berkuasa pada tahun 1954 dan 1957. Namun dengan kondisi krisis ekonomi yang belum terselesaikan. Muncul ketidakpuasan terhadap rezim pemerintah menyebabkan berlakunya undang-undang pembatasan dari pemerintah. Banyak wartawan terkemuka dipenjara dan ketegangan meletus pada April 1960 ketika mahasiswa berdemonstrasi menentang pemerintah. Upaya untuk menekan kekacauan ini dipimpin langsung oleh junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Cemal Gürsel. Kekacauan yang terjadi menyebabkan terjadinya kudeta militer pada 1960.⁷²

Pembatasan terhadap demokrasi dan ruang-ruang kesempatan politik selama tahun 1950-an menyebabkan munculnya banyak kelompok sosial terbentuk untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka dan memunculkan gerakan-gerakan Islam melalui partai politik. Kudeta militer memunculkan seperangkat institusi politik yang dimaksudkan untuk melestarikan kemurnian ideologi nasionalis dari ancaman ideology Islamis. Hal ini diatur dalam konstitusi 1961 yang terkandung dua prinsip. Pertama, militer berusaha untuk

⁷² *Ibid*. Hal. 63

M. Hakan yavuz. 2003. Islamic Political Identity In Turkey. New York: Oxford University Press. Hal. 60

⁷¹ *Ibid*. Hal. 61

mendepolitisasi masyarakat sipil dengan membentuk kekuatan dalam birokrasi. Kedua, mereduksi upaya monopoli dalam kehidupan politik melalui dibentuknya banyak partai politik. Jendral Gürsel terpilih sebagai presiden dan Ismet Inonu kembali menjadi perdana menteri dalam pemerintahan koalisi. Setelah kalah di parlemen, Ismet Inonu mengundurkan diri pada tahun 1965 dan digantikan oleh Suat Hayri Ürgüplü.⁷³

Pada tahun 1969, Suleyman Demirel memenangkan pemilu. Namun pada masa pemerintahnya tidak stabil disebabkan oleh adanya kerusuhan sipil. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik antara kelompok sayap kiri dan sayap kanan serta munculnya gerakan separatis di Kurdi. Perselisihan sipil terus terjadi diikuti oleh suksesi perdana menteri pada awal 1970-an. Pada periode yang sama, perekonomian Turki juga mengalami kebekuan. Dikombinasikan dengan ketegangan antara berbagai kepentingan politik, situasi ini memicu Jenderal Memduh Tagmac untuk mengirimkan nota kepada Perdana Menteri Suleyman Demirel berisi tudingan bahwa pemerintah tidak berhasil menciptakan order. Ia yang mendesak berdirinya pemerintahan kuat dan berwibawa bersandar kepada pandangan-pandangan Ataturk. Nota tersebut membuat Demirel mundur, sehinga terjadi kudeta militer kembali pada 12 Maret 1971. Pihak militer tidak berkuasa secara langsung, tapi mengawasi serangkaian pemerintahan transisi yang berlangsung hingga 1973.⁷⁴

Pada tahun 1973, Fahri Korutürk berhasil menjadi presiden Turki dan Bulent Ecevit dari partai Rakyat Republik menjadi perdana menteri pada tahun 1974. Antara tahun 1975 dan 1980, Demirel dan Ecevit berganti-ganti sebagai kepala pemerintahan sementara kondisi ekonomi dan sosial memburuk. Pada tahun 1980 kudeta militer dinyatakan setelah kekerasan sipil terjadi yang memakan korban lebih dari 2.000 jiwa. Jenderal Kenan Evren kemudian menguasai pemerintah . Konstitusi baru disetujui pada tahun 1982 untuk membentuk kembali parlemen unikameral dengan ketentuan bahwa Evren akan

-

⁷³ *Ibid*. Hal. 64

⁷⁴ *Ibid*. Hal. 88

tetap sebagai kepala negara sampai pada tahun 1989. Konstitusi juga memberi peluang militer untuk ikut campur dalam hal-hal sipil dan memiliki otonomi dalam urusan militer.⁷⁵

Pada tahun 1983 Turgut Özal, menjadi perdana menteri. Pada tahun 1987 darurat militer telah dicabut, kecuali di empat provinsi yang didominasi oleh suku Kurdi dimana gerilya kampanye oleh separatis Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dimulai sejak pertengahan 1980-an. Pada tahun 1989, Özal berhasil menggantikan Evren sebagai presiden. Selama Perang Teluk Persia (1991), Turki diperbolehkan Amerika Serikat untuk meluncurkan serangan udara terhadap Irak dari Turki. Meskipun perang menyebabkan dislokasi besar-besaran penduduk Kurdi di Irak, Turki melakukan penutupan perbatasan secara besar-besaran sebagai upaya untuk menghindari peningkatan nasionalisme Kurdi. 76

Ketika Presiden Özal meninggal pada tahun 1993 kemudian digantikan kembali oleh Demirel, dan Tansu Çiller menjadi perdana menteri wanita pertama. Setelah ledakan ekonomi di akhir 1980-an, inflasi yang tinggi, hutang luar negeri yang besar, dan dampak dari pengeluaran anggaran yang defisit menyebabkan krisis keuangan di tahun 1994. Stabilitas sosial terganggu, dan gerakan fundamentalis Islam menjadi semakin populer. Ditambah dengan perseteruan antara pemerintah dan gerakan separatis Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang semakin memanas dan memakan banyak korban di kedua belah pihak. Sehingga menyebabkan Turki mendapat perhatian dari pemerhati HAM internasional telah melakukan kekejaman terhadap warga sipil, termasuk penghancuran desa-desa sebagai upaya untuk menolak Kurdi dan melakukan penyiksaan serta eksekusi mati.

Pada tahun 1996, Necmettin Erbakan terpilih sebagai perdana menteri Turki. Erbakan berhasil mendirikan kabinet dari kubu Islam Turki. Untuk mengatasi krisis, kebijakan Ekonomi Erbakan mengedepankan tiga kebijakan

⁷⁵ Nasser Momayezi. 1998. Civil-Military Relations In Turkey. *International Journal on World Peace, Vol. 15, No. 3 (September 1998), pp. 3-28*

⁷⁶ Hakan Yavuz. *Op.Cit.* 75

utama. Pertama, Mengeluarkan Turki dari cengkeraman Dana Moneter Internasional (IMF). Kedua, menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran Turki, yang tidak pernah dilakukan oleh rezim sebelumnya. Ketiga meningkatkan kerjasama negara Islam dengan mendirikan organisasi kerjasama negara Islam D-8. Erbakan menilai kebijakannya ini memicu kekhawatiran rezim Zionis, karena mengancam kepentingan Israel. Sehingga hal tersebut dianggap sebagai kesuksesan Erbakan sebagai perdana menteri.

Dalam mengamati dinamika politik dan pemerintahan di Mesir dan Turki pada kurun waktu 1950an hingga 2000an, ditemukan bahwa militer menjadi salah satu actor yang berpengaruh dalam mengawal rezim politik. Proses demokratisasi yang disebutukan Huntington tidak terjadi dalam kurun waktu tersebut. Bahkan rezim pemerintah di Mesir dan Turki melakukan manipulasi terhadap demokrasi. Di Mesir, ketika presiden Sadat mengeluarkan kebijakan liberalisasi tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kehidupan politik yang demokratis. Kebijakan infitah hanya digunakan sebagai strategi politik yang diharapkan dapat menopang kekuasaan Sadat. Implikasinya adalah instabilitas kondisi sosialekonomi. Demikian juga di Turki, kebijakan sekularisme Mustafa Kemal hanya mengantarkanya untuk menjadi otoriter. Ia memang mengadopsi nilai-nilai barat tentang keadilan yang bisa diciptakan melalui prinsip sekularisme. Namun ia tetap menerapkan dominasi dan represi bagi rakyat Turki yang tidak patuh terhadap prinsip sekularisme.

2.3 Ekonomi-Politik Mesir dan Turki

Mesir menganut sistem ekonomi campuran dan menikmati pertumbuhan yang cukup stabil rata-rata 3% hingga 5% dalam seperempat abad terakhir. Dinamika pembangunan ekonomi mengalami perkembangan melalui peran sektor publik dan swasta yang berbeda-beda di beberapa periode. Pada periode 1952-1966 dilakukan substitusi impor dan nasionalisasi. Dimana program industrialisasi pertama pada tahun 1957 dipengaruhi oleh sektor publik pada industri berat seperti besi dan baja, industri kimia, dan mesin berat. Nasionalisasi juga

mengurangi kepentingan relatif dari sektor swasta. Tidak ada perdagangan saham dan semua bank dan lembaga keuangan berada di bawah sektor public dan investasi asing langsung hampir dilarang.

Ekonomi Mesir di bawah Presiden Gamal Abdel Nasser adalah ekonomi terencana yang terfokus pada substitusi. Hal ini dilakukan untuk memperluas produksi lokal untuk menggantikan impor asing dan dengan demikian meningkatkan kemandirian ekonomi negara. Tujuan negara adalah untuk melindungi industri-industri besar dari korporasi asing melalui hambatan tariff. Untuk industri tertentu, produsen sektor publik diberikan pinjaman konsesi, subsidi input, dan kontrak-kontrak pemerintah. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, impor-expor harus dengan negara-negara dan perusahaan yang disetujui oleh pemerintah⁷⁷.

Di era perang pada periode 1967-1973 berdampak buruk terhadap kinerja perekonomi pada sektor publik di substitusi impor. Di era keterbukaan politik pada periode 1974-1985, kebijakan difokuskan untuk mendorong investasi Arab dan asing melalui serangkaian insentif dan liberalisasi perdagangan. Pembangunan ekonomi bertumpu pada pengembangan pariwisata dan industri tekstil, industri manufaktur. Hasilnya ekonomi dapat tumbuh tapi bersifat tidak berkelanjutan.

Reformasi ekonomi berkelanjutan dilakukan pada periode 1991-2007. Kebijakan reformasi diperkenalkan untuk memenuhi persyaratan dari lembaga-lembaga internasional pemberi pinjaman dan donor. Termasuk insentif yang lebih luas untuk peran sektor swasta dalam semua kegiatan ekonomi. Melalui reformasi ekonomi yang komprehensif dimulai pada tahun 1991, Mesir banyak membebaskan kontrol harga, mengurangi subsidi, mengurangi inflasi, memotong pajak, dan meningkatkan perdagangan sebagian upaya liberalisasi dan investasi. Industri manufaktur menjadi kurang dominan pada sektor publik terutama di industri berat. Reformasi sektor publik dan privatisasi telah meningkatkan peluang

_

⁷⁷ Bruce K. Rutherford. *Egypt after Mubarak : liberalism, Islam, and democracy in the Arab world.* United Kingdom: Princeton University Press, Hal. 251

bagi sektor swasta. Sektor pertanian mengalami deregulasi ditangan pihak swasta dengan pengecualian dari produksi kapas dan gula. Konstruksi, jasa non-keuangan, dan perdagangan domestic sebagian besar juga dijalankan pihak swasta.

Pada tahun 1990-an, Mesir mendapat bantuan dana IMF sebagai bentuk pinjaman luar negeri untuk membantu Mesir meningkatkan makroekonomi. Sejak tahun 2000, laju reformasi struktural termasuk kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perpajakan, privatisasi dan peraturan perundang-undangan bisnis baru membantu Mesir bergerak ke arah ekonomi yang berorientasi pasar dan mendorong peningkatan investasi asing. Reformasi dan kebijakan telah memperkuat ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi menguat rata-rata 8% per tahun antara tahun 2004 hingga 2009. Namun pemerintah gagal memperbaiki ekonomi mikro sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Terutama akibat munculnya masalah pengangguran⁷⁸.

Tabel 2.2. Indikator Makroekonomi Mesir

	2008	2009	2010	2011 (p)	2012 (p)
Real GDP growth	7.2	4.7	5.1	1.6	5
CPI inflation	11.7	16.2	11.7	13.4	12.2
Budget balance % GDP	-6.8	-6.6	-8.1	-9.8	-9.4
Current account % GDP	0.8	-2.3	-2	-3.2	-2.9

Sumber: Data from Central Bank of Egypt (CBE) and CAPMAS

Tabel diatas menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi dibawah rezim yang otoriter tidak menunjukkan progress yang signifikan. Tingkat pertumbuhan

_

⁷⁸Ibid . Hal 197-198

produk domestik bruto riil hanya 1,6% pada tahun 2011, lebih rendah daripada tahun 2010 yakni sebesar 5,1%. Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan hanya berkisar antara 1,7% hingga 2,5%. Hal tersebut berarti bahwa GDP mengalami penurunan dari tahun 2008 hingga 2012. Inflasi juga menembus angka 11,7% pada 2008 dan mengalami puncak depresiasi pada tahun berikutnya. Meskipun pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 11.7%, namun meningkat kembali pada dua tahun selanjutnya.

Pasca krisis keuangan Global pada 2008 hingga 2011 terjadi kenaikan harga pangan. Hal ini menyebabkan pemerintah harus memberikan bantuan untuk masyarakat lebih dari 40% sebagai langkah awal dalam upaya kebijakan reformasi sector pertanian. Mesir menerima dampak serius dari krisis keuangan global bagi perekonomian nasional. Mesir juga gagal mendorong pertumbuhan ekonomi mikro dan kemiskinan meningkat menjadi sekitar 50% pada tahun 2011 yang menyebabkan ketidakstabilan politik sosial ekonomi.

Persepsi kondisi ekonomi di Mesir telah cukup buruk untuk beberapa waktu. Dalam jajak pendapat Pew Research, hanya pada tahun 2007, sebesar 53% masyarakat Mesir memiliki pandangan positif terhadap perekonomian negara, namun sebesar 46% masyarakat berpikir ekonomi dalam keadaan buruk⁷⁹. Ekonomi Mesir masih menderita kemerosotan yang parah setelah revolusi 2011 dan pemerintah menghadapi berbagai tantangan bagaimana untuk memulihkan pertumbuhan pasar dan kepercayaan investor. Ketidakpastian politik dan kelembagaan, menimbulkan persepsi meningkatnya ketidakamanan dan kerusuhan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebesar 76% masyarakat Mesir mengatakan bahwa kondisi ekonomi pada 2011 buruk. Revolusi 2011 juga membawa dampak rendahnya investasi langsung, defisit anggaran yang tinggi,

⁷⁹ 2014. *One Year after Morsi's Ouster, Divides Persist on El-Sisi, Muslim Brotherhood.* Diakses pada http://www.pewglobal.org/2014/05/22/chapter-1-national-conditions-in-egypt/ [11 Oktober 2016]

tingkat utang yang tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat kemiskinan tinggi, dan standar hidup yang rendah.⁸⁰

Sementara di Turki, selama tahun 1940-an perekonomian mengalami stagnasi, sebagai akibat menjaga netralitas selama Perang Dunia II. Perang Dunia II juga meningkatkan pengeluaran militer sementara mayoritas negara-negara membatasi perdagangan luar negeri. Setelah 1950 negara mengalami gangguan ekonomi sekitar sekali satu decade. krisis paling serius terjadi di akhir 1970-an. Meningkatnya angka impor mengakibatkan krisis neraca pembayaran. Devaluasi program lira dan penghematan Turki dirancang untuk meredam permintaan domestik untuk barang asing dilaksanakan sesuai dengan pedoman IMF. Meskipun intervensi militer tahun 1960 dan 1971 bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Turki, namun dengan tidak adanya reformasi struktural yang serius, Turki mengalami deficit anggaran dan menyebabkan kenaikan hutang luar negeri pada tahun 1980.

Pada 1980, ekonomi Turki mencapai krisis terburuk sejak jatuhnya Kekaisaran Ottoman. Pemerintah Turki gagal mengambil langkah-langkah untuk merespon kenaikan tajam harga minyak dunia pada 1973-1974. Pada 1979 inflasi telah mencapai tingkat tiga digit, pengangguran meningkat menjadi 15 persen, industri mengalami kemacetan, dan pemerintah tidak mampu membayar pinjaman luar negeri. Pada bulan Januari 1980, Perdana Menteri Suleyman Demirel mulai menerapkan program reformasi yang luas yang dirancang oleh Turgut Özal. Strategi Özal mengeluarkan kebijakan substitusi impor diganti dengan kebijakan yang dirancang untuk mendorong ekspor untuk bisa membiayai impor.

Dengan strategi ini, diharapkan Turki bisa memulihkan pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh ekspor dalam jangka panjang. Pemerintah memberlakukan serangkaian kebijakan ekonomi yakni: devaluasi lira Turki, pemeliharaan suku bunga riil positif dan kontrol ketat dari pasokan uang dan

80 Doaa S. Abdou & Zeinab Zaazou. 2013. *The Egyptian Revolution And Post Socio-Economic Impact*. Journal of Middle Eastern and African Economies Vol. 15, No. 1, May 2013

⁸¹Nilgun Onder. 1990. *Turkey's experience with corporatism. Theses and Dissertations* (*Comprehensive*). Hal. 62.Diakses pada http://scholars.wlu.ca/etd/62 [9 Oktober]

kredit, penghapusan sebagian subsidi dan pembebasan harga yang dikenakan BUMN, reformasi sistem pajak, dan mendorong masuknya investasi asing. Program liberalisasi tersebut mengatasi krisis neraca pembayaran. Hal tersebut juga berdampak pada kemampuan Turki untuk mendapat pinjaman dari pasar modal internasional, dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi baru. Ekspor barang tumbuh dari 2,3 miliar dolar menjadi 8,3 miliar dolar. Pertumbuhan impor dari 4,8 miliar dolar menjadi 11,2 miliar dolar. Kebijakan Özal ini memiliki dampak yang sangat positif pada neraca jasa dari transaksi berjalan. Investasi asing mulai tumbuh, meskipun menunjukkan pertumbuhan yang sederhana di pertengahan 1980-an. 82

Penurunan belanja publik menyebabkan pelambatan ekonomi tajam di akhir 1970-an dan awal 1980-an. Produk nasional bruto menurun 1,5 persen pada tahun 1979 dan 1,3 persen pada tahun 1980. Sektor manufaktur dan jasa merasa jauh dari dampak dari penurunan pendapatan ini, dengan sektor manufaktur yang beroperasi di hampir 50 persen dari total kapasitas. Antara tahun 1981 dan 1985, GNP (Gross National Product) tumbuh 3 persen per tahun, yang dipimpin oleh pertumbuhan di sektor manufaktur. Dengan kontrol yang ketat pada pendapatan dan kegiatan pekerja, sektor industri difokuskan pada pengembangan kapasitas industri yang menghasilkan output dengan tingkat rata-rata 9,1 persen per tahun antara tahun 1981 dan 1985. Devaluasi lira juga membantu ekonomi Turki lebih kompetitif. Akibatnya, ekspor manufaktur meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 45 persen per tahun selama periode ini.⁸³

Pengangguran dan inflasi tetap masalah serius meskipun tingkat pengangguran turun dari 15 persen pada tahun 1979 menjadi 11 persen pada tahun 1980. Namun karena pesatnya pertumbuhan angkatan kerja, pengangguran meningkat lagi sampai 13 persen pada tahun 1985. Inflasi turun menjadi sekitar 25 persen pada periode 1981-1982. Namun naik kembali lebih dari 30 persen pada tahun 1983 dan lebih dari 40 persen di tahun 1984. Meskipun inflasi agak mereda

⁸²Op. Cit Hakan Yavuz. Hal. 89-90

⁸³ *Op.Cit* Hakan Yavuz. Hal. 89-90

pada tahun 1985 dan 1986, itu tetap menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi para pembuat kebijakan ekonomi.⁸⁴

Ekonomi Turki kembali memburuk dikarenakan Perang Teluk Persia pada 1991. Embargo PBB di Irak menyebabkan ekspor minyak melalui pipa Kirkuk-Yumurtalik menjadi macet yang merugikan Turki. Selain itu Turki mengalami kerugian sebanyak 3 miliar dolar yang disebabkan karena perdagangan dengan Irak. Dengan akses terbatas ke Teluk Persia, Irak juga sangat bergantung pada Turki untuk rute ekspor minyak mentah. Kapasitas pipa mencapai sekitar 1,1 juta barel per hari. Namun Turki mengalami kerugian mencapai sekitar 300 juta dolar hingga 500 juta dolar . Sehingga Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi pihak yang menyelamatkan Turki dari kerugian ini. Sehingga, pada tahun 1992 ekonomi Turki mulai mengalami pertumbuhan kembali.

Pada tahun 1992 dan 1993, pemerintah menggunakan kesempatan ini untuk menarik dana internasional untuk menutupi defisit anggaran. Obligasi internasional selama periode ini sebesar 7,5 miliar dolar. Arus modal ini membantu mempertahankan nilai tukar yang terlalu tinggi. Namun pinjaman luar negeri pemerintah menekan suku bunga domestik. Hal ini mengakibatkan bankbank komersial mencari pinjaman luar negeri dan kemudian meminjamkan pada tingkat domestik dengan suku bunga lebih tinggi tanpa memperhitungkan dampak depresiasi mata uang. Akibatnya, hutang jangka pendek luar negeri Turki meningkat tajam. Kepercayaan investor dalam dan luar negeri terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi kemudian menurun.⁸⁵

Memasuki tahun 2000-an, Turki menjadi negara terbesar ke-18 dunia dilihat dari nominal GDP.⁸⁶ Pada periode yang sama, Turki menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pada tahun 2000-2001, Bantuan dana IMF

-

⁸⁴ Op. Cit Hakan Yavuz. Hal. 89-90

Mete Feridun. 2008. Currency crises in emerging markets: The case of post-liberalization Turkey. The Developing Economies, 46 (4). Hal. 386-427. ISSN 1746-1049 (doi:10.1111/j.1746-1049.2008.00071.x)

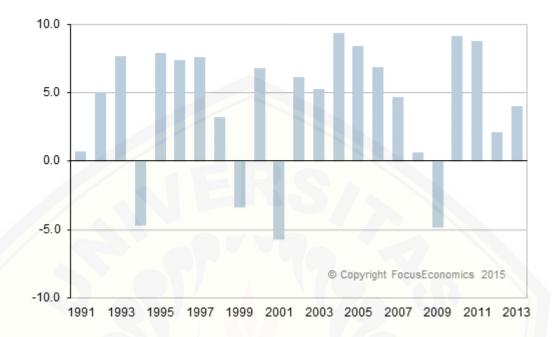
⁸⁶ Carol Migdalovitz. 2010. *Turkey: Politics of Identity and Power*. Diakses pada www.crs.gov [13 Oktober 2016]

berhasil membantu Turki untuk melakukan reformasi ekonomi. Reformasi tersebut beru upaya penguatan mata uang, memperkuat sistem perbankan, dan menciptakan bank sentral yang independen. Privatisasi beberapa perusahan juga dijalankan. Pertumbuhan ekonomi melalui PDB antara tahun 2002 dan 2008 mencapai rata-rata 4% per tahun. Fejak 2003, pemerintah mengadopsi program penghematan untuk menurunkan inflasi dan mengurangi defisit anggaran. Kredibilitas, transparansi dan prediktabilitas merupakan prinsip ekonomi yang dijalankan antara 2002 dan 2012. Kebijakan ekonomi pemerintah terkonsentrasi pada privatisasi komprehensif BUMN. Pada tahun 2009 pemerintah Turki juga memperkenalkan langkah kebijakan untuk menstimulus ekonomi untuk mengurangi dampak krisis keuangan global pada 2007-2012. Kebijakan tersebut meliputi pemotongan sementara pajak pada mobil, dan perumahan. Akibatnya produksi barang-barang konsumsi meningkat sebesar 7,2%, meskipun mengalami penurunan produksi otomotif. Pasar Saham dan kredit Turki menunjukan respon positif.

_

⁸⁷ *Op.Cit.* Carol Migdalovitz. Hal. 2

⁸⁸ Erdal Tanas Karagöl. *The Turkish Economy During the Justice and Development Party Decade*. Diakses pada http://file.insightturkey.com/Files/Pdf/03_karagol_3_w.pdf . Hal. 119-120. [13 Oktober]



Grafik. 2.1 GDP Turki Tahun 1965-2015

 $Sumber: GDP\ in\ Turkey.\ http://www.focus-economics.com/country-indicator/turkey/gdp$

Berdasarkan tabel 2.2, pertumbuhan GDP Turki cukup fluktuatif. Periode 2001 hingga 2006 pertumbuhan ekonomi Turki mengesankan dengan rata-rata mencapai 9%. Namun terjadi penurunan pada periode 2007 hingga 2009. Hal ini tidak terlepas dari ketidakpastian ekonomi global dan menyebabkan krisis 2008. Namun Turki berhasil kembali bangkit pada periode 2011 hingga 2013.

Proses aksesi terhadap Uni Eropa menjadi hal yang diperhitungkan dalam proses pembentukan kebijakan ekonomi Turki. Uni Eropa adalah mitra ekonomi terbesar di Turki yang mempengaruhi 40 persen dari perdagangan Turki. Turki mendapatkan manfaat secara signifikan dari proses untuk integrasi ke Uni Eropa dalam aspek ekspor-impo. Turki menjadi kandidat calon anggota Uni Eropa penuh sejak KTT Helsinki pada tahun 1999. Kemudian negosiasi aksesi dimulai pada Oktober 2005, namun sejumlah kendala politik menjadi hambatan utama proses tersebut. Kedua belah pihak melakukan upaya untuk mendapatkan kembali

momentum negosiasi dengan fokus pada kerja sama ekonomi, khususnya kerjasama di bidang energi.

Reformasi kebijakan ekonomi memperkuat pertumbuhan ekonomi ratarata 6% per tahun sampai 2008. Kondisi ekonomi global dan kebijakan fiskal yang ketat menyebabkan PDB mengalami fluktuasi hingg tahun 2009. Setelah krisis keuangan global pada tahun 2008, ekonomi Turki meningkat 9,2% pada 2010 dan 8,5 persen pada tahun 2011. Namun PDB kembali menurun pada 2012 sebesar 2,1%. Selanjutnya, tren positif pertumbuhan PDB sebesar 4,4% pada 2013 dan menurun sebesar 2,9% pada 2014. Pertumbuhan melambat pada kuartal terakhir 2014, sebagian besar karena permintaan konsumen meningkat baik di dalam negeri dan di Eropa. Pertumbuhan ekonomi menjadi 3,9 persen pada tahun 2015, jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Meskipun kepercayaan konsumen menurun akibat ketidakpastian pemilu, konsumsi swasta menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi, berkat penurunan harga minyak yang signifikan.⁸⁹

Kondisi geopolitik, demokratisasi, dan dinamika ekonomi politik diatas akan menjadi bahan pendukung untuk analisis pada bab-bab selanjutnya. Pertentangan antara sipil-militer, kuatnya sistem sosial sektarian, dan pengaruh naik-turunya kondisi perekonomian menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi kebangkitan politik Islam dan menjelaskan perubahan-perubahan politik yang terjadi selnajutnya.

_

⁸⁹ Ibid

BAB 3

KEBANGKITAN POLITIK ISLAM DI MESIR DAN TURKI

Kebangkitan Islam di abad modern dimulai pada tahun 1970-an dan merupakan periode revivalism gerakan Islam. Kemunculan dan perkembangan kebangkitan Islam disebabkan karena adanya kejenuhan negara-negara Timur terhadap propaganda universalitas kebudayaan Barat. Faktor-faktor keyakinan (agama), kebudayaan, struktur sosial, tradisi, asumsi-asumsi politik, maupun pandangan hidup menjadi faktor yang mengubah cara pandang Timur dalam menjalankan sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, dan sistem sosial budaya.⁹⁰ Kebangkitan Islam ditandai dengan beberapa peristiwa penting. Pada tahun 1973 terjadi perang Oktober atau perang Yom Kippur. Perang tersebut melibatkan negara-negara Islam yakni Mesir, Libya, Suriah, dan Irak melawan negara zionis Israel. Perang tersebut terjadi karena Israel menolak mengembalikan wilayah yang mereka rebut dari Suriah dan Mesir. Meskipun pasukan negara-negara Arab kalah, namun perang tersebut menjadi penanda bangkitnya Islam. Pasukan Mesir dipimpin oleh presiden Anwar Sadat, berhasil memobilisir serta memotivasi pasukan Mesir dengan simbol-simbol dan retorika Islam. Sehingga menjadi awal kembalinya kepercayaan diri umat Islam untuk melawan Israel dan barat.

Selanjutnya, embargo minyak Arab pada 1973 juga menjadi faktor kedua bagi kebangkitan Islam. Melimpahnya sumberdaya energi di semenanjung Arab digunakan sebagai alat *bargaining* politik. Melalui Petro Dollar, Negara-negara seperti Saudi Arabia, Libya, dan Uni Emirat Arab menggunakan minyak sebagai kekuatan politik. Dan puncaknya adalah Revolusi Islam Iran pada tahun 1978 hingga 1979 yang dianggap sebagai barometer kebangkitan Islam bagi kelompok Sunni maupun Syiah. Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin Revolusi Islam Iran

⁹⁰ Samuel P. Huntington. 2003. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Qalam. Hal. 185

berhasil meyakinkan publik internasional bahwa revolusi Islam di Iran bukan hanya agenda kaum Syiah tapi juga berlaku bagi seluruh umat Islam di dunia.⁹¹

Revolusi Islam yang menggulingkan monarki Iran pada tahun 1979 adalah salah satu revolusi populer pertama melawan sistem politik otoriter modern di akhir abad kedua puluh. Pada awal 1990-an, gerakan Islam lainya, seperti *Islamic Salvation Front* (FIS), mulai menentang rezim otoriter *Front de Liberation Nationale* (FLN) di Aljazair dan akhirnya pemerintah berhasil dipaksa untuk mengadakan pemilihan terbuka. Di banyak negara di dunia Muslim, salah satu isu penting yang menentukan masa depan politik adalah hubungan antara kekuatan kebangkitan Islam dan pengembangan sistem politik yang demokratis.

Dalam kontek Mesir dan Turki, kebangkitan Islam ditandai dengan keberanian organisasi masyarakat Islam dalam mengambil ruang-ruang politik. Di Mesir, Pada tahun 1967 setelah koalisi negara-negara Arab menderita kekalahan di tangan Israel dalam Perang Enam Hari. Mesir kehilangan Semenanjung Sinai dan Terusan Suez, yang merupakan sumber penting pendapatan negara. Hal ini menyebabkan ulama menafsirkan bahwa kekalahan Mesir adalah sebagai hukuman Allah karena rezim pemerintah telah menjauhi agama dan melakukan penganiayaan terhadap kelompok Islam. Menyadari hal tersebut, Nasser berusaha untuk menampilkan identitas muslimnya dengan melakukan kegiatan keagamaan.

Sedangkan di era Sadat, ia merangkul agama sebagai aspek penting bagi pendukung rezimnya. Sebagai upaya dari liberalisasi, Sadat juga memprakarsai upaya pembebasan tahanan politik termasuk Ikhwanul Muslimin, pada awal 1970-an, dan partai oposisi diizinkan untuk beroperasi, sehingga pada tahun 1973, Ikhwanul Muslimin memulai untuk mengambil ruang-ruang dakwah, terutama di kalangan mahasiswa.

Dengan kemenangan Mesir dalam perang Yom Kippur pada tahun 1973, Mesir merasa bahwa kehormatan nasional mereka telah dipulihkan. Namun, Sadat dikritik karena melakukan pemulihan hubungan dengan Barat, khususnya

_

⁹¹ John L. Espostito. 2010. Islam The Straight Path. Jakarta: Paramadina. Hal. 214

Amerika Serikat, dan kebijakan tentang *infitah* (liberalisasi ekonomi) hanya menguntungkan beberapa pihak seperti pengusaha dan kelas menengah ke atas. Selain itu, perjanjian perdamaian dengan Israel dianggap sebagai sebuah penghianatan terhadap umat muslim. Ikhwanul Muslimin melalui medianya *Al-Dakwah* mengkritik hal tersebut dan segera mulai menyerang kebijakan Sadat. Namun hal tersebut justru membuat Sadat menjadi semakin otoriter, sehingga pada tanggal 6 Oktober, Sadat dibunuh selama parade militer digelar yang merupakan ulang tahun dari perang 1973.⁹²

Perubahan sosial yang disebabkan sikap liberal Sadat terhadap partai politik memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kelompok Islam pada tahun 1970-an. Misalnya, *Jamaat al Islamiyah* menyebar cukup cepat di kampuskampus dan memenangkan sampai sepertiga dari semua pemilihan serikat mahasiswa. kemenangan ini merupakan peluang untuk mengkampanyekan nilainilai Islam seperti penggunaan jilbab bagi perempuan, pemisahan kelas berdasarkan gender. Selama tahun 1980, Islam secara bertahap menguasai perguruan tinggi. Asyut University merupakan salah satu tempat konflik antara kelompok Islam dan non Islam (termasuk aparat keamanan, sekularis, dan Koptik).

Pada tahun 1989, kelompok Islam konservatif berusaha untuk membuat komunitas berdasarkan visi mereka tentang tatanan sosial Islam. Mereka menolak konsep sekulerisme sebagai solusi terhadap masalah sosial ekonomi Mesir. Mereka menganggap bahwa penyebab kemiskinan adalah buruknya kualitas spiritual (iman) Islam rakyat Mesir, sekularisme, dan korupsi. Solusinya adalah kembali ke kesederhanaan, kerja keras, dan kemandirian kehidupan Muslim sebelumnya. Islamis menciptakan jaringan alternatif mereka sendiri melalui

⁹² Helen Chapin Metz. 1990. *Egypt: A Country Study*. Washington: GPO for the Library of Congress, 1990.

⁹³ Ibid

63

lembaga-lembaga sosial dan ekonomi di mana anggota mereka bisa bekerja, belajar, dan menerima perawatan medis di lingkungan Islam.⁹⁴

Setelah awal 1970-an, kebangkitan Islam menarik pengikut dari spektrum yang luas dari kelas sosial. Sebagian aktivis mahasiswa atau lulusan baru, pemuda kelas menengah perkotaan yang ayahnya adalah pegawai pemerintah tingkat menengah atau profesional. Pada umumnya dari kalangan bidang studi kedokteran, teknik, ilmu militer, dan farmasi yang merupakan ilmu populer di sistem universitas. Sehingga kelompok Islam merupakan kelopok dari kelas menengah, kelas menengah ke bawah, dan kelas pekerja perkotaan. 95

Berbagai kelompok Islam konservatif menggunakan berbagai cara untuk mencapai agenda politik mereka. Salah satunya dengan menggabungkan syariah ke dalam kode hukum negara. Karena pengaruh kelompok Islam konservatif semakin kuat, Departemen Kehakiman pada tahun 1977 menerbitkan sebuah rancangan undang-undang yang berisi penerapan hukuman Islam tradisional untuk menindaklanjut kasus kejahatan, seperti rajam untuk perzinahan dan potong tangan untuk pencurian. Pada tahun 1980 Kelompok ini juga mendukung referendum yang mengususlkan amandemen konstitusi yang bertujuan menggunakan syariah Islam sebagai satu-satunya sumber hukum. ⁹⁶

Pengaruh Islam sempat berkurang pasca pembunuhan Sadat pada tahun 1981. Namun keikutsertaan sembilan anggota Ikhwanul Muslimin pada pemilu untuk Majelis Rakyat pada tahun 1984 kembali memicu munculnya gerakan Islamis. Menguasai Majelis Rakyat adalah tujuan bertahap dengan tujuan jangka panjang mengubah semua hukum yang ada agar tidak bertentangan dengan syariah Islam. Reformasi kode hukum ini mendapat dukungan dari banyak umat Islam yang ingin memurnikan masyarakat dan menolak aturan hukum Barat di Mesir pada abad kesembilan belas dan kedua puluh. 97

95 Ibid

⁹⁴ Ibid

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Ibid

Sedangkan di Turki, Salah satu konsekuensi paling signifikan dari kelahiran Republik Turki di bawah Mustafa Kemal adalah menguatnya eksistensi gerakan Islam tradisional. Di Turki, gerakan kebangkitan Islam terkenal dengan sebutan *Sufi Orders*. Gerakan *Sufi Orders* ini diprakarsai oleh tarekat Naksibendi. Meskipun harus berhadapan dengan rezim otoriter Mustafa Kemal, Islam dimanifestasikan dengan ekspresi spiritualitas batin. Jadi, gerakan *Sufi Orders* ini menggunakan masjid untuk melakukan kegiatan keagamaan. Ideologi Kemalis dan sekularisme negara dianggap mengancam dimensi etika dan spiritual dari kehidupan manusia. Gerakan Naksibendi diperkuat dengan tujuan kebangkitan Islam sebagai pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, politik. sehingga pemaksaan diterapkanya ideolog sekuler Turki menyebabkan peningkatan aktivitas gerakan Islam, etnis, partai politik, dan menimbulkan pertentangan kelas.

Sementara itu, gerakan Islam politik diwakili oleh gerakan Milli Görüs, yakni gerakan pandangan nasional yang muncul pada tahun 1970-an yang menganggap berjalannya negara harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Terbentuknya partai politik Islam juga berawal dari pandangan nasional ini. Pada awalnya, Milli Görüs dibentuk oleh anggota kelompok Naksibendi. Tapi dalam prakteknya, gerakan ini diisi oleh berbagai kelompok Islam konservatif. Tujuan Milli Görüs adalah untuk menerjemahkan nilai-nilai dasar Islam ke dalam politik dengan memperhitungkan, situasi sosial-politik yang ada. Hal ini disebabkan oleh adanya konstitusi pada Pasal 163 yang melarang penggunaan agama dalam politik. Bahri Zengin yang merupakan salah satu anggota terkemuka dari partai MSP, FP (*Fazilet Partisi*) dan kemudian SP (*Saadet Partisi*) dan RP (*Refah Partisi*) yang didirikan oleh Millî Görüş mengklaim bahwa Millî Görüş dibentuk untuk membangun peradaban baru. Menurutnya, peradaban adalah hubungan yang konsisten antara tuhan (Allah), manusia dan alam semesta. Zengin juga menyatakan bahwa inti dari peradaban Barat adalah dominasi. 98

_

⁹⁸ Fulya Atacan. 2005. Explaining Religious Politics at the Crossroad: AKP- SP. *Turkish Studies*, 6:2, 187-199

Di tengah panggung politik Turki terdapat dua kekuatan besar, yaitu kelompok sekuler dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai ideolog utamanya dan kelompok politik Islam Millî Görüş dengan Necmettin Erbakan sebagai penggagasnya. Namun di luar dua kekuatan tersebut, terdapat kekuatan lain yang memberi pengaruh besar pada kebangkitan Islam di Turki, yaitu gerakan Nurcu dan Gullen Movement yang bergerak dalam bidang dakwah. Nurcu adalah salah satu gerakan Islam yang paling tua dalam sejarah Turki modern. Bibit gerakan Nurcu ini mula-mula muncul pada tahun 1930-an. Masa itu, westernisasi di tangan pendiri Turki modern, Mustafa Kemal Atatürk yang "dipaksakan dari atas" mendapat perlawanan ideologis dan kultural. Perlawanan bersenjata dipimpin oleh Shaykh Said al-Kurdi (1865-1925), sementara perlawanan kultural digerakkan oleh Said Nursi (1873-1960). Berbeda dari Shaykh Said al-Kurdi, Nursi memilih berjuang melalui jalur dakwah, kepenulisan dan intelektual. Pengikut Nursi yang mayoritas kalangan bawah dan petani melakukan dakwah secara estafet. Para pengikut generasi awal ini berasal dari masyarakat pedesaan. Hingga menjadi sebuah gerakan sosial keagamaan. Gerakan ini tidak melakukan penentangan secara frontal melawan rezim sekuler Kemalis, namun menjalankan perlawanan kultural.⁹⁹

Gerakan Gulen merupakan sebuah gerakan yang mengusung masalah-masalah kontemporer yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat seperti masalah pendidikan toleransi dan dialog antar umat beragama serta bantuan kemanusiaan. Hal ini yang mempermudah gerakan ini semakin berkembang karena masyarakat luas dapat menerima gerakan ini. Gulen ingin mengembalikan kegemilangan Islam di dunia modern. Pada gerakan Gulen tidak mendukung untuk kembalinya umat Islam dalam sebuah sistem kekhalifaan tetapi lebih fokus pada pengabdian atau pelayanan (hizmet) teutama

⁹⁹ Hakan Yavuz. Op. Cit. Hal. 151

pada bidang pendidikan. Selain itu gerakan ini juga menitikberatkan pada dialog serta toleransi antar umat beragama.¹⁰⁰

3.1 Dinamika Politik Islam di Mesir dan Turki

Gerakan politik Islam di Turki mengalami kemandegan disebabkan diberlakukanya sekulerisme pada rezim pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk. Namun *Milli Görüs* menjadi alternatif baru bagi perjuangan politik Islam di Turki. *Milli Görüs* menjadi induk terbentuknya partai politik Islam di Turki. Partai politik pertama dalam sejarah Turki kontemporer yang berorientasi Islamis didirikan oleh Necmettin Erbakan pada 1969 yakni partai MNP (*Milli Nizam Partisi*). Namun pasca kudeta 1971, MNP dibubarkan dan partai Islam dilarang. Erbakan meninggalkan Turki selama setahun, dan kemudian kembali dengan mendirikan MSP (*Milli Selamet Partisi*) dan mengikuti pemilihan umum pada 1973.¹⁰¹

MSP memandang Islam sebagai basis kunci untuk organisasi sosial. Partai ini juga memakai diskursus Islam dan mendorong program-program kebijakan Islamis. Platform politik MSP menekankan nilai-nilai tradisional Islam, membangun hubungan lebih dekat dengan negara-negara muslim, dan upaya untuk mereformasi pendidikan agar berfokus pada pengajaran moral dan kesalehan. Namun kudeta militer kembali terjadi pada tahun 1980 sehingga menyebabkan partai politik Islam untuk sementara dilarang. 102

Setelah mendapat kebebasan politik pada tahun 1983, Erbakan mendirikan kembali MSP dengan nama baru partai Refah. Namun, kondisi sosial politik tidak memungkinkan bagi partai Refah untuk menggunakan ideology Islam secara frontal. Di sisi lain, partai Refah juga tidak ingin menghilangan spirit Islam sebagai landasan perjuangan politik. Partai ini menyadari basis potensial lumbung

¹⁰⁰ Mathew Andrews. 2011. Building Institutional Trust in Germany: Relative Success of the Gülen and Milli Gorus. *Turkish Studies, Vol. 12, No. 3 (September 2011), 511-524.*

¹⁰¹ Ahmet Yildiz. 2003. Politico-Religious Discourse of Political Islam in Turkey: The Parties of National Outlook. *The Muslim World, Vol. 93 (April 2003)*. Hal. 187-209

¹⁰² M. Hakan yavuz. 2003. *Islamic Political Identity in Turkey*. New York: Oxford University Press, Hal. 207

suaranya berasal dari migran-migran urban yang yang telah diabaikan oleh partaipartai lain.¹⁰³ Dikarenakan urusan pemilu merupakan persoalan memperoleh suara, sehingga partai Refah menyusun strategi pemilu dengan merangkul suara kelas-kelas marginal seperti migran urban dan kelas menengah ke bawah di Turki.

Tabel 3.1. Hasil pemilihan Umum di Turki tahun 1987-2002

Parties	1987		1991		1995		1999		2002	
	%	seats	%	seats	%	seats	%	seats	%	seats
Center-right										
DYP	19.1	59	27.0	178	19.2	135	12.0	85	9.55	_
ANAP	39.3	292	24.0	115	19.7	132	13.2	86	5.12	_
Center-left										
DSP	8.5	0	10.4	7	14.6	76	22.1	136	1.21	
CHP		_	/_	_	10.7	49	8.8		19.39	178
SODEP	24.8	99	20.8	88	_	4				
Nationalists										
MÇP/MHP	_	_	_	_	8.1	0	17.9	129	8.34	_
HADEP	_		_	1	4.1	0	4.7	0	6.22	_
Pro-Islamic										
R/Fa SP	7.2	_	16.2 ^b	62	21.4	158	15.4	107	2.46	
AKP		_			_/				34.26	363

Sumber: M. Hakan yavuz. 2003. *Islamic Political Identity in Turkey*. New York: Oxford University Press.

Data tabel 2.2 menunjukkan bahwa terjadi kompetisi yang cukup ketat antara partai berhaluan Islamis dan non-Islamis. Tabel tersebut juga menguatkan asumsi penurunan popularitas Pemerintah Militer. Persaingan antara kelompok nasionalis yakni partai MHP dan Partai ANAP berujung pada kemenangan partai ANAP dengan memperoleh mayoritas kursi Majelis Nasional. Dengan demikian partai ANAP membentuk pemerintahan satu partai pada dua pemilu berturut-turut di tahun 1983 dan 1987. Namun kelompok Islamis melalui partai Refah juga berhasil meningkatkan jumlah perwakilan di Parlemen pada periode pemilu 1991-1999.

-

¹⁰³ *Ibid*. Hal. 214

Untuk menghimpun dan menginkorporasikan pemilih, partai Refah menggabungkan peran-peran Islamis tradisional dengan beupaya menguasai jaringan sosial melalui penyediaan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Partai Refah juga mengembangkan klub-klub minat, dan jaringan pendidik melalui diskusi dalam ruang public. Kebijakan-kebijakan ini menghasilkan jaringan-jaringan kerja yang juga menginkorporasikan muslim-muslim konservatif dari daerah-daerah marginal ke dalam sistem politik. Pada akhirnya, partai Refah mampu menguasai jaringan kelompok-kelompok pendukung yang independen, saling terjalin di tingkat provinsi, kotamadya, bahkan hingga tingkat rukun tetangga.

Strategi tersebut berhasil membawa Necmettin Erbakan terpilih sebagai Perdana Menteri Turki. Pada tanggal 28 Juni 1996, pertamakali Republik Turki dipimpin oleh Perdana Menteri yang berideologi Islamis. Namun Erbakan telalu frontal dalam mengakomodasi kelompok Islam dalam kabinet Turki. Erbakan juga mengarahkan kerjasama ekonomi dengan negara Islam. Hal ini menyebabkan militer kembali khawatir dengan perkembangan politik Islam di Turki. Keberpihakan Erbakan kepada gerakan Islam dan usahanya memperluas hubungan dengan negara-negara Islam, serta penolakannya atas hubungan dengan Israel, menimbulkan penentangan dari kalangan militer Turki. ¹⁰⁵

Bagi golongan Islam konservatif, kebijakan Erbakan yang cenderung bernuansa Islamis adalah bentuk pengakuan negara terhadap nilai-nilai Islam. Sedangkan kelompok Kemalis atau sekuler menganggap bahwa hal tersebut adalah ancaman bagi eksistensi ideologi mereka yang diklaim lebih toleran, demokratis dan menjunjung supremasi hukum. Naiknya Necmettin Erbakan sebagai perdana menteri juga membuat militer khawatir. Periode ini semakin mempertegas pertentangan antara kaum sekuleris dan Islamis. Militer melihat peningkatan kemenangan elektoral Partai Refah dan akhirnya dianggap mengancam dasar ideologis Republik Turki sebagai negara sekuler.

¹⁰⁴ *Ibid*. Hal. 217

¹⁰⁵ *Ibid*. Hal. 218

Karena khawatir memunculkan konfrontasi dengan kelompok nasionalis atau militer, sebuah kelompok modernis yang dipimpin oleh Abdullah Gül, mencoba mereformasi partai Refah menjadi partai berhaluan Muslim demokrat. Namun upaya ini direspon oleh koalisi secara negatif dengan pecahnya kudeta 28 Februari tahun 1997. Pihak oposisi menganggap bahwa Erbakan sebagai pemimpin partai Islam konservatif tidak hanya bertindak oportunis dengan bergabung dalam koalisi tapi juga memprakarsai kebijakan baru yang dianggap akan melemahkan ideologi sekularisme. Misalnya kebijakan mencabut larangan siswi dan pegawai negeri sipil mengenakan jilbab, membangun sebuah masjid di Taksim Square di Istanbul, serta menerapkan hukum Islam.

Pada tanggal 28 Februari 1997, kekuasan politik secara resmi berpindah kepada militer melalui *National Security Council* (NSC) dan menyatakan gerakan Islam menjadi ancaman keamanan internal nomor satu bahkan tingkat ancamanya melebihi tindakan separatisme Kurdi. Deniz Baykal sebagai pimpinan partai CHP, dan Yilmaz dari partai ANAP mendukung intervensi militer terhadap politik Turki dengan menghadirkan tentara sebagai "kelompok penekan" dan pada akhirnya memaksa pemerintah Erbakan mengakhiri kekuasaan¹⁰⁶.

Pasca kudeta 1997, periode ini juga menjadi tahun bangkitnya partai Islam yang terinspirasi dari Partai Refah. Pada 1999, tiga partai yang membentuk pemerintah koalisi mengalami kejatuhan dukungan elektoral. Partai terkemuka dalam pemerintahan koalisi yakni *Demokratik Sol Parti* (DSP) yang dipimpin oleh Bulent Ecevit mengalami kehancuran total. *Anavatan Partisi* (ANAP) sebagai partai pemenang mengalami penurunan dramatis dalam basis elektoral mereka. Sehingga pemilihan umum berikutnya pada bulan November 2002, tidak satupun dari tiga anggota koalisi mampu mencapai sepuluh persen suara parlemen, dan akhirnya tidak mendapat kursi dalam politik parlemen. Terdapat beberapa partai dominan yang saling merebutkan kursi parlemen Turki, diantaranya *Cumhuriyet Halk Partisi* (CHP) yang didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki, pada tahun 1923. CHP adalah partai tertua dan

-l--- V----- 2002 I-l----- D-1//--- I-l

¹⁰⁶ Hakan Yavuz. 2003. *Islamic Political Identity In Turkey*. US: Oxford University Press

merupakan oposisi utama. Pemimpin partai adalah Kemal Kilicdaroglu. Selanjutnya *Adalet ve Kalkìnma Partisi* (AKP) yang didirikan oleh politisi dari berbagai kelompok konservatif Islam yang ada pada tahun 2001. *Milliyetçi Hareket Partisi* (MHP) dikenal sebagai Grey Wolves, merupakan terbesar ketiga di parlemen Turki. Partai ini dipimpin oleh Devlet Bahceli. *Halkin Demokrasi Partisi* (HDP) yang berhaluan sosialis-demokratik ini berdiri untuk mendukung proses perdamaian Kurdi dan mengakhiri diskriminasi etnis, agama dan jenis kelamin. Dengan program yang terfokus pada hak-hak minoritas, hak-hak perempuan dan LGBT. Didirikan pada tahun 2012 dan dipimpin oleh Selahattin Demirtas dan Figen Yüksekdag.¹⁰⁷

Berbeda dengan Turki, di Mesir Ikhwanul Muslimin didirikan sebagai kelompok yang beroperasi di luar tatanan politik formal dan reformasi Islam yang komprehensif terhadap masyarakat dan negara. Metode utama untuk mencapai tujuan ini adalah dakwah agama. Dakwah dilaukan melalui khotbah di masjidmasjid dan ruang publik serta memberikan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Ikhwanul Muslimin berusaha menciptakan tatanan masyarakat muslim dan berupaya menyebarkan kesalehan sosial yang bermuara pada tuntutan tatanan politik berdasarkan hukum syariat.

Namun Ikhwanul Muslimin harus berhadapan dengan represi dari rezim pemerintah karena dianggap sebagai gerakan illegal. Pada tahun 1953, terjadi ketegangan politik antara Ikhwanul Muslimin dengan rezim pemerintahan Gamal Abdul Nasser. Rezim pemerintah Mesir menganggap bahwa Ikhwanul Muslimin mencoba membangun kekuatan politik. Dampaknya adalah putusan untuk membubarkan Ikhwanul Muslimin pada bulan Januari 1954. Nasser bertindak keras dengan menghancurkan struktur dan organisasi Ikhwanul Muslimin. lebih

 $^{^{107}}$ Barry Rubin dan Metin Heper . 2002. Political Parties in Turkey. London : Frank Cass And Company Limited. Hal. 138

dari 4.000 anggota Ikhwanul Muslimin ditahan. Kekuatan Ikhwanul Muslimin di Mesir terkikis dengan sejumlah besar anggotanya ditahan dan dieksekusi mati.¹⁰⁸.

Di bawah tekanan rezim, Ikhwanul Muslimin menyerukan pemberontakan untuk menggulingkan rezim. Ikhwanul Muslimin mengklaim bahwa pemberontakan bertujuan untuk mengembalikan kebebasan politik, serta pembebasan tahanan Ikhwanul Muslimin. Rezim Nasser menganggap Ikhwanul Muslimin telah melakukan gangguan politik di seluruh negeri, sehingga pengadilan Mesir mengeluarkan hukuman mati terhadap pemimpin Ikhwanul Muslimin. Setelah tahun 1954, Ikhwanul Muslimin menghentikan kegiatan terbuka di Mesir dan kehilangan kekuatannya sebagai gerakan Islam. Namun pada tahun 1974 semua anggota Ikhwanul Muslimin yang ditahan kemudian di bebaskan.

Sebelum kemerdekaanya, Mesir sudah memiliki partai-partai politik sebagai refleksi dari interaksi sosial, ekonomi dan budaya serta keadaan historis, nasional dan politik yang betujuan mengembangkan lembaga-lembaga administrasi pemerintahan modern. Pada periode 1907-1920, partai politik sudah terbentuk di Mesir sebagai sinyal awal untuk pembentukan partai politik. National Democratic Party (NDP) merupakan partai pertama yang dibentuk pada tahun 1907 oleh Mostafa Kamel. Namun, gerak partai politik dibatasi karena pendudukan Inggris dan subordinasi Kekaisaran Ottoman terhadap Mesir. Pada Februari 1922 deklarasi mengakui kemerdekaan Mesir dan penerbitan Konstitusi 1923 menyebabkan munculnya konstitusi partai dan prinsip-prinsip demokrasi liberal. Selama periode 1923-1952, adalah era kejayaan dalam praktek politik dan demokrasi. Namun hal tersebut terganggu akibat adanya pendudukan Inggris, intervensi asing dalam urusan Mesir dan gangguan kerajaan dalam kehidupan politik Mesir. Pecahnya Revolusi 1952 mengharuskan rezim Mesir untuk melikuidasi gerakan oposisi. Pada Januari 1953, peraturan pembubaran partai

.

¹⁰⁸ Mohammed Zahid. 2010. The Muslim Brotherhood and Egypt's Succession Crisis: The Politics of Liberalisation and Reform in the Middle East. London: I.B.Tauris Publishers. Hal. 79-80

¹⁰⁹ *Ibid*. Hal. 81

politik dan penerapan sistem satu partai diberlakukan. Aturan ini berlangsung sampai tahun 1976 hingga presiden Anwar Sadat menyatakan harus adanya era pluralisme partai.¹¹⁰

Setelah Perang 1967 dan demonstrasi besar-besaran pada bulan Februari dan Oktober 1969, Mesir berada dalam kekacauan politik. Demonstrasi tersebut menuntut untuk memberikan warga hak kebebasan berekspresi diri untuk berafiliasi dalam politik. Pada Agustus 1974, Sadat mengajukan kebijakan untuk merubah Uni Arab Sosialis. Pada bulan Juli 1975, konferensi umum Uni Arab Sosialis mengadopsi resolusi tentang pembentukan forum politik, kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat sesuai dengan prinsip dasar dari Revolusi Mesir. Pada bulan Maret 1976, Presiden Sadat mengeluarkan dekrit yang memungkinkan tiga forum untuk mewakili sayap kanan (Liberal-sosialis), sayap tengah (Mesir Arab Sosialis) dan sayap kiri. Selama pertemuan pertama Majelis Rakyat pada tanggal 22 November 1976, Presiden Sadat menyatakan tiga organisasi politik berubah menjadi partai.

Pemberlakuan hukum tersebut menunjukkan rezim politik Mesir secara resmi berubah menjadi era pluralism. Tahap pluralisme partai di Sadat era (1977-1981) menyebabkan transformasi politik yang penting bagi Mesir. Partai politik banyak didirikan dan harus sesuai dengan hukum yang ditetapkan. Partai politik tidak boleh bertentangan dengan prinsip melestarikan persatuan nasional, perdamaian sosial, sistem sosialis dan demokratis. Ia juga menyatakan bahwa partai tidak harus dibentuk atas dasar etnis, ras, geografis atau diskriminatif karena jenis kelamin, asal, agama atau keyakinan.¹¹¹

Pasca terbunuhnya Sadat, konstelasi politik Mesir mengalami perubahan di era Mubarak. Presiden Hosni Mubarak menjabat pada 15 Oktober 1981 di tengah situasi politik sangat sulit. tujuan utama adalah untuk memulihkan stabilitas negara akibat terjadinya ketegangan politik di era Sadat. Mubarak telah

¹¹⁰ Mohammed Zahid. Loc.Cit

¹¹¹ Anonim. *Political System in Egypt*. Diakses pada http://sis.gov.eg/section/28/258?lang=en-us [10 Oktober 2016]

mengambil berbagai langkah untuk meredakan ketegangan termasuk pembebasan tahanan politik, melarang penerbitan beberapa surat kabar dan mengurangi pembatasan pada kegiatan partai. Selama era Mubarak, jumlah partai politik di Mesir telah meningkat mencapai 24 partai. Namun terdapat kebijakan Mubarak untuk melakukan pembatasan terhadap partai Islam. Pasal 5 undang-undang pemilu diubah berisi larangan pembentukan partai berbasis agama. Partai politik agama tidak diperbolehkan karena tidak menghormati prinsip non-interferensi agama dalam politik. Agama yang harus tetap di wilayah pribadi untuk menghormati semua keyakinan. Partai politik yang mendukung formasi milisi atau memiliki agenda yang bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip atau mengancam stabilitas negara seperti persatuan nasional antara Muslim Mesir dan Kristen Mesir juga dilarang

Pasal 76 undang-undang pemilu juga diubah untuk memberikan partai politik kesempatan untuk mencalonkan kandidatnya. Partai politik harus didirikan setidaknya lima tahun berturut-turut sebelum tanggal awal pencalonan dan telah beroperasi tanpa terputus yang anggotanya diperoleh dari setidaknya 3% dari anggota terpilih dari Majelis Rakyat dan Dewan Syura dalam pemilu terbaru atau persentase setara total seperti di salah satu dari dua majelis. Masing-masing harus mencalonkan diri sebagai presiden atau anggota Majelis tinggi parlemen. Sebagai pengecualian dari ketentuan pasal tersebut, partai-partai politik yang anggotanya memperoleh setidaknya satu kursi di salah Majelis Rakyat atau Dewan Syura dalam pemilihan terbaru dimungkinkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dalam 10 tahun sejak 1 Mei 2007.¹¹²

Lebih dari 38 partai politik baru di berbagai spectrum ideologi telah muncul. Diantaranya partai-partai Liberal, Partai-partai sayap Kiri, dan partai-partai Islam. Di antara kelompok partai Liberal, terdapat partai yang menonjol yang telah eksis sejak sebelum pemerintahan Mubarak maupun di era Mubarak. Misalnya partai Al-Ghad yang dipimpin oleh Ayman Nour yang pernah melakukan pemberontakan terhadap Mubarak pada tahun 2005. Partai liberal

¹¹² Ibid

lainya yang terkenal adalah *Egypt Democratic Sosialist Party* (EDSP) dipimpin oleh Mohamed Abul-Ghar seorang aktivis liberal kiri, *Justice Party*, *Free Egyptians Party* (FEP) dipimpin oleh ahli telekomunikasi Mogul Naguib Sawiris, *Egypt Freedom Party* dipimpin oleh akademisi dan aktivis Amr Hamzawy, *Front Demokratik* dipimpin oleh Osama Ghazali Harb (mantan anggota NDP) dan Yehia al-Gamal. Secara umum, partai-partai ini hadir dengan agenda politik memisahkan antara kekuatan sipil dan militer, penghapusan undang-undang darurat, membangun lembaga-lembaga negara, dan mendorong investasi di sektor publik, mendorong kesetaraan di antara semua warga negara (termasuk memegang jabatan publik), supremasi hukum, dan pemberantasan korupsi, mewujudkan ekonomi pasar bebas, komitmen untuk keadilan sosial, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendidikan.

Sedangkan Partai sayap kiri memiliki semangat ideologi Nasserists, Marxis dan nasionalis Arab. Basis dukungan partai berasal dari kelas pekerja, serikat pekerja, perguruan tinggi dan intelektual. Partai sayap kiri yang populer antara lain *Progressive Nationalist Unionist Party* (PNUP) atau Partai Tagammu yang didirikan pada tahun 1976 oleh kaum kiri termasuk Khaled Moheiddin adalah salah satu pelaku kudeta tahun 1952, *Socialist Popular Alliance* (SPA), *Partai Buruh Demokratik* (WDP), *Partai Sosialis Mesir* (ESP) didirikan oleh Ahmed Bahaa Shaaban dan Karima El-Hefnawy. Partai sayap kiri berkomitmen untuk menegakkan demokrasi sosialis, kebebasan politik dan ekonomi berdasarkan keadilan sosial.

Mesir masih di dominasi rezim otoriter Mubarak, hingga terjadinya *Arab Spring* pada 2010-2011sebagai titik balik akhir kekuasaan Mubarak. Periode ini merupaka era kebangkitan partai Islam. Munculnya partai politik berbasis ideology Islam di Mesir bertujuan untuk menjadikan Mesir sebagai sebuah negara Islam, penegakan hukum Islam dengan menggunakan syariah sebagai sumber yurisprudensi, dan program ekonomi syariah. Kelompok konservatif Islam salafi diwakili oleh tiga partai politik yakni *Al-Noor*, *Al-Asala* dan *Al-Fadhela*. Jamaah

Islamiyah yang dulu dikenal cenderung fundamentalis diwakili oleh *Partai Konstruksi dan Pembangunan* (CDP). Sedangkan pemain lama yakni Ikhwanul Muslimin diwakili oleh *Freedom And Justice Party* (FJP)¹¹³.

Dari penjelasan di atas, perbedaan signifikan antara dinamika politik Islam di Mesir dan Turki adalah cara gerakan Islam dalam merebut ruang-ruang politik. Turki lebih moderat dalam merespon represi rezim dengan berpartisipasi aktif dalam pemilu. Sedangkan di Mesir, gerakan politik Islam lebih konservatif dengan melakukan konfrontasi terhadap rezim hingga pada akhirnya memilih menggunakan jalur *soft politics* dengan mengikuti pemilihan umum.

3.2 Peran Militer Dalam Politik di Mesir dan Turki

Militer memang berperan penting dalam sejarah politik Mesir dan Turki. Pasca *The Free Officers* berkuasa dan berhasil mengakhiri sistem pemerintahan monarki di Mesir yang di pimpin oleh Raja Farouk, peristiwa tersebut menandai kekuasaan negara yang jatuh kepada militer dan Muhammad Naguib menjadi presiden pertama Mesir dengan latar belakang militer. Pasca kudeta, pemerintah militer membentuk *Revolution Command Council* (RCC) yang menjadi alat legitimasi untuk menjalankan pemerintahan dan mengatur masyarakat. RCC juga bertugas untuk mengontrol oposisi baik dalam tubuh militer sendiri maupun masyarakat.

Pasca kepemimpinan Muhammad Naguib, kekuasaan militer semakin menguat di era Gamal Abdul Nasser yang memegang peranan penting dalam politik domestik Mesir.¹¹⁵ Nasser memasukan lebih banyak kalangan militer dalam pemerintahan dan RCC tetap menjadi pendukung utama rezim Nasser dan melanggengkan kekuasaan militer. Nasser juga menetapkan kebijakan-kebijakan

¹¹³ Eman Ragab. 2012. *Islamic political parties in Egypt An overview of positions on human rights and development and opportunities for engagement*. Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies ACPSS: Cairo Policy Brief

¹¹⁴ Amos Perlmutter. 1977. *The Military and Politics in Modern Times*. New Haven: Yale University Press. Hal. 217.

Moataz El Fegiery. 2012. Crunch Time for Egypt's Civil-Military Relations. FRIDE-Policy Brief, no. 134, August 2012,p. 1

otoriter dalam pemerintahannya dengan membubarkan seluruh partai politik yang berkuasa di tahun 1952, melarang dan memenjarakan sejumlah aktivis Ikhwanul Muslimin. Nasser juga mengeluarkan konstitusi baru pada tahun 1956 dan sekaligus membubarkan RCC untuk menyamarkan intervensi militer dalam politik. Meskipun di bubarkan, Nasser tetap mendapat dukungan sepenuhnya dari militer.

Dengan dibubarkannya seluruh partai politik maka secara otomatis kelompok militer memegang kontrol penuh atas pemerintahan Mesir saat itu. Sebagai ganti RCC, Gamal Abdul-Nasser membentuk *Arab Socialist Union* (ASU) pada tahun 1962. ASU ini menjadi alat politik baru bagi presiden dalam menjalankan kebijakannya. Seluruh masyarakat Mesir diharuskan untuk memberikan dukungan pada segala bentuk mobilisasi ASU. Apabila terdapat individu atau kelompok masyarakat yang menentang, maka mereka akan dijadikan target represi politik dari penguasa militer Mesir. Pemerintahan Presiden Gamal Abdul-Nasser bertahan hingga kematiannya pada tahun 1970. Kemudian ia digantikan oleh wakilnya, yakni Anwar Sadat, yang merupakan mantan perwira *The Free Officers* dan juga terlibat dalam revolusi 1952. Hal tersebut menunjukan bahwa masa kepemimpinan militer di Mesir masih terus berlanjut.

Kebijakan pemerintahan Sadat cenderung lebih bebas dengan pengurangan porsi keterlibatan militer. Presiden dapat mengontrol militer untuk tetap menjadi pendukungnya. Rezim militer yang dipimpin Sadat memberikan kebebasan politik dan ekonomi yang lebih besar pada rakyat Mesir. Ia memperbolehkan kembali pembentukan partai-partai politik untuk dapat ikut serta dalam pemilu. Sadat juga membentuk *National Democratic Party* (NDP) sebagai basis

¹¹⁶Anonym. 2011. *Egypt: Will Democracy Succeed the Pharaoh?*. Diakses dar www.diplomatshandbook.org/pdf/Handbook_Egypt.pdf. [12 November 2016]

Agus R. Rahman. 2001. *Militer dan Demokratisasi di Mesir*. dalam Syamsumar Dam (ed.), *Militer dan Demokratisasi di Nigeria, Mesir dan Afrika Selatan*, Pusat Penelitian Politik, Jakarta, 2001, Hal. 65-67

¹¹⁸ Moataz El Fegiery. Op. Cit

pendukung politiknya. Satu hal penting lainnya ialah pembubaran ASU sebagai bentuk penghapusan kepemimpinan otoriter masa sebelumnya. ¹¹⁹

Namun kebijakan Sadat ternyata bermotif politik. Pembubaran ASU juga menjadi langkah bagi Sadat untuk keluar dari pengaruh sosialis yang selama ini diterapkan oleh Nasser. Apabila dilihat kembali, NDP sebenarnya merupakan ASU dalam bentuk yang lain. NDP tetap dikuasai oleh kalangan militer dan menjadi alat politik bagi Presiden Sadat. Hanya saja kali ini Sadat menggunakan cara yang lebih halus, yakni dengan memberikan sejumlah kebebasan bagi rakyatnya agar tidak kehilangan dukungan. Kepemimpinan rezim Anwar Sadat harus berakhir secara tidak terduga saat ia dibunuh oleh kelompok Islam militan pada bulan Oktober 1981. 120

Meninggalnya Anwar Sadat bukan berarti menjadi akhir kepemimpinan militer di Mesir, sebab di masa pemerintahan berikutnya militer masih memainkan peranan yang cukup besar dalam perpolitikan Mesir. Mubarak yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden dipercaya oleh Majelis untuk menggantikan Sadat. Nuansa militer juga tetap menjadi cirri khas dari kepemimpinan Mubarak. Mubarak merupakan panglima tertinggi angkatan perang Mesir dan secara langsung memiliki kedekatan dengan kalangan militer. 121

Mubarak tidak banyak melakukan perubahan pada konstruksi politik yang telah dijalankan sejak kepemimpinan Sadat. Ia hanya merancang perubahan sekedarnya untuk merespon demokratisasi di Mesir. Hal ini dilakukannya tidak lain agar rezim militer tetap mendapat dukungan, baik dari rakyat Mesir maupun dari dunia internasional. Selain itu, ia juga mulai membuka akses bagi media dan menerima perbedaan pandangan dari beberapa kalangan di luar pemerintahan seperti kelompok Islam militan. Meskipun demikian, belum ada perubahan fundamental yang terjadi di Mesir semenjak kudeta dan revolusi tahun 1952. Di

Robert Springborg. 1987. The President and the Field Marshal: Civil-Military Relations in Egypt Today. *MERIP Middle East Report, No. 147, Egypt's Critical Moment (Jul. - Aug., 1987), pp. 4-11*

¹¹⁹Agus R. Rahman. Op. Cit. Hal. 69

¹²¹ Agus R. Rahman. *Op. Cit.* Hal.70-71.

bawah Mubarak, parlemen menjadi semakin lemah karena pemerintahan Mesir justru didominasi oleh besarnya kekuasaan presiden yang mendapat dukungan penuh dari kelompok militer. ¹²²

Berbeda dengan Sadat yang cenderung memisahkan dan membatasi keterlibatan militer di dalam politik, Hosni Mubarak yang juga datang dari latar belakang militer justru merangkul institusi tersebut dan memberikan mereka tempat dalam ranah sipil Mesir. Petinggi militer menempati 10% persen dari pos kementrian di Mesir. Sebagian besar dari 26 Gubernur di Mesir adalah pejabat senior dalam lingkungan militer dan polisi. Dalam mencapai jabatannya, anggota militer harus meninggalkan karir kemiliterannya. Namun mereka tetap terintegrasi dengan militer. Peranan Gubernur di sini cukup jelas, yaitu memastikan bahwa aktivis oposisi tidak melakukan pemberontakan pada level lokal dan regional ¹²³

Mencermati lebih dalam mengenai peranan kelompok militer dalam kabinet Mesir 1981-1987, orang paling berpengaruh kedua dalam pemerintahan Mesir pada kurun waktu tersebut adalah Abdul Halim Abu Ghazala, sang menteri pertahanan. Abu Ghazala bisa disebut sebagai menteri yang paling berpengaruh dibanding 34 menteri anggota kabinet Mesir saat itu. Abu Ghazala memiliki kesamaan pandangan dengan Mubarak dimana keduanya meyakini bahwa militer mampu memainkan peranan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. 124

Dalam perjalanan karirnya, Abu Ghazala juga merupakan orang yang cukup dekat dengan Amerika Serikat. Berbagai lobi dilakukannya untuk mendapatkan pinjaman dana bagi militer dan investasi di Mesir. Ghazala juga sempat diisukan sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Mubarak. Sebagai Menteri Pertahanan, Ghazala cukup berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan mengenai militer di Mesir. Hal tersebut salah satunya ditunjukkan

_

¹²² Gregory Aftandilian. 2011. Presidential Succession Scenarios in Egypt and Their Impact. U.S.-Egyptian Strategic Relations, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College. Hal. 2

¹²³ S.A. Cook, 2007. *Rulling but not Governing*, Baltimore: John Hopkin University Press. Hal. 26 ¹²⁴ Robert B. Satloff. 1988. Army and Politics in Mubarak's Egypt, *The Washington Institute for Near East Policy, Washington D. C.*, Hal. 15-16

dengan berbagai presentasi yang dilakukannya mengenai keamanan nasional dan masa depan militer Mesir kepada partai berkuasa yakni Partai NDP. Contohnya pada Juli 1976, Ghazala menyampaikan statement komprehensif pada NDP mengenai pembangunan politik dan militer di Timur Tengah serta pengaruhnya bagi Mesir¹²⁵. Untuk itu, dia menyarankan modernisasi militer Mesir dengan membeli alutsista baru.¹²⁶ Secara gradual, militer mendapatkan lebih banyak kekuasaan di era Mubarak dan militer cenderung menjadi tumpuan dukungan terhadap rezim yang berkuasa. Hal ini didukung dengan peningkatan tunjangantunjangan sosial kepada masyarakat dan memberikan akses ekonomi kepada militer.

Mubarak bertindak otoriter dengan memberlakukan Undang-undang Keadaan Darurat yang memberikan kewenangan kepada polisi dan militer, menangguhkan hak konstitusional warga negara, dan melegalkan sensor pada tahun 1981. Terkait undang-undang tersebut pemerintah Mubarak menggunakannya untuk melawan oposisi radikal seperti kelompok Islam fundamentalis yang memberikan ancaman pada stabilitas politik di Mesir. Selain itu, pada awalnya Mubarak secara bertahap memberlakukan politik yang terkontrol. Ia memperbolehkan oposisi dan organisasi masyarakat aktif dalam politik. Namun di sisi lain, Mubarak juga memperbolehkan penangkapan aktor oposisi, dan secara tidak langsung menyingkirkan mereka dari kompetisi politik. Semenjak diberlakukannya undang-undang Keadaan Darurat masyarakat Mesir merasa bahwa pemerintahan Mubarak telah mengekang kebebasan mereka melalui aksi militer dan aparat keamanan yang diberi keleluasaan dalam mengadili siapa saja pihak yang berpotensi mengancam kestabilan dan keamanan pemerintahan.

Di bawah undang-undang Keadaan Darurat para demonstran sering menerima aksi kekerasan yang dilancarkan oleh aparat keamanan dalam serangkaian aksi demonstran yang memprotes pemerintahan Mubarak. Selain itu

¹²⁵ A. Hashim. 2011. The Egyptian Military Part Two: From Mubarak onward. *Middle east Policy, Vol. XViii, No. 4, 2011. Hal.106*

¹²⁶ Robert Springborg. Op. Cit. Hal. 15

80

undang-undang tersebut juga digunakan sebagai kontrol terhadap pihak oposisi, seperti Ikhwanul Muslimin, agar tidak dapat masuk ke dalam pemerintahan dan mengganggu kepemimpinan Hosni Mubarak. Pemerintah juga cenderung lebih bergantung pada militer dalam kasus ancaman dalam bentuk internal, melibatkan personel militer dalam rapat-rapat Mubarak mengenai bagaimana mengontrol instabilitas domestik. Contohnya adalah menaikkan harga bahan pangan dan asuransi pada September 1984 sehingga mengakibatkan protes di wilayah Kufr al-Dawwar. Pada tahun 1986, sebanyak 20,000 anggota paramiliter *Central Security Force* yang sebagian besar terdiri dari petani yang berpendidikan rendah harus mengikuti wajib militer, Namun terjadi pemberontakan walaupun akhirnya harus menyerah terhadap represi militer. 128

Era Hosni Mubarak merupakan era di mana militer mempunyai hak-hak yang sama dengan sipil, atau biasa disebut dengan dwi-fungsi militer. Hal ini tidak luput juga dalam bidang ekonomi yang juga turut dimasuki oleh pihak militer. Di era ini, militer diberi otonomi yang luas untuk membuat dan menjalankan industri bisnis militer. Militer Mesir telah demikian menjadi faktor kunci ekonomi sejak 1980-an, baik itu di sektor real estate, produksi peralatan rumah tangga, dan membuka tujuan wisata baru. Menurut perkiraan, kegiatan bisnis militer membentuk 20 persen dari output ekonomi tahunan negara itu¹²⁹. Berbeda dengan masa pemerintahan Anwar Sadat yang memotong anggaran belanja militer dan sangat membatasi peran dan keterlibatan militer dalam urusan publik dan politik, Hosni Mubarak justru sangat menyambut adanya kontribusi dan keikutsertaan militer dalam pembangunan ekonomi Mesir dan menjamin peranan militer sebagai penjamin stabilitas dalam negeri. Mubarak telah memberikan lampu hijau kepada militer untuk memperoleh bagian yang lebih dalam anggaran pengeluaran pemerintah¹³⁰. Militer juga diberikan keleluasaan

-

¹²⁷ Robert B. Satloff. Loc. Cit

¹²⁸ Robert Springborg. Op. Cit.Hal. 8-9

Anonim. 2011. *The Mubarak System without Mubarak*. Diakses dari http://en.qantara.de/wcsite.php?wc_c=7155 [22 Oktober 2016]

¹³⁰ R. B. Satloff. Op. Cit. Hal. 8

81

untuk mengatur aktivitas pemerintah dalam pembangunan serta untuk memperkuat pengaruhnya dalam politik dalam negeri Mesir.

Serupa dengan Mesir, di Turki Militer juga memiliki peran penting dalam politik. Setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman, militer Turki berperan dalam peralihan sistem pemerintahan monarki menuju republik. Sejak intervensi pertama pada tahun 1960, militer menjadi salah satu aktor penting dalam politik Turki. ¹³¹ Militer Turki berperan sebagai penjamin stabilitas dalam negeri, pengawal ideologi Kemalisme. ¹³² Hal tersebut berarti bahwa militer Turki berperan penting dalam transisi demokrasi. Selanjutnya, militer secara historis terus memperoleh keistimewaan melalui peningkatan perannya dalam rezim dan memiliki hak intervensi untuk melakukan perlindungan negara. ¹³³

Intervensi militer dalam politik dijalankan melalui pengawasan terhadap pemerintah. Legitimasi militer disahkan ke dalam konstitusi baru. 134 Militer menyusun konstitusi setelah kudeta pada 12 September 1980, yakni pada tahun 1982 dan bertahan sampai referendum konstitusi pada tahun 2010. Pasal dalam konstitusi mempertegas peran militer dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah yang harus tunduk pada pemikiran Kemalis. 135 Selanjutnya, militer membentuk lembaga formal yang difungsikan unutk menjaga nilai-nilai konstitusi. Pada tahun 1961, konstitusi baru disahkan setelah kudeta militer tahun 1960. Militer kemudian menciptakan Dewan Keamanan Nasional atau *National Security Council* (NSC) atau dalam bahasa Turki *Milli Guvenlik Kurulu* (MGK)

Ergun Ozbudun. 2000. *Contemporary Turkish Politics: Challenges to Democratic Consolidation*. Boulder: Lynne Rienner Publishers Inc. Hal. 105

¹³² Kemalisme mengacu pada ideologi yang diajukan oleh Mustafa Kemal Ataturk dan dinamai menurut namanya, yang merupakan prinsip dasar yang mendefinisikan karakteristik dasar Turki. Hal ini ditandai dengan enam pilar pendiriannya: republikanisme, populisme, sekularisme, revolusionisme, nasionalisme dan statisme.

¹³³ J. Samuel Valenzuela. 1992. Democratic Consolidation in Post-Transitional Settings: Notion, Process, and Facilitating Conditions. dalam Scott Mainswaring, Guiellermo O'Donnell, dan J. Samuel Valenzualea, eds. Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in comparative Perspective. Notre Dame: University of Notre Dame Press. Hal. 62-63.

¹³⁴ Ozbudun. *Op. Cit.* Hal. 106.

¹³⁵ *Ibid*. Hal. 107.

yang dipimpin oleh presiden yang terdiri dari anggota pemerintah sipil dan militer. Dewan ini dibentuk untuk membantu Dewan Menteri dalam membuat keputusan dan memastikan koordinasi dalam menjaga keamanan nasional. Dewan ini difungsikan sebagai pelindung utama konstitusi negara. 136

NSC menjalankan sistem politik ganda yang memberlakukan Dewan Sipil disejajarkan dengan Dewan Keamanan Nasional di tingkat eksekutif. Dan sistem peradilan militer disejajarkan dengan sistem peradilan sipil. 137 Selain pembentukan dewan tersebut, politisasi ditubuh militer dijalankan menggunakan doktrin pertahanan terhadap ancaman eksternal dan internal serta kemampuan negara untuk mencapai tujuan nasional. Hal ini telihat pada konstitusi tahun 1971, yang menyebabkan terjadinya intervensi militer ditahun yang sama. Dan pada tahun 1982, militer lebih meningkatkan dan menegakkan peran dan kekuasaan dalam dewan. 138

Peran NSC diperkuat dengan konstitusi 1982, yang diadopsi oleh junta militer setelah kudeta militer tahun 1980. Meskipun konstitusi Turki tahun 1961 dan 1982 tidak mengandung klausul eksplisit memperbolehkan militer mengintervensi pemerintahan sipil, namun militer menggunakan pasal 35 dari hukum militer yang berbunyi: "Tugas Angkatan Bersenjata Turki adalah untuk melindungi dan melestarikan tanah air Turki dan Republik Turki sebagaimana didefinisikan dalam konstitusi". 139

Sejak berdirinya republik, Militer Turki beroperasi dalam lingkungan yang konstan ditandai dengan rendahnya ancaman eksternal. Hal ini terlihat dari netralitas Turki dalam Perang Dunia 2. Perang Dingin juga tidak pernah menjadi ancaman eksternal serius terhadap keamanan nasional Turki. Penyediaan 1.750 tentara untuk perang di Afghanistan telah menjadi contoh keterlibatan militer

¹³⁶ *Ibid*. Hal.108.

¹³⁷ Cizre Sakallioglu. 1997. The Anatomy of the Turkish Military's Autonomy. *Comparative Politics*, vol. 29, no. 2, 1997, pp. 157-158.

¹³⁸ Ozbudun. Op. Cit Hal. 108

¹³⁹ Gareth Jenkins. 2007. Continuity and Change: Prospects for Civil-Military Relations in Turkey. *International Affairs* 83, 2 Hal. 343.

Turki dalam pertempuran antar negara. Dan setelah itu, Turki memutuskan berpartisipasi dalam Perang Korea karena posisinya sebagai anggota PBB. Turki juga mendapatkan status keanggotaan dari NATO bsetelah keterlibatannya dalam perang Korea. Sejak saat itu militer Turki menjadi sekutu penting bagi AS. 140 Oleh karena itu, militer Turki telah secara konsisten beroperasi dalam lingkungan ancaman internasional yang relatif stabil sepanjang abad ke-20 dan abad ke-21.

Namun, Turki memiliki ancaman internal yang relatif tinggi sejak transisi demokrasi menuju pemilu dengan sistem multi-partai. Hal ini menjadi ancaman internal utama dalam tubuh militer menyangkut kekuasaan dan legitimasi dalam politik akibat munculnya kelompok separatis Kurdi, dan ancaman terhadap rezim sekuler oleh kekuatan politik Islam. Dalam menjaga persatuan nasional untuk menghadapi kekuatan-kekuatan separatis maupun kekuatan Islamis, militer mengeluarkan sikap tegas. Militer melakukan kudeta secara terang-terangan atau diam-diam. Isu yang digunakan adalah ancaman gerakan separatisme dan juga ancaman terhada sekularisme dari kelompok Islam politik. Pada tahun 1961 dan 1982 konstitusi menyatakan bahwa hukum yang disahkan oleh dewan militer yang berkuasa tidak bisa digugat bahkan setelah transisi demokrasi serta dalam undang-undang amnesti pada kejahatan, khususnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer. Dalam politik.

Berdasarkan penjelasan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam sejarah Turki, tercatat militer melakukan kudeta sebanyak lima kali. Sejarah kudeta di Turki dimulai pada 1960 ketika militer menangkap semua anggota Partai Demokrat yang berkuasa. Setahun kemudian, Adnan Menderes, perdana menteri yang saat itu digulingkan, digantung bersamasama dengan menteri luar negeri dan menteri keuangan. Pada tahun 1971, militer memaksa perdana menteri aliran konservatif yakni Suleyman Demirel untuk

¹⁴⁰World Factbook. 2012. *Turkey: The Central Intelligence Agency*. Diakses dar https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html [10 Oktober 2016]

Gonul Tol. 2010. *A New Era in Turkey's Civil-Military Relations*. Diakses dari *Middle East Institute*. http://www.mei.edu/content/new-era-turkeys-civil-military-relations [10 Oktober 2016]

¹⁴² Ozbudun. *Op. Cit* Hal. 115-116

mundur dari jabatannya dan Turki mengalami darurat militer. Para tentara melakukan intervensi besar terakhir dalam politik pada 1980. Implikasinya adalah Jendral Kenan Evren memegang kendali pemerintahan dan menjadi presiden. Wewenangnya digunakan untuk menyusun ulang konstitusi untuk menjamin kekuatan militer Turki. Pada 1997, militer menangkap pemimpin Islamis, Necmettin Erbakan. Namun militer menahan diri untuk tidak merebut kekuasaan dan membiarkan politikus sekuler membentuk pemerintah baru.

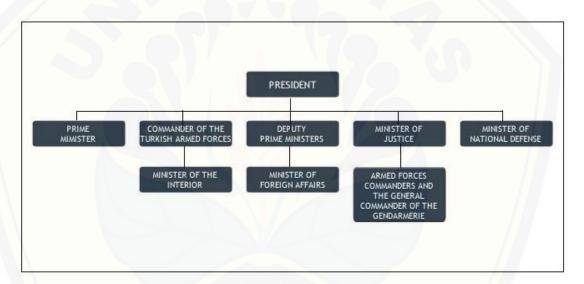
Kemenangan AKP pada 2002 mempengaruhi eksistensi militer Turki. Terdapat tiga faktor yang sangat mempengaruhi peran militer Turki pasca naiknya AKP dalam kekuasaan. Pertama, proses aksesi Turki menjadi anggota Uni Eropa menjadikan militer harus lebih mampu berkolaborasi dengan pemerintah sipil. Kedua, meningkatnya kekuatan parlemen yang mendapat dukungan penuh rakyat. Ketiga, peran *soft power* Turki dalam panggung politik internasional menyebabkan munculnya dukungan internasional terhadap AKP. Hal tersebut secara signifikan menggeser persepsi peran dan identitas militer di mata publik. Secara etis, militer lebih harus mempertimbangkan kolaborasi dengan rezim, sehingga kudeta militer terhadap pemerintah AKP sangat kecil kemungkinanya.

Meskipun langkah-langkah tersebut adalah upaya agar demokrasi berfungsi penuh, militer Turki telah menjadi paradoks historis karena dianggap sebagai lembaga yang paling dihormati dan terpercaya di negeri Turki. 143 Selanjutnya, militer juga bersekutu dengan organisasi masyarakat sipil, media, dan kelompok bisnis yang secara diam-diam atau terang-terangan mendukung intervensi militer pada tahun 1997. 144 Dengan demikian, lembaga militer secara historis sangat mengandalkan legitimasi yang berasal dari masyarakat Turki untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya dalam politik. Transformasi dan penyempitan peran militer secara signifikan mengurangi kekuatan militer dalam politik Turki.

¹⁴³ Jenkins, *Op. Cit.* Hal. 339.

Gunes Murat Tezcur. 2010. Muslim Reformers in Iran and Turkey: The Paradox of Moderation. Austin: University of Texas Press. Hal. 104.

Proses aksesi Uni Eropa membatasi pengaruh militer dan memberikan kontribusi pada hubungan sipil-militer. 145 Setelah aksesi Turki untuk keanggotaan Uni Eropa dalam KTT Helsinki pada tahun 1999, Turki dihadapkan dengan kebutuhan untuk secara signifikan merestrukturisasi demokrasi. Dalam hal ini, Uni Eropa menuntut berbagai reformasi demokrasi sebagai syarat untuk bisa bergabung dalam Uni Eropa. Reformasi harus dilakukan dengan merubah posisi dan peran Kepala Staf militer. Kedua adalah reformasi perubahan komposisi keanggotaan NSC. Dalam hal ini, jumlah anggota sipil ditingkatkan. Sementara NSC akan mengambil peran sekunder dalam urusan keamanan setelah pemerintahan sipil.



Gambar 3.1. Struktur National Security Council (NSC) Turki setelah amandemen konstitusi pada 2003

sumber: National Security Council of Turkey. Diakses dari http://www.mgk.gov.tr/en/index.php/secretariat-general/about-us

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa presiden memiliki kewenangan penuh dalam mengontrol NSC. Komposisi antara pemerintah sipil dan militer dalam tubuh NSC menunjukkan bahwa sipil berhasil melakukan intervensi dalam tubuh

¹⁴⁵ Umit Kurt dan Sule Toktas. 2008. The Impact of EU Reform Process on Civil-Military Relations in Turkey. *SETA Foundation for Political, Economic, and Social Research. Hal.* 6.

militer. Hal ini juga diperkuat dengan diberlakukanya reformasi konstitusi pada 1 November 1983 terhadap Undang-undang No. 2945 sehubungan dengan struktur, tugas dan tata kerja NSC. Selanjutnya, konstitusi Pasal 118 pada 3 Oktober 2001 menjadi Undang-Undang No.2945 pada tanggal 15 Januari 2003 yang menyebutkan bahwa jumlah keanggotaan NSC meningkat menjadi 14 orang dengan penambahan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman. Dalam amandemen konstitusi tersebut tugas NSC diatur ulang dan dibatasi. Setelah amandemen, Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

"NSC harus menyampaikan segala keputusan kepada Dewan Menteri, perumusan dan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional Negara harus di konsultasikan dengan dewan Menteri. Keputusan Dewan tentang langkah-langkah yang dianggap penting harus melalui konslutasi dengan Dewan Menteri. integritas dan keutuhan negara dalam mencapai perdamaian dan keamanan masyarakat akan dibahas bersama dengan Dewan Menteri." 146

Setelah amandemen, Undang-Undang Nomor 2945 yang berisi tugas utama dari NSC sebagai berikut:

"Dalam kerangka definisi keamanan nasional dan kebijakan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, NSC harus membuat keputusan tentang identifikasi, formulasi, dan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional Negara, melakukan koordinasi yang diperlukan. NSC harus menyerahkan keputusan-keputusan pendapat kepada Dewan Menteri dan melakukan tugas yang diberlakukan oleh hukum. Dalam sistem saat ini, pertemuan Dewan diadakan di bawah pimpinan Presiden. Keputusan diambil dengan suara mayoritas . Dewan juga dapat memberikan usulan pada Perdana Menteri atau langsung pada Presiden. Agenda NSC harus diketahui oleh Presiden setelah mempertimbangkan pendapat dari Perdana Menteri dan Panglima Angkatan Bersenjata Turki."

Selain itu, Sekretaris Jenderal NSC dapat menghadiri sebuah pertemuan pengambilan keputusan, tetapi tidak memiliki hak untuk memilih. Keputusan dari NSC ditempatkan sebagai prioritas dalam agenda Dewan Menteri oleh Perdana

_

Menteri dan keputusan yang diperlukan kemudian diambil. Dalam konteks amandemen hukum, harus mendapat keputusan dari penasehat NSC.¹⁴⁷

Untuk mendukung proses aksesi Uni Eropa Turki, beberapa amandemen hukum juga dilakukan mengenai Sekretariat Jenderal NSC. Dengan amandemen Undang-Undang No. 4963 pada 7 Agustus 2003, Sekretaris Jenderal NSC dapat dipilih dari perwakilan sipil. Sebelumnya Sekretaris Jenderal dipilih dari kalangan jenderal militer yang ditunjuk melalui proses tiga tahap yang melibatkan rekomendasi dari Panglima Angkatan Bersenjata Turki, Perdana Menteri dan persetujuan oleh Presiden. Dalam amandemen, Sekretaris Jenderal diangkat dari pencalonan oleh Perdana Menteri dan persetujuan oleh Presiden. Melalui amandemen hukum, tugas Sekretariat Jenderal NSC telah berubah yakni untuk memberikan layanan sekretariat ke NSC dan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh NSC dan oleh hukum. Dalam rangka amandemen, struktur organisasi, tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal dan hal-hal yang berkaitan dengan staf dan fungsi internal diatur oleh Peraturan Pemerintahan Sekretariat Jenderal NSC, yang mulai berlaku setelah 8 Januari 2004. 148

Perombakan yang dilakukan oleh pemerintahan AKP terhadap kewenangan militer sangat mengguncang legitimasi militer secara politik. Kondisi ini sebenarnya sangat memungkinkan militer untuk kembali melakukan kudeta. Namun karena antusiasme masyarakat Turki mengenai prospek bergabung dengan Uni Eropa mencapai 77% sehingga membuat militer memilih untuk tidak mengambil risiko menentang reformasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses aksesi Uni Eropa menimbulkan reformasi yang secara signifikan pelemahan kekuatan militer.

Pada pemilu 2007, terdapat peluang militer untuk melakukan protes terhadap pemerintahan sipil AKP. Hal ini berkaitan dengan keputusan AKP

_

¹⁴⁷ Ibid

¹⁴⁸ Ibid

¹⁴⁹ S.A. Cook. 2010. *The Weakening of Turkey's Military*. Diakses dari *Council on Foreign Relations*. http://www.cfr.org/turkey/weakening-turkeys-military/p21548 [10 Oktober 2016]

mengusung Menteri Luar Negeri Abdullah Gul sebagai calon presiden. Militer mencoba menghidupkan kembali sentimen antara Islamis melawan Sekularis karena Abdullah Gul merupakan salah satu tokoh Islamis berpengaruh dalam perpolitikan Turki. Hal ini adalah upaya pertama campurtangan militer dalam politik sejak dimulainya proses reformasi secara terbuka. Namun Uni Eropa langsung mengkritik upaya campur tangan militer dalam politik dan menganggap militer mengganggu proses demokratisasi di Turki. Hal tersebut berarti bahwa selama militer terus mengganggu proses demokrasi, Turki tidak akan pernah menjadi anggota Uni Eropa.

Dalam intervensi militer pada tahun-tahun sebelumnya, dukungan rakyat Turki cukup besar terhadap peran militer sebagai penjaga demokrasi dan sekularisme. Intervensi militer dianggap sah dan menjadi perubahan yang sangat penting dalam pergeseran persepsi sipil atas batas-batas peran dan tindakan militer. Hal ini juga menjadi salah satu langkah untuk mendapat legitimasi dari pemerintahan sipil. Namun, dukungan populer yang luas untuk AKP dengan statusnya sebagai pemerintah yang didukung mayoritas, menyebabkan pengaruh AKP untuk menerapkan reformasi ekonomi dan reformasi sosial dan politik lebih mendapat legitimasi rakyat. Pada gilirannya hal ini akan memiliki implikasi terhadap hubungan sipil-militer dan AKP telah mempertahankan kekuatan politik dan dukungan publik untuk meningkatkan kontrol sipil terhadap militer.

Terdapat beberapa alasan yang mencoba menjelaskan mengapa militer sangat dominan dalam pemerintahan Turki. *Pertama*, sejarah mencatat bahwa bangsa Turki sejak awal dikenal sebagai *the warrior nation*. Mereka unggul dalam peperangan dan administrasi pemerintahan, sehingga seluruh dunia Islam pernah berada dibawah kekuasaannya dan beberapa negara Eropa berada di bawah kerajaan Usmani. Turki adalah satu-satunya "*muslim country*" yang tidak pernah dijajah Barat, bahkan pernah menaklukkan mereka. Kota Istanbul adalah sisa terakhir dari penaklukkan Usmani terhadap Barat. *Kedua*, dari geo-politik, posisi Turki sangat rapuh, dikepung oleh kekuatan luar yang mengancam, baik karena

¹⁵⁰ Kurt. Op. Cit. Hal. 5-6.

factor kesejarahan maupun persaingan global antara Barat dan Timur. Ini mengkondisikan pada kekuatan militer untuk selalu waspada dan tampil di depan. Turki menjadi kekuatan terbesar NATO (*The North Atlantic Treaty Organization*) yang kedua setelah AS, dengan pasukan sebesar 514.000, dan cadangan sejumlah 380 ribu. Ketika terjadi Perang Korea (1950-1953) pasukan Turki diterjunkan kesana dengan payung PBB dan NATO. Bahkan kehadiran pasukan Turki ke Korsel telah ikut menyebarkan Islam. Pendeknya, tentara Turki selalu hadir sebagai penjaga perdamaian di negara yang dilanda krisis dengan mandat NATO. *Ketiga*, dukungan dan kepentingan AS terhadap militer Turki juga memperkuat posisi politik milter di dalam negerinya. Bagi AS posisi Turki sangat strategis sebagai mitra untuk menjaga stabilitas dan mendukung kepentingan Barat di kawasan Timur Tengah yang selalu bergolak.

Ketiga faktor di atas dan diperkuat lagi oleh pasal-pasal konstitusi yang ada, telah menempatkan militer merasa sebagai warga negara kelas satu di Turki, dengan mandat mengawal Kemalisme dan menjaga keamanan negara. Oleh karena itu telah berulangkali militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang ada dengan alasan untuk menyelamatkan ideologi Kemalisme, yaitu pada tahun 1960, 1971, 1980, dan 1997. Namun semua itu oleh para pengamat tak lebih sebagai ketakutan militer yang merasa supremasinya hendak digeser oleh kekuatan sipil.

3.1 Demokratisasi Di Timur Tengah Pasca *Arab Spring* : Konteks Internasional

Timur Tengah dan Afrika Utara mengalami rekonfigurasi geopolitik yang disebut sebagai fenomena *Arab Spring* pada tahun 2010. Fenomena ini dipicu oleh pecahnya Revolusi Tunisia atau yang lebih popular dengan sebutan Jasmine Revolution yang menuntut penurunan presiden Habib Bourguiba and Zine El Abidine Ben Ali yang telah berkuasa di Tunisia sejak tahun 1987 yang berkuasa

secara otoriter. Instabilitas sosial ekonomi yang terjadi di Negara ini menjadi penyebab terjadinya revolusi. 151

Arab spring adalah salah satu gambaran yang menjelaskan bahwa kepemimpinan otoriter di beberapa negara Muslim harus ditumbangkan. Hal ini terjadi karena menguatnya tren demokratisasi di negara-negara Muslim. Sehingga memunculkan tren transisi demokrasi yang menuntut penggulingan rezim otoriter di negara-negara muslim. Hal ini didukung oleh hasil riset PEW center yang menunjukkan bahwa beberapa negara muslim menyatakan demokrasi merupakan pilihan sistem pemerintahan terbaik. Hal ini dijelaskan dalam data berikut:

Tabel 3.2. Presentase Preferensi Terhadap Demokrasi di negara-negara

Muslim

Views Of Democracy				
Country	Democracy is preferable to any other form of government (%)			
Lebanon	81			
Turkey	76			
Jordan	69			
Nigeria	66			
Indonesia	65			
Egypt	59			
Pakistan	42			
(Based on muslim only)				

Sumber:PEW Research Center, Diakses dari http://www.pewglobal.org/2012/07/10/most-muslims-want-democracy-personal-freedoms-and-Islam-in-political-life/ [20 Maret 2016]

Data pada tabel 3.2 menunjukkan enam dari tujuh negara mayoritas muslim menyatakan demokrasi sangat sesuai digunakan dalam sistem pemerintahan. Hal tersebut berarti ide demokrasi mampu mendorong kesadaran

¹⁵¹John Elpostito, Tamara Sonn, dan John O. Voll. 2016. *Islam and Democracy After the Arab Spring*. Oxford: Oxford University Press. Hal. 237.

masyarakat sipil untuk melawan tirani mayoritas. Tragedi *Arab Spring* adalah penegasan adanya krisis sistem absolutisme di semenanjung Arab. ¹⁵² Sehingga mendorong munculnya gerakan-gerakan *people power* menuntut perubahan sistem politik dari sistem absolutisme menuju demokrasi. Misalnya yang terjadi di Tunisia, Libya, Yaman, dan Suriah, meskipun masih belum optimal.

Arab spring merupakan harapan besar bagi demokratisasi yang berasal dari gelombang revolusi populer pada tahun 2011. Konflik kekerasan di Suriah, Irak, Libya, Yaman, dan Lebanon merupakan tragedy demokrasi yang sangat menyedot perhatian dunia internasional. Dampak dari fenomena ini adalah adanya munculnya actor-aktor berpengaruh baru, rapuhnya demokrasi di beberapa negara, proliferasi aktor kekerasan non-negara, memanasnya persaingan Iran-Arab, dan dampak politik dari pergeseran pola perdagangan energi global.

Penguasa dan rezim dipaksa untuk memilih antara kebijakan represi dan partisipasi yang lebih besar, dengan ancaman bahwa jika mereka membuat pilihan yang salah mereka sendiri bisa kehilangan kekuasaan, seperti yang dilakukan Shah Iran atau FLN di Aljazair. Jika rezim otoriter tidak menyesuaikan dengan keinginan dari kebangkitan Islam, mereka bisa digulingkan. Namun, gerakangerakan Islam dan para pemimpin mereka menghadapi antara melakukan adaptasi secara politik atau menjadi oposisi dengan menggunakan kekerasan. Sehingga semua kelompok, baik kelompok Islam atau sekuler harus memutuskan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan mereka. 153

Kemunculan gerakan kebangkitan Islam di Mesir maupun Tukri merupakan refleksi kegagalan beroperasinya demokratisasi dan kuatnya supremasi militer. Mereka menyadari bahwa demokrasi hanya menjadi utopia yang semakin memarginalkan mereka dari kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Berbagai platform gerakan religius sosiokultural muncul sebagai respon terhadap kondisi kebebasan politik yang dibatasi . Hal ini menyebabkan kelompok-kelompok Islam

¹⁵² John Elpostito, Tamara Sonn, John O. Voll. Loc.Cit

¹⁵³ John L. Esposito and John O. Voll. 1996. *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press. Hal. 3

membangun basis sosialnya sendiri secara eksklusif dan memungkinkan terbelahnya gerakan religius kultural ini menjadi gerakan religius politik. *Arab Spring* menjadi *trigger factor* penting yang memicu aktivasi gerakan religius politik yang menyebabkan gerakan kebangkitan Islam semakin populer di abad 21.

Berdasarkan uraian historis diatas, dapat disimpulkan perbandingan antara Mesir dan Turki sebagai berikut ini :

Tabel 3.3. Perbandingan Mesir dan Turki

	MESIR	TURKI		
Bentuk pemerintahan	Republik	Republik		
Agama mayoritas	Islam (sunni)	Islam sunni)		
Peran militer dalam	Dominan	Dominan		
politik				
Proses demokratisasi	Pasca Arab Spring 2010	Kemenangan AKP pada		
		tahun 2002		

Sumber: Diolah berdasarkan penjelasan sebelumnya.

Dari tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa peran militer dalam politik sebenarnya tidak terlepas dari upaya bagaimana legitimasi pemerintahan otoriter dikelola. Di Mesir, karena militer telah memiliki peran sejak awal berdirinya republik, menghilangkan peran militer berarti sama dengan kehilangan legitimasi politik. Hal tersebut dilakukan oleh tiga rezim pemerintahan mulai dari Nasser hingga Mubarak. Di era Nasser, pembentukan *Arab Socialist Union* (ASU) merupakan lembaga yang terdiri dari banyak elit militer sebagai pengganti *Revolution Command Council* (RCC) yang berarti masih menandakan besarnya pengaruh militer dalam politik. Di era Sadat, dengan menggunakan undangundang kebebasan politik, ASU di substitusi menjadi partai politik *National Democratic Party* (NDP) yang sebenarnya juga di kuasai oleh para elit militer. Bahkan wacana kebebasan politik di era Sadat ternyata merupakan upaya untuk menjaga legitimasi kekuasaanya dari masyarakat sipil.

Begitu juga di Turki, peran militer yang dominan merupakan warisan dari otoritarianisme pemerintahan Mustafa Kemal. Militer dikonstruksi sebagai penjaga ideology nasionalis yang berarti ideology kemalisme atau sekularisme. Ketika kekuatan sosial yang lain mencoba untuk mengancam legitimasi ideologi sekuler, maka militer akan berperan menjadi penyelamat. Hal ini terlihat dari terjadinya kudeta militer yang terjadi antara tahun 1960 dan 1980. Namun setelah mendapat kekuasaan politik, militer juga mencoba untuk memperkuat legitimasi politiknya dengan memperkuat konstitusi Turki. Ada hubungan yang tidak seimbang antara elit militer dan sipil di Turki sehingga supremasi militer begitu kuat. Hingga munculnya pemerintahan AKP pada 2002, legitimasi militer harus berhadapan dengan pemerintahan sipil yang akhirnya menyebabkan militer harus mengakui bahwa kekuasaan politik telah berpindah ke tangan pemimpin sipil. Baik Mesir maupun Turki keduanya menunjukkan budaya otoritarianisme yang kuat dan tidak adanya mekanisme check and balance karena kuatnya rezim militer. Menguatnya intervensi militer dan menguatnya proses globalisasi menjadi dua faktor penting dalam melihat Post-Islamisme yang akan di jelaskan dalam bab selanjutnya.

BAB 5

KESIMPULAN

Skripsi ini membahas tentang dinamika gerakan politik Islam kontemporer (Post-Islamisme) di dua negara dengan kehidupan Islam kultural yang sangat kuat yakni Mesir dan Turki. Meskipun memiliki kehidupan Islam kultural yang kuat, namun dinamika politik Islam di Mesir dan Turki tidak sepenuhnya Islami atau menganut sistem khilafah sebagai bentuk pemerintahan Islam. Sistem politik yang digunakan di kedua negara ini justru sistem republik. Paradoks terebut yang akhirnya menyebabkan munculnya kekuatan-kekuatan sosial Islam yang bertransformasi menjadi gerakan-gerakan politik. Tujuannya adalah untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan sistem pemerintahan secara Islami. Namun seiring dengan berkembangnya demokratisasi dan globalisasi, gerakan Islam politik dituntut untuk melakukan penyesuaian-penyesuan agar mampu merangkul pemilih untuk memenangkan suara dalam pemilu. Namun, peralihan sikap politik Ikhwanul Muslimin di Mesir dan AKP di Turki memunculkan berbagai respon secara politik dari rezim militer dan kelompok sekuler. Resistensi sikap Post-Islamisme di Mesir dan Turki menunjukkan hasil yang berbeda.

Terdapat tiga hal mengapa *Post-Islamisme* diterapkan menjadi strategi gerakan politik Islam kontemporer. Pertama adalah kemunculan gelombang demokratisasi yang tidak bisa dibendung pengaruhnya. Hal ini mengharuskan politik Islam mengembangkan bentuk politik *inklusif*. Dalam konteks Mesir, jika terus mengalami *eksklusivisme* ideologi gerakan, tidak memungkinkan bagi Ikhwanul Muslimin untuk memperoleh kursi politik. Kedua, persoalan kesejahteraan ekonomi yang menjadi tantangan bagi rezim pemerintahan sebelumnya di Mesir maupun Turki. Ketiga, berkaitan dengan upaya dalam mendepolitisasi militer sebagai rezim paling berpengaruh di Mesir dan Turki. Pertentangan secara ideologis antara kelompok Nasionalis yang pasti didukung oleh militer dan kelompok Islamis yang telah memiliki basis masa yang kuat pada tingkat akar rumput sejatinya hanya persoalan perebutan kekuasaan diantara kedua belah pihak.

Dalam konteks Mesir dan Turki, kajian ini sangat penting dalam perkembangan keilmuan hubungan internasional karena politik Islam sejatinya tidak berbeda dengan politik-politik pada umumnya karena tujuan utamanya adalah untuk meraih kekuasaan. Keberhasilan politik Islam di Mesir dan Turki menguatkan asumsi bahwa politik Islam telah memanipulasi demokrasi dan memanfaatkanya untuk kepentingan kekuasaan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konsep perpaduan analisis gerakan sosial dan ilmu politik. Penulis menggunakan konsep *Islamic Revivalism*, *Islamic Political Movements* dan *Post-Islamisme* untuk menjelaskan perubahan sikap politik gerakan Islamisme di Mesir dan Turki. *Islamic Revivalism* atau kebangkitan Islam digunakan untuk melihat fenomena menguatnya kembali gerakan Islam di kedua negara. Sedangkan *Islamic Political Movements* digunakan untuk menganalisis deferensiasi antara gerakan sosial yang berorientasi politik (kekuasaan) dan berorientasi sosial-kultural. Dan *Post-Islamisme* sebagai konsep digunakan untuk melihat bagaimana pergeseran sikap politik Ikhwanul Muslimin di Mesir dan AKP di Turki yang akan berdampak pada kebijakan ekonomi dan respon terhadap militer.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Mesir dan Turki memiliki kemiripan perubahan politik yang disebut sebagai era *Post-Islamisme*, sebagai titik temu antara demokrasi dan nilai-nilai Islam. Namun, resistensi politik *Post-Islamisme* di kedua negara mengalami perbedaan. *Post-Islamisme* di Turki relatif berhasil dan di Mesir relatif gagal yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di Turki, AKP mampu mempertahankan legitimasi kekuasaan dengan berbagai kebijakan populis dan mengupayakan stabilitas ekonomi dan politik serta melakukan kontrol terhadap militer. Dengan kebijakan neoliberal dan *bargaining* aksesi terhadap Uni Eropa, militer Turki tidak berani mengganggu kinerja rezim AKP yang akhirnya mendapat dukungan populer dari masyarakat. Sedangkan di Mesir, *Post-Islamisme* justru mengalami pembalikan setelah terjadinya kudeta terhadap presiden Morsi bersama Ikhwanul Muslimin. Hal ini disebabkan kebijakan Morsi yang cenderung terlalu Islamis dan

otoriter. Morsi juga tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi Mesir dan tidak mampu melakukan kontrol terhadap militer. Hal ini menyebabkan kekuasaan Ikhwanul Muslimin tidak mendapat legitimasi rezim militer.

Perbedaan yang paling signifikan adalah cara dari Erdogan di Turki dan Morsi di Mesir dalam merespon peran militer dalam politik. Di Turki, Erdogan melakukan pelemahan secara struktural dan kultural terhadap militer. Secara struktural, Erdogan berhasil mengintervensi militer melalui beberapa perubahan undang-undang. Sedangkan secara kultural, Erdogan berhasil mendekonstruksi anggapan bahwa militer adalah penjaga sekulerisme Turki, sehingga militer semakin kehilangan legitimasi dalam masyarakat. Sementara di Mesir, Morsi terlalu agresif dengan beberapa kebijakan yang terkesan otoriter. Dengan usia kepemimpinan yang masih relatif singkat, Morsi langsung memberlakukan kebijakan yang mengancam eksistensi rezim militer. Padahal, secara *de facto* kekuasaan rezim militer Mesir masih sangat besar baik dalam parlemen maupun dalam masyarakat, sehingga tidak ada jalan lain selain kudeta militer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfian, Alfan. 2015. Militer dan Politik di Turki : Pergeseran Politik Dan Terpinggirkanya Militer Pasca AKP. Bekasi : Penjuru Ilmu Sejati.
- Bayat, Asef. 2012. Post-Islamisme. Yogyakarta: LKiS
- Bubalo, Anthony, Greg Frealy dan Whit Mason. 2012. PKS & Kembarannya: Bergiat Menjadi Demokrat Di Indonesia, Mesir, & Turki. Jakarta: Komunitas Bambu
- Chillcote, Ronald. 2003. *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Esposito, John L, Tamara Sonn, John O. Voll. 2016. *Islam and Democracy After the Arab Spring*. New York: Oxford University Press
- Fuller, Graham E. 2004. *The Future of Political Islam*. United States: Palgrave Macmillan
- Huntington, Samuel P. 2003. Benturan Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia. Yogyakarta: Qalam
- Mas'oed, Mohtar, Mac Andreas, Colin. 2011. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J.. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poerwandari, Kristi. 2011. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Cetakan keempat. Depok: LPSP3 UI.
- Roy, Oliver. 1996. *The Failure of Political Islam*. Boston: Harvard University Press
- Silalahi, Gabriel Amin. 2003. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV. Mitra Media.
- Suryadi, Umar B. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Voll, John O. Renewal and Reform in Islamic History: Tajdid and Islah' dalam John L. Esposito (Ed.). 1983. Voices of Resurgent Islam. New York: Oxford University Press.
- Yavuz, M. Hakan. 2003. *Islamic Political Identity in Turkey*. New York: Oxford University Press
- Zahid, Mohammed. 2010. The Muslim Brotherhood and Egypt's Succession Crisis: The Politics of Liberalisation and Reform in the Middle East. United States: Palgrave Macmillan.

Jurnal

- Çarkoğlu, Ali. 2011. Turkey's 2011 General Elections: Towards a Dominant Party Sistem?. *Insight Turkey Vol. 13 No. 3 2011 pp. 43-62*
- Esen, Berk and Gumuscu, Sebnem. 2016. Rising Competitive Authoritarianism in Turkey. Third World Quarterly, DOI: 10.1080/01436597.2015.1135732. ISSN: 0143-6597 (Print) 1360-2241 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/ctwq20

- Gumuscu, Sebnem 2010. Class, Status, and Party: The Changing Face of Political Islam in Turkey and Egypt. Comparative Political Studies 2010 43: 835 originally published online 26 February 2010. Hal. 839-840
- Kirkova, Rina dan Milosevska, Tanja. 2014. The success of democratization in post Arab spring societies. *International Journal of Sosial Sciences Vol. 3 No. 1 Tahun 2014 pp. 29-40*
- Tibi, Bassam. 2009. Islamisme and Democracy: On the Compatibility of Institutional Islamisme and the Political Culture of Democracy. *Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 10, No. 2 Tahun 2009, pp.135–164.*
- Hossain, Akhand Akhtar. 2016. *Islamism, secularism and post-Islamism: the Muslim world and the case of Bangladesh.* Asian Journal of Political Science Volume 24, 2016 <u>Issue 2</u>. Diakses dari http://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/02185377.2016.1185954 ?scroll=top&needAccess=true

Paper

- Abdala, Ulil Abshar. 2011. *Revolusi Post-Islamisme di Dunia Islam*. Jakarta: Forum Lentera Filsafat FIB Universitas Indonesia.
- Ali , Muhammad. 2011. Islamisme (al-Islamiyyah) dan Post-Islamismeme (Ba'da al-Islamiyyah) : Menelaah Pilihan Politik Islam Kontemporer di Indonesia. Jakarta : Jurusan Filsafat, Universitas Indonesia.

Skripsi

Cahya, Fahadayna Adhi. 2012. Pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap Politik Luar Negeri Mesir dalam Konflik Israel-Palestina. Surabaya: Universitas Airlangga

Website

- Akkoc , Raziye. 2015. *Turkey Blocks Access to Sosial Media and YouTube Over Hostage Photos*. Diakses dari http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/11518004/Tur key-blocks-access-to-Facebook-Twitter-and-YouTube.html [3 Maret 2016]
- Anonim. Tanpa Tahun. *Orhan Pamuk Says Erdoğan's Government Authoritarian*. Diakses dari http://www.todayszaman.com/latest-news_orhan-pamuk-says-erdogans-government-authoritarian_317450.html [3 Maret 2016]
- BBC. 2013. *Profile: Egypt's Muslim Brotherhood*. Diakses dari http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12313405 [30 Maret 2016]
- Beaumont, Peter. 2012. Mohamed Morsi Signs Egypt's New Constitution Into Law. Diakses dari

- http://www.theguardian.com/world/2012/dec/26/mohamed-morsi-egypt-constitution-law [30 Maret 2016]
- Kompas. 2012. Konstituante Mesir Terbentuk. Diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2012/06/14/04105877/konstituante.mesir. terbentuk [3 Maret 2016]
- Magdi, Khalil. 2006. Egypt's Muslim Brotherhood and Political Power: Would Democracy Survive?. Diakses dari http://www.rubincenter.org/2006/03/khalil-2006-03-03/ [3 Maret 2016]
- Malkin , Bonnie. 2014. *Turkey PM Says Incriminating Tapes are Fake Amid Growing Phone-Tapping Scandal*. Diakses dari http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/10659567/Tur key-PM-says-incriminating-tapes-are-fake-amid-growing-phone-tapping-scandal.html [12 Februari 2016]
- Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life. 2009. *Mapping the Global Muslim Population*. Diakses dari di http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/#map2 [30 Maret 2016]
- Islamic Modernism and Islamic Revival. Diakses dari http://www.oxfordIslamicstudies.com/article/opr/t253/e9 [20 Maret 2016]
- Ritzki , Ajeng. 2011. *Turki Menurunkan Status Hubungan Diplomatik Dengan Israel*. Diakses dari http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/03/lqxd0rturki-turunkan-tingkat-hubungan-diplomatik-dengan-israel. [19 Maret 201]
- Setiawan , Eko Huda. 2013. 10 Dosa Penyebab Morsi Digulingkan Militer Mesir. Diakses dari http://news.liputan6.com/read/631367/10-dosa-penyebab-morsi-digulingkan-militer-mesir?page=4 [3 Maret 2016]
- Tattersall, Nick. 2013. Erdogan's Ambition Weighs on Hopes for New Turkish Constitution. Diakses dari http://www.reuters.com/article/us-turkey-constitution-idUSBRE91H0C220130218 [3 Maret 2016]
- Umar , Ahmad Rizky Mardhatillah. 2015. *Melacak Asal-Usul Islamisme: Sebuah Pembacaan Kritis*. Diakses dari http://indoprogress.com/2015/01/melacak-asal-usul-Islamisme-sebuah-pembacaan-kritis/ [20 Maret 2015]
- Williams , Dan dan Saul , Jonathan. 2010. *Israel Eyes Impound of Ships Breaking Gaza Blockade*. Diakses dari http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE6871IG20100908?sp=tru e [30 Maret 2016]
- King, John C. 2013. "Qualitative Research Method in International Affairs for Master Students"., dalam https://www.american.edu/sis/crs/upload/2011SP-SIS-680-001_King.pdf [27 Mei 2016]
- Lipin, Michael. Tanpa Tahun. *Konstitusi Baru Mesir: Perbedaannya dengan Versi Lama*. Diakses dari http://www.voaindonesia.com/a/konstitusi-baru-mesir-perbedaannya-dengan-versi-lama/1572237.html [30 Maret 2016]

- Kompas. 2012. Konstituante Mesir Terbentuk. Diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2012/06/14/04105877/konstituante.mesir. terbentuk [3 Maret 2016]
- Alfian, M Alfan. 2015. Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan Kepolitikan AKP di Turki. Diakses dari http://www.akbartandjunginstitute.org/read/me/74175/fenomena-receptayyip-erdogan-dan-kepolitikan-akp-di-turki [13 Oktober 2016]

